



AKREDITASI

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

**KAJIAN
AKREDITASI, PEMENUHAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN,
DAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Kajian Akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan Mutu Satuan Pendidikan

Tim Penyusun :

Meni Handayani, SS, M.Si.
Dra. Ida Kintamani D.H., M.Sc.
Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si.
Bambang Suwardi Joko, S.Sos., MM
Heru N. Triyono
Yusuf Hadi Yudha

ISBN : 978-602-8613-90-3

Pengarah :

Dr. Boediono
Dr. Ibrahim Musa

Penyunting :

Dr. Mahdiansyah, MA
Nur Berlian Venus Ali, M.SE
Erni Hariyanti, S.Psi.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Oktober 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga Buku Laporan Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Kajian Akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini merupakan hasil kajian tentang adanya 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang mutunya dapat dilihat dari peringkat akreditasi sekolah dan hasil ujian nasional (UN) yang dianggap mampu menggambarkan mutu sekolah khususnya mutu SMP.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran pemenuhan SNP dan mutu sekolah menurut peringkat akreditasi dan hasil UN, mengidentifikasi implementasi SNP pada sekolah dan pengertian mutu sekolah terutama yang berada pada posisi anomali, dan mengidentifikasi indikator mana yang dianggap tepat dalam mengukur pemenuhan SNP, serta standar-standar mana yang dianggap penting atau sesuai dengan kebutuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi dan survei di lapangan. Studi dokumentasi menggunakan data sekunder dari BAN S/M dan survei di lapangan untuk memperoleh data primer menggunakan sampel secara purposif sehingga diperoleh 4 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Buleleng, Kota Bandung, dan Kota Surabaya.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Juli 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	IIi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	8
D. Keluaran	8
E. Ruang Lingkup	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Manajemen Mutu Total	10
B. Standar Nasional Pendidikan	14
BAB III Metode Penelitian	16
A. Pendekatan Penelitian	16
B. Teknik Pengumpulan Data	16
C. Teknik Analisis Data	17
D. Kerangka Berpikir	20
E. Jadwal Pelaksanaan	20
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22

A.	Gambaran pemenuhan SNP dan Mutu Sekolah menurut – Peringkat Akreditasi dan hasil Ujian Nasional Secara Nasional	22
B.	Pemenuhan SNP secara Nasional	22
C.	Perbandingan Hasil Akreditasi dan Hasil Ujian Nasional	26
D.	Mengidentifikasi Implementasi SNP pada Sekolah dan Pengertian Mutu Sekolah Terutama yang Berada pada Posisi Anomali	28
1.	Kabupaten Gunung Kidul	28
a.	Profil Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Gunung Kidul	28
b.	Gambaran pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP	30
c.	Pencapaian Nilai UN SMP	33
d.	Implementasi SNP dan Pengertian Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali	34
e.	Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi	34
f.	Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/Mempertahankan Status Akreditasi	
g.	Kendala yang Dihadapi dan Usaha Sekolah dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi	44
h.	Usaha Sekolah dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi	46
2.	Kabupaten Buleleng	
a.	Profil Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng	47
b.	Gambaran pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP	57

c.	Implementasi SNP dan Pengertian Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali	52
d.	Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi	53
e.	Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/Mempertahankan Status Akreditasi	57
f.	Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi	57
g.	Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah	57
h.	Usaha Sekolah dalam Memperoleh nilai UN yang tinggi	58
3.	Kota Surabaya	
a.	Profil Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya	59
b.	Gambaran pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP	60
c.	Profil Sekolah Sasaran	66
d.	Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi	68
e.	Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/Mempertahankan Status Akreditasi	71
f.	Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi	72
g.	Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah	73
h.	Prestasi Akademik.Nonakademik. dan Persentase Siswa yang Diterima di Sekolah Favorit	75
i.	Standar Nasional Pendidikan yang Paling Mempengaruhi terhadap Pencapaian UN	75

4.	Kota Bandung	
a.	Profil Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung	76
b.	Gambaran Pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP	79
c.	Implementasi SNP dan Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali	85
d.	Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi	90
e.	Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/Mempertahan Status Akreditasi	90
f.	Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi	90
g.	Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah	91
h.	Prestasi Akademik, Nonakademik, dan Persentase Siswa yang Diterima di Sekolah Favorit	92
E.	Standar Nasional Pendidikan yang Mempengaruhi terhadap –Pencapaian UN	93
BAB V PENUTUP		96
	A. Simpulan	96
	B. Saran	100
	C. Opsi Kebijakan	101

PUSTAKA ACUAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1. Jenis dan Sumber data
- Tabel 3.2. Jadwal Pelaksanaan
- Tabel 4.1. Empat Standar yang Tergolong Rendah dari Delapan Standar Lainnya
- Tabel 4.2. Capaian SNP Jenjang SMP Akreditasi Tahun 2015 dan
- Tabel 4.3. Data Pokok Pendidikan SMP di Kabupaten Gunung Kidul
- Tabel 4.4. Kebutuhan Prasarana SMP di Kabupaen Gunung Kidul,
- Tabel 4.5. Pencapaian Rata rata Nilai UN SMP di Kabupaten
- el 4.6..Profil Sekolah Sasaran upaten Gunung Kidul
- Tabel 4.7. Profil Pendidikan dan Rasio SMP Kabupaten Buleleng
- Tabel 4.8. Kebutuhan Prasarana Sekolah Kabupaten Buleleng Tahun
- Tabel 4.9. Profil Sekolah Sasaran Kabupaten Buleleng
- Tabel 4.10. Profil Pendidikan Kota Surabaya untuk SMP
- Tabel 4.11. Jumlah Kebutuhan Sarana di Kota Surabaya tahun
- Tabel 4.12. Profil Sekolah Sasaran, Rasio Pendidikan, dan
- Tabel 4.13. Sarana Prasarana Sekolah Sasar
- Tabel 4.14. Profil Pendidikan dan Rasio SMP Kota Bandung Tahun
- Tabel 4.15. Kebutuhan Prasarana Sekolah Kota Bandung Tahun
- Tabel 4.16. Profil Sekolah Sasaran Kota Bandung
- Tabel 4.17. Kondisi Sarpras Sekolah Sasaran Kota Bandung, Tahun
- Tabel 4.18. Daftar Sekolah Sampel dengan Peringkat Akreditasi dana
- Tabel 4.19 Indikator pada Masing

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. Jumlah sekolah berdasarkan Status Akreditasi
- Grafik 1.2. Pemenuhan ke 8 S SMP tahun 2010 sampai dengan
- Grafik 4.1. Persentase Jawaban Standar Proses berdasarkan Kriteria
- Grafik 4.2. Persentase Jawaban Stan
berdasarkan Kriteria
Persentase Jawaban Standar PTK berdasarkan Kriteria
Persentase Jawaban Standar Sarpras berdasarkan
- Perbandingan Hasil AKreditasi dan Hasil U
Hasil Akreditasi dan Hasil UN dari tahun 2011 s.d. 2016
- Grafik 4.7. Pencapaian Standar Proses di Kabupaten Gunung Kidul
- Grafik 4.8. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Di Kab.
9. Pencapaian Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) Di Kabupaten Gunung Kidul
- Grafik 4.10. Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana (Sarpra
Kabupaten Gunung Kidul
- Grafik 4.11. Pencapaian Standar Proses di Kabupate
- Grafik 4.12. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Di Kabupaten
- Grafik 4.13. Pencapaian Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga
ndidikan di Kabupaten Buleleng
- Grafik 4.14. Pencapaian Standar Kompetensi Sarana dan P
Di Kabupaten Buleleng
- Grafik 4.15 Peringkat Akreditasi 2015/2016 dan Rata
Kabupaten Buleleng
- Grafik 4.16. Pemenuhan Standar Proses Berdasarkan Jawaban Butir

- Grafik 4.17. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Berdasar Jawabanm Butir
- Grafik 4.18. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Berda Jawaban Butir Pertanyaan
- Grafik 4.19. Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Berda Jawaban Butir Pertanyaan
- fik 4.20. Grafik Peringkat Akreditasi 2015/2016 dan UN 2016 Kota Surabaya
- Grafik 4.21. Pencapaian Standar Proses Di Kota Bandung
- Grafik 4.22. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Di Kota
- Grafik 4.23. Pencapaian Standar Pend a Kependidikan di Kota Bandung
- Grafik 4.24. Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana di Kota
- Grafik 4.25. Peringkat Akreditasi SMP dan Rata rata Hasil UN SMP a di Jawa Barat Tahun 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Nilai Akreditasi dan UN 2016 dan

1. Alur dan Kerangka Berfikir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan Satuan Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memberi kriteria penilaian akreditasi selalu bersinergi untuk saling mengisi. Pemenuhan SNP dapat tercermin dari hasil akreditasi bila kriteria SNP sudah terpenuhi dalam penilaian akreditasi.

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) (Republik Indonesia, 2003) mengenai SNP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang SNP yang mencakup: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan Pendidikan; 7) Standar Pembiayaan Pendidikan; 8) Standar Penilaian Pendidikan (Republik Indonesia, 2005). PP 19/2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Republik Indonesia, 2013). Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran, yaitu tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

SNP sesungguhnya berguna untuk membuat pendidikan menjadi bermutu. Objek yang dibuat bermutu adalah siswanya, sehingga SNP seharusnya berfokus pada lulusan yang bermutu. Standar Kompetensi Lulusan menjadi fokus utama dan standar lainnya menjadi pendukung untuk mewujudkan lulusan yang bermutu.

Dalam standar *International Baccalaureate*, standar kurikulum, praktik, dan proses belajar mengajar merupakan satu kesatuan dan dalam standar *Western Association of Schools and Colleges* (WASC), kurikulum, instruksi dan penilaian merupakan satu kesatuan, sedangkan dalam SNP, kurikulum, standar proses, dan standar penilaian terpisah, dalam pelaksanaannya menjadi satu alur proses pembelajaran (WASC, IB dalam Meni Handayani dkk, 2016)

SNP perlu dilihat kembali standar mana yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain perbandingan dari beberapa negara maka perlu dilihat seberapa besar pengaruh masing-masing standar dan indikatornya terhadap mutu pendidikan. Standar dan indikator yang memiliki pengaruh paling besar terhadap mutu pendidikan yang dilihat dari hasil UN, sehingga standar yang berpengaruh tetap menjadi ikon pendukung utama.

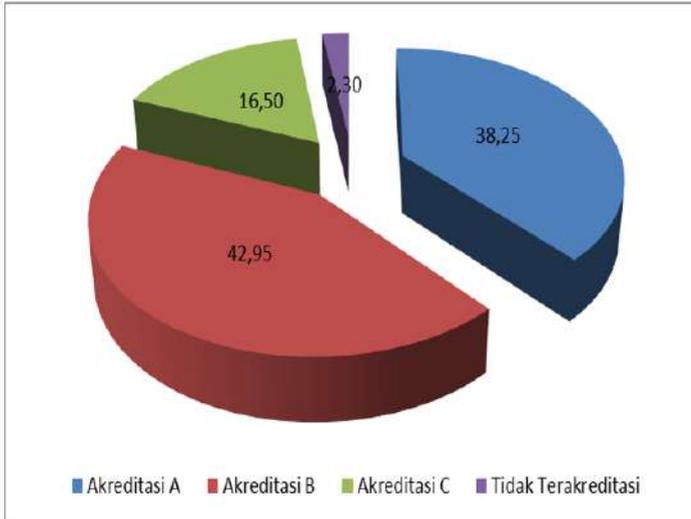
Berdasarkan hasil penelitian hibah pelibatan publik yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak Dikbud) Balitbang, Kemendikbud yang dilakukan Yudha (2016) maka peninjauan terhadap pengukuran pemenuhan 8 standar dalam SNP dapat

direkomendasikan beberapa dua hal. Pertama, terdapat hubungan yang erat antarstandar dalam SNP, sehingga jumlah standar yang diukur di dalam SNP dapat direduksi agar lebih efisien. Kedua, beberapa standar yang dianggap tumpang tindih bisa dijadikan satu dengan standar yang lain, sehingga standar yang ada memang mengukur hal yang berbeda (independen dari standar yang lain).

Hasil penelitian Yudha (2016) juga menunjukkan pengukuran terhadap pencapaian ke-8 standar dalam SNP tidak saling independen, artinya hasil pemenuhan terhadap satu standar dalam SNP dapat diprediksi dari pemenuhan terhadap standar lainnya. Dengan kata lain, untuk mengetahui pemenuhan terhadap standar-standar tersebut, tidak perlu dilakukan seluruhnya (8 standar), cukup dengan sebagian standar saja.

Akreditasi sekolah dalam ayat 86 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

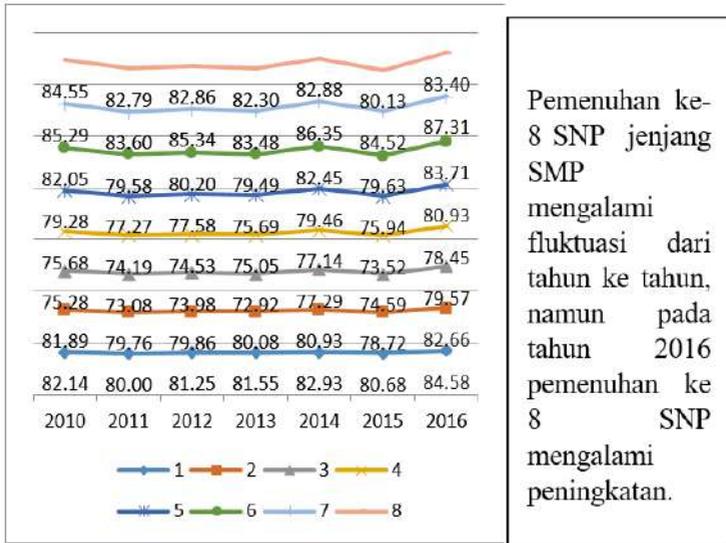
Berdasarkan hasil akreditasi tahun 2010-2016 diperoleh informasi tentang jumlah sekolah berdasarkan status akreditasi yang terdapat pada Grafik 1.1.



Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2016

Grafik 1.1. Jumlah Sekolah berdasarkan Status Akreditasi, Tahun 2010—2016

Jumlah sekolah yang mendapatkan akreditasi A (38,25%) dan B (42,95%) berjumlah 81,20%, artinya sekolah yang sudah memenuhi SNP-nya adalah sekolah yang sudah terpenuhi SNP-nya sekitar 75–100%. Pemenuhan SNP dapat dilihat dari hasil akreditasi seperti yang terlihat pada Grafik 1.2.



Pemenuhan ke-8 SNP jenjang SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2016 pemenuhan ke 8 SNP mengalami peningkatan.

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2016

Grafik 1.2. Pemenuhan ke-8 SNP SMP Tahun 2010 --2016

Keterangan :

1 = Standar Isi, 2 = Standar Proses, 3 = Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 4 = Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Standar PTK), 5 = Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), 6 = Standar Pengelolaan, 7 = Standar Pembiayaan, dan 8 = Standar Penilaian

SNP yang paling rendah pencapaiannya adalah standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana serta standar kompetensi lulusan. Keempat standar tersebut sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2016.

Jika hasil Indonesia dibandingkan dengan negara lain pada

ujian yang berstandar internasional seperti PISA dan TIMSS maka peringkat Indonesia masih belum memuaskan. Pada TIMSS Matematika tahun 2015 untuk tingkat SD, Indonesia ada pada peringkat 45 dari 50 negara. Begitu pula dengan peringkat Indonesia pada PISA untuk anak usia 15 tahun pada tahun 2015 berada pada peringkat 69 dari 72 negara.

PISA diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). PISA merupakan program untuk mengukur pencapaian pendidikan di seluruh dunia. Survei yang dilakukan tiga tahun sekali itu mengukur kemampuan anak berusia 15 tahun dalam membaca, matematika dan sains.

Indonesia pertama kali ikut dalam PISA pada 2000 dengan anggota saat itu 41 negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 39 dengan kemampuan membaca dengan skor 371, peringkat 39 untuk kemampuan matematika dengan skor 367 dan peringkat 38 untuk sains dengan skor 393. Sementara rata-rata internasional yakni 500.

Urutan PISA Indonesia pada survei terakhir mengalami kenaikan pada skor dari survei sebelumnya, namun untuk peringkat belum mengalami kemajuan. Indonesia berada pada urutan 66 dari 72 negara untuk kemampuan literasi dengan skor 397. Urutan 65 dari 72 negara untuk kemampuan matematika dengan skor 386 dan urutan 64 untuk sains dengan skor 403. <https://nasional.tempo.co/read/1079399/soal-hots-yang-bikin-gaduh-peserta-un-sma>

Berdasarkan hasil UN rata-rata nilai SMP di tahun 2015 adalah 6,19 sudah cukup baik namun bila dilihat prestasi Indonesia pada skala internasional masih di bawah rata-rata standar internasional seperti PISA dan TIMSS. Ujian standar

internasional ini sama-sama membandingkan kemampuan anak di berbagai negara, perbedaan didasarkan pada bidang studi yang diuji dan usia peserta ujian. PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun, sedangkan TIMSS adalah studi internasional di bidang matematika dan sains untuk tahun 2015 di Indonesia untuk siswa kelas 4 SD. Standar internasional tentunya berbeda dengan standar nasional di Indonesia sehingga kurikulumnya pun berbeda. Jika Indonesia berkiblat pada kurikulum nasional hal itu menjadi baik bila dalam pembelajarannya materi tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh siswa .

Berdasarkan data akreditasi tahun 2016, di Provinsi Aceh jumlah SMP 1.074, sedangkan yang diakreditasi pada tahun 2016 sebesar 205, sekolah yang terakreditasi C berjumlah 30 dan yang tidak terakreditasi 2. Sekolah yang terakreditasi C dan TT sebagian besar terletak di daerah pedesaan. Sekolah yang terakreditasi A sebanyak 55 dan B sebanyak 118 pada tahun 2016 sebagian besar terletak di daerah perkotaan. Begitu pula di Provinsi Maluku Utara yang memiliki letak geografis terdiri dari beberapa pulau. Jumlah SMP di Maluku Utara sebanyak 443, yang diakreditasi pada tahun 2016 sebanyak 143, di antara sekolah yang sudah diakreditasi pada tahun 2016 yang terakreditasi A sebanyak 22, B sebanyak 65, C sebanyak 51 dan tidak terakreditasi sebanyak 5. Sebagian besar sekolah yang berakreditasi C dan TT berada di Pulau Halmahera, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai. SMP yang tidak terakreditasi adalah sekolah negeri di Halmahera Barat sebanyak 3, Halmahera Tengah sebanyak 1 dan Kota Tidore sebanyak 1.

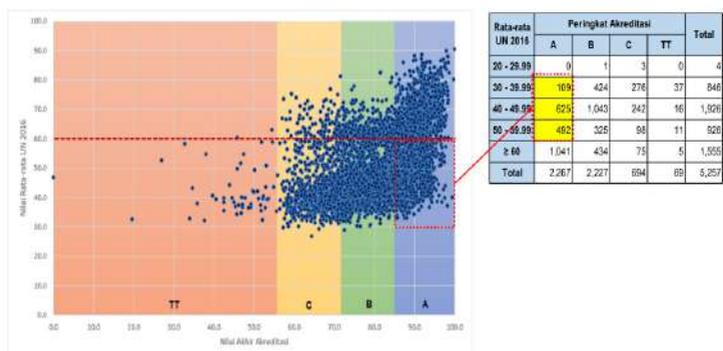
Di DKI Jakarta jumlah SMP 1.091, yang diakreditasi pada tahun 2016 sebanyak 270 SMP. Di antara sekolah yang sudah diakreditasi pada tahun 2016 yang terakreditasi A sebanyak 171,

B sebanyak 97, C tidak ada dan sekolah yang tidak terakreditasi sebanyak 2 berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang berada di daerah perkotaan cenderung memiliki nilai akreditasi tinggi jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di daerah pinggiran. Pemenuhan SNP di daerah yang jauh dari perkotaan lebih sulit dicapai karena letak geografis yang sulit dijangkau.

Namun, hasil akreditasi yang meningkat di tahun 2016 tidak selalu diikuti dengan hasil Ujian Nasional (UN) yang baik. BAN merupakan badan independen yang dibentuk Pemerintah untuk melakukan akreditasi kelayakan pelayanan dan pengelolaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hasil akreditasi dinyatakan dalam tiga peringkat, yaitu A (Amat Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan SNP oleh satuan pendidikan diukur dengan hasil UN. Data awal dari hubungan antara pemenuhan SNP dan hasil UN tahun 2016 menunjukkan anomali, yaitu ada sekelompok sekolah yang berakreditasi A dengan nilai UN di bawah rata-rata nasional, sebaliknya ada sekolah dengan akreditasi C dengan hasil UN yang tinggi.

Gambar 1.3 Nilai Akreditasi, UN 2016, dan Peringkat Akreditasi SMP

Nilai Akreditasi dan UN 2016 (n = 5.257 SMP)



Dari Gambar 1.3. tersebut diketahui bahwa 45,9% persen (1.041) sekolah (SMP) Akreditasi A dengan nilai UN tinggi (>60) hal ini sudah sesuai dengan harapan. Namun terdapat lebih dari 50% sekolah dengan nilai UN kurang dari 60. Studi awal lainnya menunjukkan bahwa semenjak UN tidak menjadi dasar penentuan kelulusan, cenderung terjadi penurunan hasil UN.

Memperhatikan terdapat data akreditasi yang tidak seiring dengan hasil UN serta penurunan pemenuhan akreditasi dapat diduga terjadi masalah dalam implementasi ketentuan tentang SNP.

1. Permasalahan

Pelaksanaan akreditasi ini menjadi penting karena

hasilnya akan mencerminkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan atau pada daerah tersebut. Data hasil akreditasi bagi sekolah sangat penting dalam memperbaiki mutu pada standar yang masih rendah nilai akreditasinya. Berdasarkan akreditasi tersebut sekolah akan memperbaiki kelemahannya sehingga ketika dilakukan akreditasi berikutnya sekolah tersebut sudah melakukan perbaikan dan pemenuhan standar yang diharapkan.

Akreditasi beserta perangkat pertanyaan yang mengukur akreditasi merupakan turunan dari SNP. Artinya, perangkat akreditasi seharusnya berisi tentang 8 SNP. Dari hasil akreditasi dapat dilihat bagaimana pencapaian 8 SNP di sekolah. Sekolah yang sudah terpenuhi SNP-nya maka mutunya pun seharusnya baik. Untuk itu, perlu diteliti tentang bagaimana pemenuhan SNP dan mutu sekolah, bagaimana kontribusi SNP terhadap mutu sekolah dan bagaimana implementasinya. Permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana gambaran pemenuhan SNP dan mutu sekolah menurut peringkat akreditasi dan hasil UN?
- b. Bagaimana implementasi SNP pada sekolah dan pengertian mutu sekolah terutama yang berada pada posisi anomali?
- c. Indikator manakah yang dianggap tepat dalam mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan?

2. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengkaji gambaran pemenuhan SNP dan mutu

sekolah menurut peringkat akreditasi dan hasil UN

- b. Mengidentifikasi implementasi SNP pada sekolah dan pengertian mutu sekolah terutama yang berada pada posisi anomali.
- c. Mengidentifikasi indikator mana yang dianggap tepat dalam mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan, serta standar-standar mana yang dianggap penting atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Keluaran

Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah opsi kebijakan bagi perbaikan pengukuran mutu sekolah melalui akreditasi dan peninjauan kembali terhadap SNP.

4. Ruang Lingkup

Penelitian Akreditasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Mutu Satuan Pendidikan tahun 2017 dengan sasaran jenjang SMP.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Mutu Total

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Manajemen mutu adalah upaya untuk menjamin dan mengendalikan mutu layanan dan produk secara bersama oleh semua komponen organisasi, Manajemen Mutu Total (*Total Quality Management* – TQM) adalah seni mengelola keseluruhan komponen organisasi untuk mencapai hasil dengan mutu tertinggi (*excellence product*). TQM adalah filsafat dan prinsip-prinsip yang merupakan pedoman dalam melakukan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Mukhopadhyay (2005) mengutip Saylor (1992) yang merangkumkan karakteristik konsep TQM dari Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby seperti berikut.

“The Total Quality Mangement phiplosophy provides an overall concepts that fosters continuous improvement in an organization. The philosophy stresses a systematic, integrated, consistent organization-wide perspective involving everyone and everything. It focuses primarily emphasis on total satisfaction for both internal and extrernal customers, within a management environment that seek continous improvement of all process and systems. The TQM philosophy emphazises the use of people, usually in multi-functional teams, to bring about improvement from within the organization.”

[Filsafat TQM memberikan keseluruhan konsep untuk

mengadopsi perbaikan organisasi secara berkesinambungan. Filsafat ini menekankan pada pelibatan semua orang dan segala sesuatu dalam organisasi secara sistematis, terintegrasi, dan konsisten. Fokus utamanya adalah pada kepuasan total dari pelanggan internal dan eksternal, dalam lingkungan organisasi yang melakukan perbaikan secara terus menerus dalam semua proses dan sistem. Filsafat TQM menekankan pada pemanfaatan orang, biasanya dalam tim multifungsi untuk menghasilkan perbaikan dari dalam organisasi]

Yudolf dan Bush-Vishniac (1996) dalam Mukhopadhyay (2005) mengidentifikasi ciri-ciri TQM sebagai strategi manajemen mutu seperti berikut:

1. Fokus pada pelanggan – organisasi harus mendengarkan/ memperhatikan permintaan dari yang mereka layani;
2. Organisasi yang “sehat” atau “tidak sehat” ditentukan oleh fokus pada pelanggan dan proses politik internal organisasi;
3. Fokus pada perubahan secara sistematis – manajemen yang baik berarti membangun sistem yang secara penuh mencakup keseluruhan perilaku yang nyata dan terukur;
4. Melaksanakan dengan ilmu pengetahuan – menghubungkan data dengan pandangan sistem dan pengambilan keputusan;
5. Mengikutsertakan secara aktif semua pegawai dalam proses perubahan.

Dalam membangun budaya mutu Deeming (2000) mengidentifikasi 14 strategi, yaitu:

1. Menciptakan konsistensi dalam memperbaiki produk dan

pelayanan dengan tujuan menjadi kompetitif, tetap dalam bisnis, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Mengadopsi filsafat standar mutu baru.
3. Hentikan ketergantungan pada hasil pemeriksaan masalah atas mutu.
4. Hentikan praktik penghargaan bisnis berbasis patokan harga (termurah).
5. Perbaiki secara tuntas sistem produksi dan pelayanan, dan dampaknya akan mengurangi biaya produksi.
6. Laksanakan pelatihan dalam jabatan.
7. Laksanakan kepemimpinan bukan pengawasan.
8. Hindari ancaman sehingga semua orang akan bekerja secara efektif.
9. Hapuskan penyekat antardepartemen atau unit kerja.
10. Hilangkan slogan, janji, target akan pencapaian tingkat produktivitas baru tanpa memberikan dukungan kepada pekerja untuk melaksanakannya.
11. Hilangkan standar kerja berupa angka-angka kuota pencapaian.
12. Buang penghambat yang menghilangkan hak pekerja untuk bangga dengan hasil kerjanya.
13. Laksanakan program perbaikan diri-sendiri (*self-improvement*).
14. Libatkan semua orang untuk bekerja melaksanakan transformasi.

Juran (1992) memperkenalkan Trilogi Manajemen Mutu, yaitu:

1. Merencanakan Mutu (Mendesain Standar):

- a. Menentukan tujuan mutu (standar).
 - b. Mengidentifikasi pelanggan – yaitu mereka yang menerima dampak mutu.
 - c. Tentukan kebutuhan pelanggan.
 - d. Kembangkan bentuk produk yang merespon permintaan pelanggan.
 - e. Kembangkan proses yang mampu menghasilkan produk sesuai bentuk yang diharapkan pelanggan.
 - f. Kembangkan sistem kendali proses, dan berikan kepada pelaksana di lapangan.
2. Pengendalian Mutu:
- a. Evaluasi mutu kinerja nyatanya (aktual).
 - b. Bandingkan kinerja nyatanya dengan standar mutu.
 - c. Bertindak atas perbedaan pencapaian dengan standar.
 - d. Perbaiki Mutu:
 - e. Kembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk perbaikan mutu.
 - f. Identifikasikan kebutuhan khusus untuk perbaikan – proyek perbaikan.
 - g. Bentuk Tim perbaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
 - h. Berikan sumber daya, motivasi, dan pelatihan yang diperlukan oleh Tim untuk melakukan diagnosa, remedi, dan memelihara peningkatan produktivitas.

Crosby (1980) memberikan 13 langkah dalam membangun program peningkatan mutu.

1. Mendapatkan komitmen manajemen akan tujuan mutu

(standar).

2. Membentuk tim kendali mutu yang melakukan program perbaikan mutu secara berkesinambungan.
3. Pengukuran mutu, yaitu memberikan data mutu dan sumber masalah tidak sesuai mutu dengan standar.
4. Menghitung biaya mutu dengan menetapkan komponen biaya mutu dan menjelaskan kegunaannya sebagai instrumen kendali mutu.
5. Membangun kesadaran akan mutu dengan mengembangkan metode meningkatkan perhatian dari seluruh anggota organisasi terhadap pemenuhan standar mutu produk dan layanan.
6. Melakukan tindakan perbaikan dengan memberikan metode yang sistematis untuk mengatasi masalah secara tuntas.
7. Merencanakan program tanpa kesalahan (*Zero Defect Planning*)
8. Melatih pengawas (supervisors) untuk memberdayakan mereka melakukan pengendalian mutu.
9. Menentukan hari tanpa kesalahan (*Zero Day*) dengan acara pengumuman dan penghargaan kepada semua jajaran organisasi bahwa mereka telah mencapai target perubahan tanpa membuat kesalahan.
10. Menentukan tujuan mutu (standar), yaitu mengubah semua pernyataan dan komitmen menjadi tindakan nyata dengan menyemangati individu-individu untuk mengembangkan tujuan mutu untuk mereka sendiri dan unit kerjanya.

11. Membuang penyebab kesalahan dengan memberikan staf metode mengkomunikasikan kepada manajemen tentang kondisi yang menyulitkan mereka untuk mencapai target perbaikan.
12. Memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap mereka yang berpartisipasi dalam program perbaikan.
13. Membentuk komisi mutu yang melibatkan semua orang yang secara profesional menangani mutu dalam pertemuan rutin.

B. Standar Nasional Pendidikan

Pada pasal 1 ayat (1) bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Di dalam pasal 2 ayat (1), lingkup SNP meliputi standar isi, 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan.

Setiap standar tersebut terdiri atas beberapa komponen dan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai aspek dan indikator. Selanjutnya, indikator-indikator yang dikembangkan tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi dan penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi sekolah.

SNP diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan mutu pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri sekolah/madrasah yang berkelanjutan serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Pada tahun 2013,

PP 19/2005 diperbarui menjadi PP 32/2013, terdapat 4 standar yang berubah, yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian. Hal ini berhubung diberlakukannya kurikulum 2013. Dalam pasal 2 ayat (3) PP 32/2013 dijelaskan bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Setelah itu, pada tahun 2015 terdapat perubahan kedua terhadap SNP sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 13, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 13/2015) (Republik Indonesia, 2015).

1. Standar Isi

Standar Isi dalam PP 32/2013 tentang SNP adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 5 tertulis Standar Isi mencakup kriteria: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi.

2. Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam PP 19/2005 ayat (1), proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Berkaitan

dengan itu, standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan ketujuh standar lainnya (Sanjaya, 2006).

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Standar PTK) adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana (Standar Sarpras) adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada

tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar Penilaian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang diawali dengan studi literatur yang mencakup kajian teori, penelitian empiris sebelumnya dan model yang relevan dengan masalah penelitian. Pemilihan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta desain *cross section* ini dimaksudkan untuk menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian dengan mempertimbangkan terbatasnya waktu dan biaya penelitian.

Pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti serta pelibatan para pakar di bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan dalam mengelompokkan indikator ke dalam standar pendidikan yang dianggap penting, serta dalam penilaian validitas isi (*content validity*). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data satu tahun (2017) dan mencakup banyak sekolah (*cross section*).

Pendekatan kualitatif dilaksanakan melalui instrumen dan diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang dilaksanakan di lapangan dengan mengacu pada sampel yang digunakan secara purposif, sehingga diperoleh 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Buleleng, Kota Bandung, dan Kota Surabaya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, sedangkan pengumpulan data primer digunakan instrumen dan DKT. Jenis dan sumber data yang digunakan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data

No.	Variabel	Nama Data	Jenis Data	Sumber Data
1.	Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	Data akreditasi sekolah jenjang SMP tahun 2014, 2015 dan 2016	Data Sekunder	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M)
3	Implementasi Standar Nasional Pendidikan di sekolah dan pengertian mutu sekolah	Jawaban sekolah terhadap implementasi SNP dan pengertian mutu sekolah di sekolah akreditasi A nilai UN rendah	Data Primer	Diskusi Kelompok Terpumpun dengan kepala sekolah dan guru senior
2	Pengelompokan indikator Standar Nasional Pendidikan yang dianggap penting (<i>construct</i>)	Indikator Standar Nasional Pendidikan yang dianggap penting jawaban butir pertanyaan akreditasi tahun 2017	Data Sekunder	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN- S/M)

Data yang digunakan merupakan data hasil akreditasi tahun

2015 dan 2016 sedangkan UN tahun 2016. Data sampel kabupaten/kota dan sekolah diambil dari data akreditasi dan UN tahun 2015 dan 2016 karena pada saat penentuan sampel data akreditasi tahun 2017 belum tersedia. Untuk menganalisis ketepatan indikator perangkat akreditasi baru terhadap SNP melalui pengujian validitas konstruk menunggu data hasil akreditasi tahun 2017 tersedia. Adapun tahun yang dipilih adalah tahun 2017, mengingat pada tahun tersebut merupakan tahun mulai diberlakukannya perangkat akreditasi Sekolah/Madrasah baru oleh BAN-S/M.

C. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari BAN-S/M dan data primer yang diperoleh dari DKT kepala sekolah dan guru senior tersebut, diolah dan dianalisis sebagai berikut:

1. Pengolahan Data Sekunder

Pengolahan data sekunder ini digunakan untuk mendapatkan gambaran pemenuhan SNP berdasarkan hasil akreditasi dan gambaran mutu sekolah berdasarkan hasil UN. Adapun tahapan-tahapan analisis data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Pre-Processing

Pada tahap ini, data akreditasi sekolah diperiksa kelengkapan isian pemenuhan ke-8 SNP dan kewajaran/kesesuaian nilai yang diperoleh. Data yang tidak lengkap dan tidak wajar/sesuai, tidak diikutsertakan dalam proses selanjutnya (didrop), sedangkan data sekolah yang lengkap dan sesuai ketentuan, diolah lebih lanjut.

b. Data Processing

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi tabulasi distribusi frekuensi, uji beda rata-rata, baik dengan t-test maupun *Analysis of Variance* (ANOVA), serta pengujian validitas konstruk dengan Analisis Faktor Eksploratori (*Exploratory Factor Analysis/EFA*);

c. Analisis Deskriptif kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemenuhan SNP baik secara nasional maupun tiap provinsi. Termasuk di dalamnya perbandingan dengan menggunakan tabulasi silang (*cross tabulation*) antara status sekolah dan peringkat akreditasi sekolah.

d. Uji Beda Rata-rata (Independent-Sample t test dan ANOVA)

Pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pemenuhan SNP menurut karakteristik sekolah/madrasah, seperti status sekolah (Negeri dan Swasta), tipe sekolah (sekolah dan madrasah), provinsi sekolah, dsb.

e. Analisis Faktor Eksploratori (*Exploratory Factor Analysis / EFA*)

EFA merupakan teknik yang digunakan untuk mencari kelompok variabel yang saling berkorelasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah matriks faktor, yaitu

tabel yang memperlihatkan bobot (*loading*) tiap faktor dalam suatu test (Anastasi dan Urbina, 2006). Dalam analisis faktor ini seluruh variabel yang ada akan dilihat hubungannya (interdependen antarvariabel), sehingga akan menghasilkan pengelompokan dari banyak item menjadi hanya beberapa variabel baru atau faktor. Dalam konteks penelitian ini EFA digunakan untuk menguji apakah butir-butir perangkat akreditasi benar-benar mengelompok menjadi 8 standar sesuai dengan pengelompokan SNP.

2. Pengolahan Data Primer

Pengolahan data primer ini digunakan untuk melihat implementasi SNP di sekolah yang anomali dan pengertian mutu sekolah. Adapun tahapan-tahapan analisis data primer adalah sebagai berikut:

a. *Transcribing*

Pada tahap ini, tim peneliti membuat catatan lengkap hasil DKT yang dilakukan, mengacu pada pedoman/panduan DKT yang telah disusun sebelumnya.

b. *Coding*

Proses ini dilakukan untuk melihat kecenderungan dan pola/tema yang muncul berulang-ulang, dalam konteks penelitian ini adalah seperti apa implementasi SNP dan pengertian mutu sekolah di sekolah anomali yang memiliki akreditasi A namun nilai UNnya rendah.

c. Analisis Hasil DKT

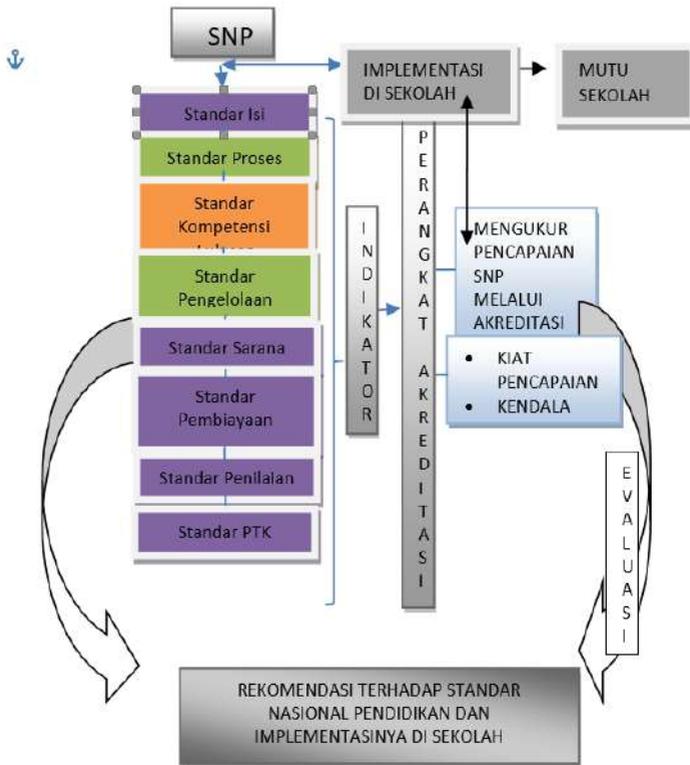
Jawaban kepala sekolah dan guru senior dianalisis

berdasarkan matrik yang sudah diisi sesuai dengan pertanyaan DKT. Kecenderungan jawaban dapat dilihat dari jawaban yang sering muncul dalam matrik.

2. Penyusunan Rekomendasi

Hasil analisis terhadap data primer dan sekunder ini selanjutnya disimpulkan dalam bentuk gambaran pemenuhan SNP secara umum berdasarkan perangkat akreditasi tahun 2015 dan 2016, serta dijadikan acuan pembuatan rekomendasi akhir terkait ketepatan indikator perangkat akreditasi baru terhadap SNP serta kemungkinan penyederhanaan SNP.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 3.1. Alur dan Kerangka Berpikir

SNP yang dicanangkan oleh pemerintah dituangkan dalam instrumen akreditasi untuk menilai mutu sekolah dan melihat pencapaiannya. Selain dari hasil akreditasi juga dilihat implementasi secara faktual di sekolah dengan mengadakan diskusi. Dari diskusi diperoleh masukan dari sekolah tentang

mutu sekolah yang dicerminkan melalui nilai UN dan implementasi SNP di sekolah, kendala yang dialami dan terakhir rekomendasi yang diberikan berdasarkan implementasi SNP di sekolah, pencapaian SNP melalui hasil akreditasi dan mutu sekolah berupa nilai UN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

A. Gambaran Pemenuhan SNP dan Mutu Sekolah menurut Peringkat Akreditasi dan Hasil Ujian Nasional Secara Nasional

1. Pemenuhan SNP Secara Nasional

Pemenuhan SNP dapat dilihat melalui hasil akreditasi. Delapan SNP dituangkan dalam bentuk instrumen akreditasi sehingga hasil akreditasi mencerminkan pemenuhan SNP di sekolah. Sampai tahun 2016 peringkat akreditasi ditentukan oleh jumlah nilai yang didapat oleh sekolah, kriteria A (Amat Baik) dengan nilai 86 – 100, B (Baik) dengan nilai 86 – 100, C (Cukup) dengan nilai 56 – 70. Tidak terakreditasi jika nilainya kurang dari 56.

Berdasarkan akreditasi tahun 2015 dan tahun 2016 dengan N = 5.116 sekolah, sebanyak 43,5 persen sekolah memperoleh akreditasi A; 42,2 persen akreditasi B; 13, 1 persen akreditasi C; dan 1,3 persen tidak terakreditasi. Selain itu, terdapat empat standar yang tergolong rendah dari delapan standar lainnya, yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, standar PTK dan standar sarana prasarana.

Tabel 4.1. Empat Standar yang Tergolong Rendah dari Delapan Standar Lainnya

Standar Proses	Standar Kompetensi Lulusan	Standar PTK	Standar Sarpras
81.64	78.64	76.69	79.72

Hasil pemenuhan SNP yang diperoleh dari hasil akreditasi dapat ditelusuri melalui nilai jawaban per butir pertanyaan akreditasi yang dijawab oleh sekolah. Jawaban butir pertanyaan terdiri A, B, C, D dan E. Empat standar yang memiliki nilai rendah di antara standar lainnya lebih lanjut dilihat butir mana saja yang banyak dijawab D dan E. Jawaban A memiliki skor 4, B skor 3, C skor 2, D skor 1 dan E skor 0. Skor 1 artinya hanya memenuhi sebagian kecil dan skor 0 artinya tidak memiliki. Seluruh pertanyaan dalam borang akreditasi tahun 2016 untuk SMP berjumlah 169 pertanyaan yang terbagi menjadi 8 SNP. Data yang dipakai tahun 2016 karena data tahun 2017 belum ada pada saat pemilihan sampel penelitian. Standar isi meliputi pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan nomor 18, standar proses terdiri dari pertanyaan nomor 19 sampai dengan pertanyaan nomor 29, standar kompetensi lulusan meliputi pertanyaan nomor 30 sampai dengan nomor 49, standar pendidik dan tenaga kependidik terdiri dari pertanyaan nomor 50 sampai dengan pertanyaan nomor 75, standar sarana prasarana meliputi pertanyaan nomor 76 sampai dengan pertanyaan nomor 103, standar pengelolaan terdiri dari pertanyaan nomor 104 sampai dengan pertanyaan nomor 123, standar pembiayaan meliputi pertanyaan nomor 124 sampai dengan pertanyaan nomor 148 dan standar penilaian meliputi pertanyaan nomor 149 sampai dengan pertanyaan nomor 169.

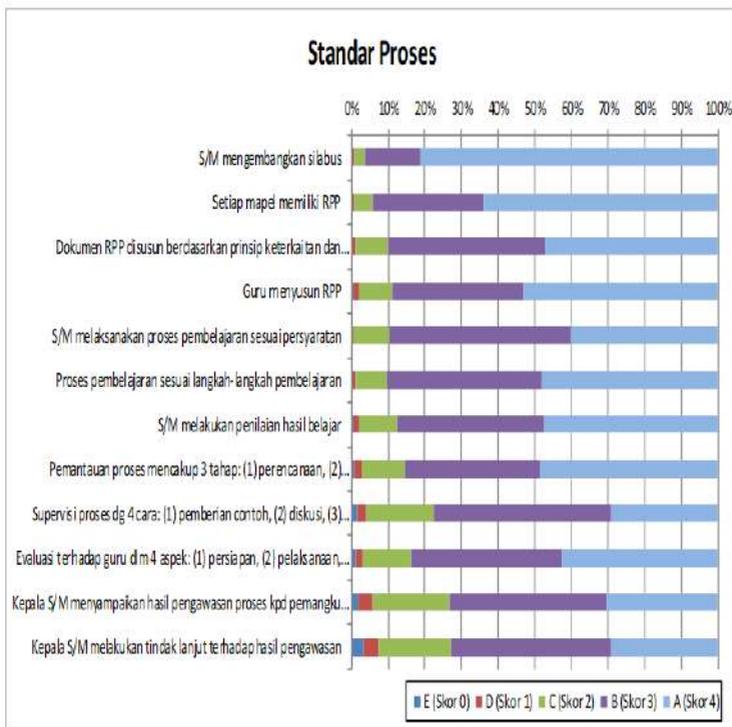
Tabel 4.2. Capaian SNP Jenjang SMP Akreditasi Tahun 2015 dan 2016

Capaian Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SMP berdasarkan Akreditasi Tahun 2015 dan 2016										
Peringkat Akreditasi	N	%	Rata-rata Skor Menurut Standar							
			Isi	Proses	Kompetensi Lulusan	Tendik	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian
A	2,223	43.5%	92.15	90.27	89.26	86.67	90.04	91.50	92.33	90.03
B	2,157	42.2%	81.30	78.95	74.51	72.75	75.75	80.12	85.28	79.78
C	670	13.1%	67.63	65.24	60.23	59.52	61.56	66.09	75.60	68.48
TT	66	1.3%	49.53	45.56	43.09	43.67	46.19	50.10	65.85	55.13
Rata-rata	5,116	100%	83.82	81.64	78.64	76.69	79.72	82.84	86.83	82.44

Standar Proses

Berdasarkan Standar Proses, jawaban dari butir pertanyaan nomor 19 sampai dengan pertanyaan nomor 29, diperoleh dari 12 butir pertanyaan adalah memiliki skor 0 (E), dengan pertanyaan persentase tertinggi pada butir 29, yaitu Kepala S/M melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebesar 3,17 persen.

Secara berurutan, pada butir 28 Kepala S/M menyampaikan hasil pengawasan proses kepada pemangku kepentingan (1,68 persen); butir 26 supervisi proses dengan 4 cara, yaitu (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) pelatihan, dan (4) konsultasi (1,33 persen); butir 27 evaluasi terhadap guru dalam 4 aspek, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tidak lanjut (1,31 persen). Lainnya jawaban butir 19 hingga 25 memperoleh rata-rata hanya 1 persen. Semakin tinggi persentase menggambarkan semakin besar kekurangan dari batas standar.

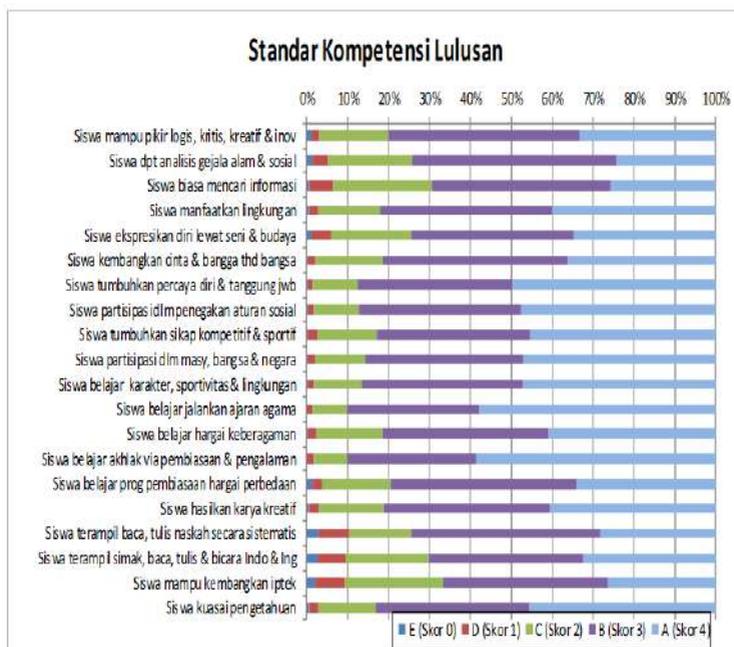


Grafik 4.1 Persentase Jawaban Standar Proses berdasarkan Kriteria

Standar Kompetensi Lulusan

Dari hasil jawaban butir 30 hingga butir 49 terkait SKL meski seluruh butir dari butir pertanyaan 30 hingga 49 diperoleh skor 0/E rendah, namun persentase sangat kecil rata-rata 0 sekian persen. Pada butir 46 siswa terampil baca, tulis naskah secara sistematis, butir 47 siswa terampil simak, baca, tulis dan bicara Bahasa Indonesia dan Inggris, serta butir 48 siswa mampu

kembangkan iptek, memiliki persentase lebih tinggi rata-rata 2 persen masing-masing 2,78 persen, 2,68 persen dan 2,03 persen.



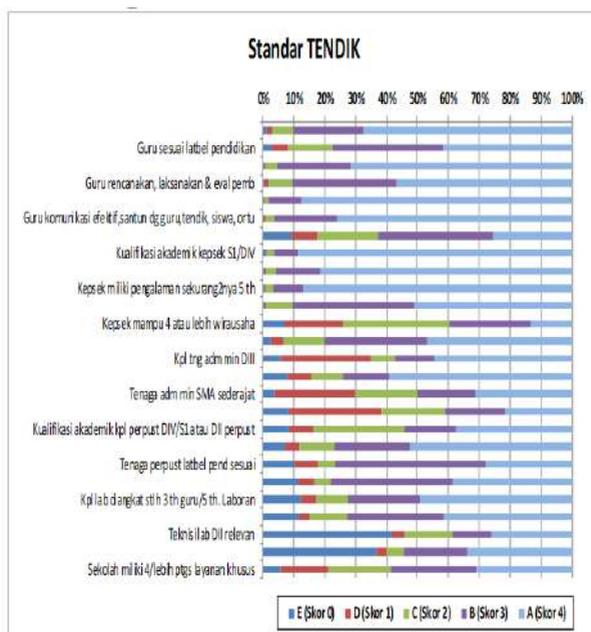
Grafik 4.2 Persentase Jawaban Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Kriteria

Jika melihat pada jawaban dengan skor 4/A kriteria Amat baik, jawaban tertinggi dengan persentase di atas 50 persen pada kriteria A adalah butir 41 siswa belajar menjalankan ajaran agama (57,92 persen) dan butir 43 siswa belajar akhlak via pembiasaan dan pengalaman (58,44). Berbeda dengan persentase kriteria D dan E, jika persentase tinggi maka semakin kurang atau semakin jauh dari batas standar, sebaliknya pada

persentase nilai yang tinggi pada butir jawaban pada tiap butir dengan A, B, dan C mengartikan bahwa dengan hasil jawaban persentase tinggi berarti lebih baik mendekati standar.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (standar PTK)

Pada pertanyaan butir 50 hingga butir 75 terkait pertanyaan menyangkut standar PTK, jawaban yang memiliki persentase tertinggi dengan skor 0 atau rendah adalah pada butir 73 banyaknya sekolah yang belum memiliki teknisi laboratorium D2 relevan sebanyak 41 persen, disusul butir 74 laboran minimal D1. Hal ini menggambarkan semakin besar persentase pada skor E maka semakin banyak kekurangan pada butir tersebut.



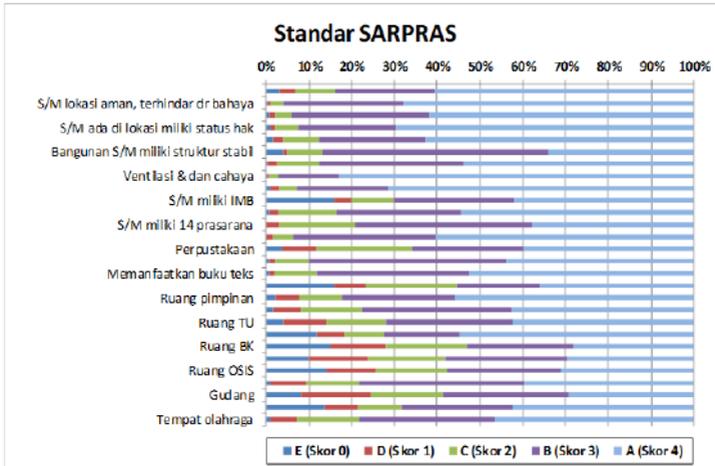
Grafik 4.3 Persentase Jawaban Standar PTK berdasarkan Kriteria

Demikian pada butir 60 tenaga perpustakaan dengan latar belakang pendidikan sesuai (10,01 persen), butir 70 kepala laboratorium minimal D-IV/S-1 dari guru/D-III laboran, butir 71 kepala laboratorium diangkat setelah 3 tahun guru/5 tahun laboran (12,04 persen), dan butir 72 kepala laboratorium memiliki 4 kompetensi (11,67 persen).

Sebaliknya, jawaban butir 54 guru memiliki integritas kepribadian, butir 57 kualifikasi akademik kepala sekolah S-1/D-IV, butir 58 kepala sekolah memenuhi syarat yang ditentukan dan kepala sekolah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun adalah jawaban yang memiliki persentase tertinggi di atas 80 persen pada kriteria A, yang mendekati angka standar PTK.

Standar Sarana Prasarana (Standar Sarpras)

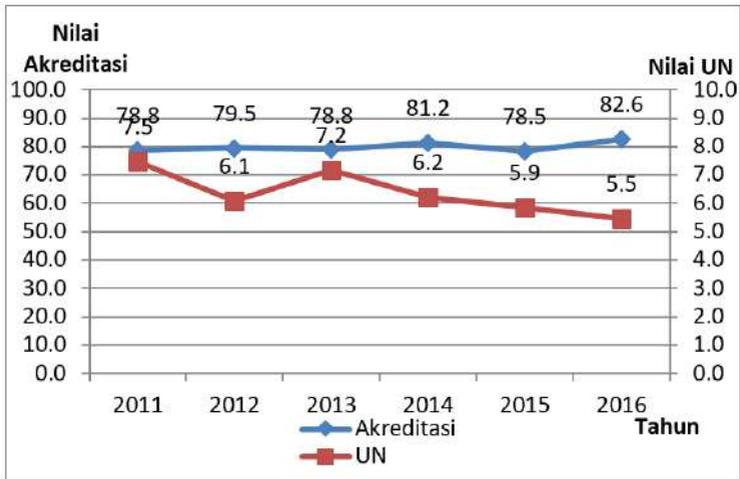
Hasil jawaban persentase terbanyak pada pemenuhan standar sarpras dengan kriteria rendah atau 0 berdasarkan butir pertanyaan 76 – 103, yaitu dengan persentase di atas 10 persen, artinya standar yang rendah/kurang terhadap pemenuhan butir pertanyaan berikut, yaitu butir 85 sekolah/madrasah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) (15,81 persen), butir 92 ketersediaan laboratorium IPA minimal 1 rombongan belajar, butir 96 terdapat sarana ibadah, butir 97 ruang bimbingan karier (BK), butir 98 ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), butir 99 ruang organisasi siswa intra sekolah (OSIS), dan butir 102 ruang sirkulasi.



Grafik 4.4 Persentase Jawaban Standar Sarpras berdasarkan Kriteria

2. Perbandingan Hasil Akreditasi dan Hasil Ujian Nasional

Hasil akreditasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 secara kuantitas selalu meningkat walaupun sekolah yang diakreditasi berbeda-beda dari tahun ke tahun. Peningkatan hasil akreditasi tersebut sebaiknya diikuti pula dengan peningkatan hasil UN dari tahun ke tahun. Hasil UN yang dianalisis secara nasional didasarkan pada sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi. Terdapat kecenderungan bahwa jika soal UN dikerjakan dengan integritas tinggi maka hasilnya lebih mencerminkan hasil yang sebenarnya. Walaupun nilai UN menurun dari tahun ke tahun namun nilai indeks integritas UN (IIUN) di atas 80. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 4.5.



Grafik 4.5 Perbandingan Hasil Akreditasi dan Hasil UN

Hasil akreditasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat walaupun sekolah yang diakreditasi berbeda-beda dari tahun ke tahun. Peningkatan hasil akreditasi tersebut sebaiknya diikuti pula dengan peningkatan hasil UN dari tahun ke tahun. Hasil UN yang dianalisis secara nasional didasarkan pada sekolah yang memiliki nilai integritas tinggi. Terdapat kecenderungan bahwa jika soal UN dikerjakan dengan integritas tinggi maka hasilnya lebih mencerminkan hasil yang sebenarnya.

B. Mengidentifikasi Implementasi SNP pada Sekolah dan Pengertian Mutu Sekolah Terutama yang Berada pada Posisi Anomali

Kabupaten/Kota yang diambil dalam penelitian ini adalah yang memiliki jumlah sekolah berakreditasi A namun nilai UN-nya di bawah 60 lebih banyak dari kabupaten/kota lain. Terdapat 4 kabupaten/Kota yang dipilih secara purposif yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Buleleng, Kota Surabaya dan Kota Bandung. Pertama yang dibahas adalah bagaimana implementasi SNP dan pengertian mutu sekolah terutama sekolah dengan posisi akreditasi A dan nilai UN di bawah 60 atau posisi anomali.

1. Kabupaten Gunung Kidul

- a. Profil Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gunung Kidul

Profil SMP di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2017/2018 dapat dilihat dalam Tabel 4.3: Dari 111 sekolah, lebih dari separuhnya (61 sekolah) atau 54,95 persen merupakan SMP negeri, sisanya SMP swasta. Namun, dari segi peserta didik, mayoritas terdapat di SMP negeri sebesar 80,95 persen.

Tabel 4.3 Data Pokok Pendidikan SMP Kabupaten Gunung Kidul, Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Sekolah	61	50	111
2	Siswa	19.096	4.494	23.590
3	Siswa Baru	6.197	1.360	7.557
4	KS/Guru	1.279	401	1.680
5	Rombel	670	221	891
	Rasio Pendidikan			
6	R-S/Sek	313	90	213
7	R-S/Rombel	29	20	26
8	R-S/G	15	11	14
9	R-Rombel/R.Kelas	0,91	0,89	0,91

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada kesenjangan antara kebutuhan sarana prasarana dengan sarana prasarana yang tersedia. Kebutuhan sarana prasarana sekolah yang masih harus dipenuhi tahun 2017/2018 disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Kebutuhan Prasarana SMP Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017/2018

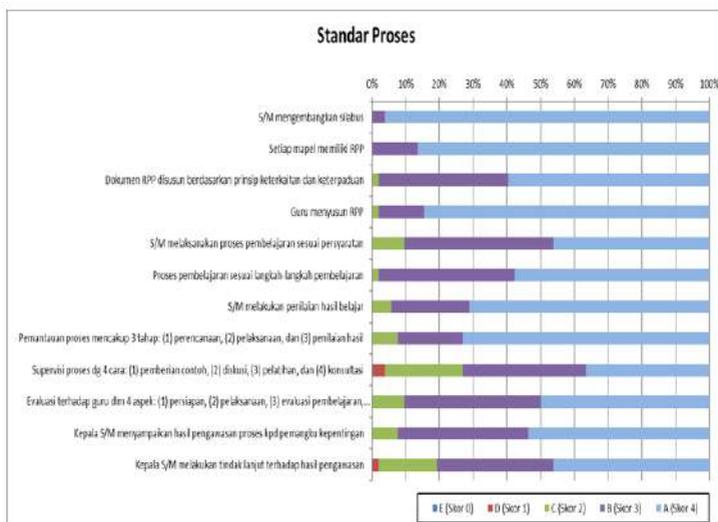
No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Ruang Kelas	733	247	980
2	Lab. IPA	60	33	93
3	Perpus	56	49	105
4	UKS	47	32	79
	Kekurangan atau Kelebihan			
1	Ruang Kelas	63	26	89
2	Lab. IPA	-1	-17	-18
3	Perpus	-5	-1	-6
4	UKS	-14	-18	-32

Bila melihat jumlah kekurangan sarana prasarana ini berdasarkan asumsi bahwa jumlah ruang kelas harus sama dengan jumlah kelas, jumlah laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS harus sama dengan jumlah sekolah. Artinya, satu sekolah harus memiliki prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS maka SMP di Kabupaten Gunung Kidul tidak terdapat kekurangan ruang kelas baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tetapi justru kelebihan 63 ruang kelas untuk sekolah negeri dan 26 ruang kelas untuk sekolah swasta. Sebaliknya, terjadi kekurangan pada prasarana yang lain, yaitu laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS. Sebanyak 18 sekolah yang kekurangan ruang laboratorium IPA, didominasi SMP swasta, yaitu kurang 17 laboratorium dan hanya 1 sekolah negeri yang belum memiliki laboratorium IPA. Sebanyak 5 SMP negeri yang tidak memiliki perpustakaan dan 1 SMP swasta yang belum memiliki perpustakaan. Sebanyak 32 sekolah atau 28,83 persen masih belum memiliki sarana ruang UKS, yaitu 14 di SMP negeri dan 18 di SMP swasta. Oleh karena itu, dari sisi pemenuhan standar sarana prasarana SMP di Kabupaten Gunung Kidul, terdapat kekurangan sarana prasarana berupa laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS. Sebaliknya, untuk ruang kelas terdapat kelebihan yang cukup banyak sebesar 89 ruang.

b. Gambaran pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP

Pencapaian nilai ujian nasional SMP sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 SNP. Pencapaian SNP diukur melalui proses akreditasi terhadap tingkat pemenuhan masing-masing standar

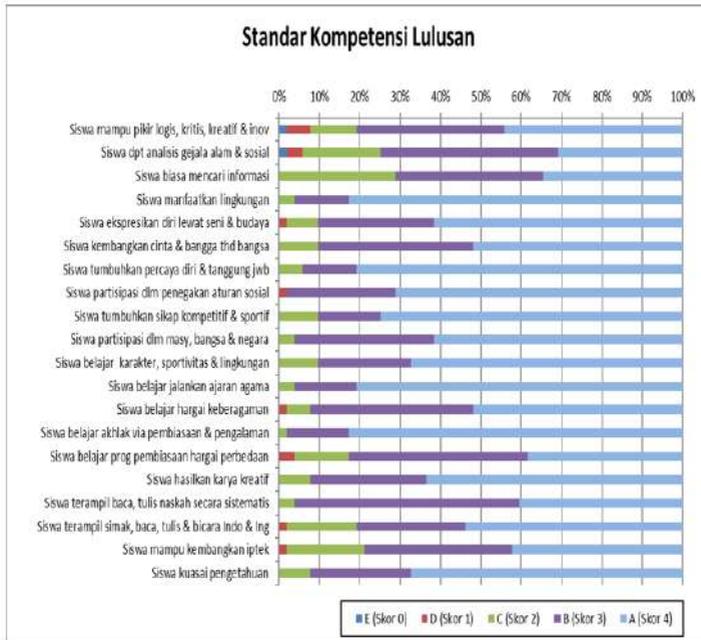
SNP. Hasil akreditasi terhadap ke-8 SNP tersebut, di Kabupaten Gunung Kidul, ditemukan 4 standar yang nilainya rendah dibandingkan standar-standar lainnya. Keempat standar itu adalah (1) Standar Proses dengan skor 88,03; (2) SKL dengan skor 86,68; (3) Standar PTK dengan skor 82,66; dan (4) Standar Sarpras dengan skor 90,60. Masing-masing standar memiliki pencapaian atau pemenuhan yang berbeda berdasarkan butir pertanyaan akreditasi seperti dirangkumkan dalam Grafik 4.5.



Grafik 4.5 Pencapaian Standar Proses Di Kabupaten Gunung Kidul

Butir pertanyaan dalam borang akreditasi untuk standar proses adalah pada butir 18 s.d. 29. Pada standar proses, butir pertanyaan akreditasi yang pemenuhan standarnya paling rendah dengan skor 1 pada butir

29, yaitu kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebesar 1,92%, sedangkan yang tertinggi pada butir 26, yaitu Supervisi proses dengan 4 cara, yaitu: (1) pemberian contoh; (2) diskusi; (3) pelatihan, dan (4) konsultasi sebesar 3,85%.

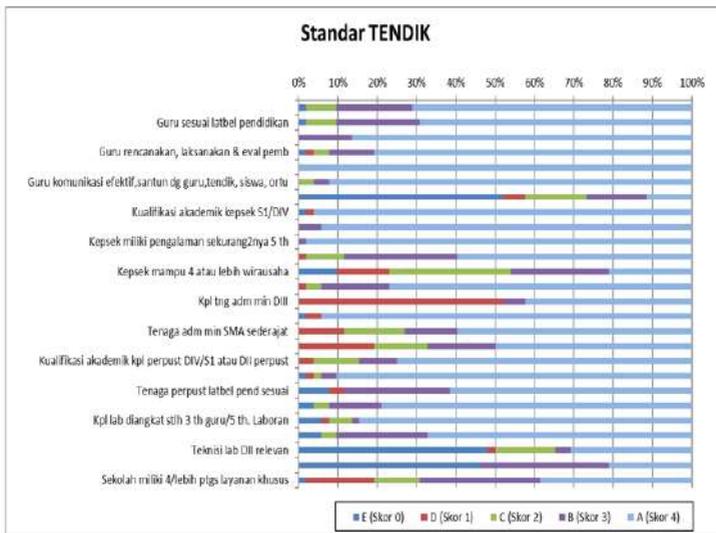


Grafik 4.8 Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Gunung Kidul

Untuk SKL berdasarkan pada Grafik 4.8, SKL memiliki 20 butir pertanyaan, yaitu pada pertanyaan akreditasi butir 30 s.d. 49, ada 2 butir pertanyaan yang mendapat skor 0, yaitu pada butir 30, siswa mampu berpikir logis,

kritis, kreatif dan inovasi, dan butir 31 yaitu siswa dapat menganalisis gejala alam dan sosial, masing-masing sebesar 1,92%.

Pertanyaan yang mendapat skor rendah atau 1, ada pada 8 butir pertanyaan, yaitu (1) butir 30 tentang siswa mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovasi, (2) butir 31 tentang siswa dapat menganalisis gejala alam dan sosial, (3) butir 37 tentang siswa berpartisipasi dalam penegakan aturan sosial, (5) butir 42 tentang siswa belajar menghargai keberagaman, (6) butir tentang siswa belajar program pembiasaan menghargai perbedaan, (7) butir 47 tentang siswa terampil menyimak, membaca, menulis, dan berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta (8) butir 48 tentang siswa mampu mengembangkan iptek masing-masing 1,92 persen. Butir yang memiliki persentase lebih tinggi masing-masing sebesar 3,85 persen pada butir 31 tentang siswa dapat analisis gejala alam dan sosial, dan butir 44 tentang siswa belajar program pembiasaan harga perbedaan. Terdapat kekurangan persentase cukup tinggi sebesar 5,77 persen yaitu pada butir 30 tentang siswa mampu pikir logis, kritis, kreatif dan inovasi.

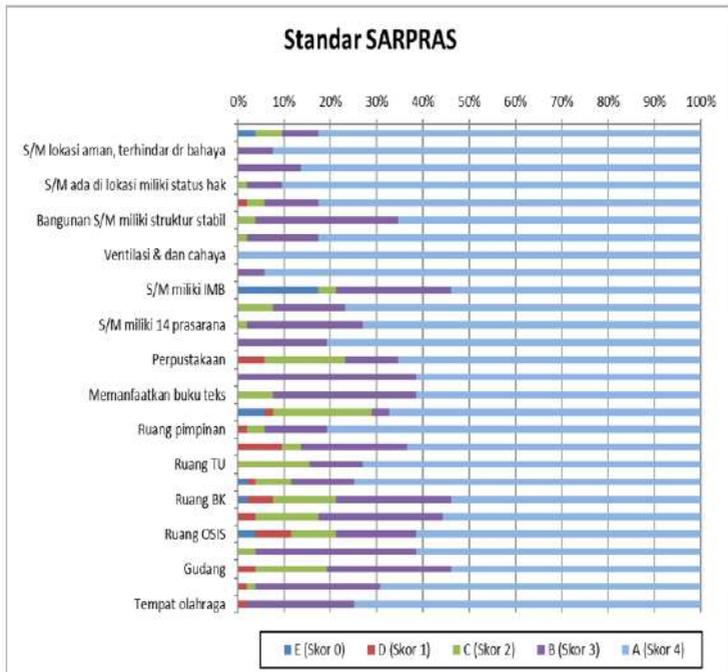


Grafik 4.9 Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Gunung Kidul

Terkait pencapaian standar PTK yang memiliki 26 butir pertanyaan nomor 50 sampai dengan nomor 75, terlihat bahwa 51,92 jawaban kepala SMP di Kabupaten Gunung Kidul dengan skor rendah pada butir 56, yaitu guru menguasai pelajaran yang diajar. Demikian pula pada butir 73, tenaga teknisi laboratorium D-II relevan dan butir 74 tenaga laboran minimal D-1 masing-masing 46,08 persen dan 46,15 persen. Persentase tertinggi berikutnya terkait standar PTK berdasarkan jawaban kepala sekolah adalah butir 61 kepala sekolah mampu 4 atau lebih wirausaha (9,62 persen). Latar belakang pendidikan dan masa kerja tenaga laboran menjadi pertanyaan yang banyak dijawab oleh para kepala sekolah. Pada butir 69, tenaga perpustakaan latar

belakang pendidikan yang sesuai 7,79 persen, butir 71 kepala laboratorium diangkat setelah 3 tahun guru/5 tahun menjadi laboran dan 72 kepala laboratorium memiliki 4 kompetensi masing-masing-masing 5,77 persen. Demikian pula halnya dengan pertanyaan butir 50, 51, 64, 68, dan 70 menyinggung kompetensi dan latar belakang pendidikan tenaga laboran.

Pada Grafik 4.10 mengenai pencapaian standar sarpras yang terdapat pada butir pertanyaan nomor 76 sampai dengan nomor 103. Persentasi tertinggi pada skor 0 kepala sekolah menjawab butir 85 sebesar 17,31 persen adalah sekolah/madrasah terkait kepemilikan IMB, butir 92 laboratorium IPA memuat untuk 1 rombel (5,77 persen), butir 76 Sekolah/madrasah miliki luas lahan sesuai, dan butir 99 ketersediaan ruang OSIS masing-masing 3,85 persen, selanjutnya ketersediaan ruang ibadah dan ruang BK masing-masing sebesar 1,92 persen. Pada jawaban skor terendah berikutnya (1) tertinggi jawaban pada butir 94 ruang guru sebesar 9,62 persen, selanjutnya ruang OSIS 7,69, perpustakaan sebesar 5,77 persen, demikian juga ketersediaan ruang BK, gudang, dan ruang UKS.



Grafik 4.10 Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Kabupaten Gunung Kidul

c. Pencapaian Nilai UN SMP

Untuk tingkat SMP ada 4 mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pencapaian rata-rata nilai UN SMP di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017 per mata pelajaran yang di-UN-kan seperti disajikan pada Tabel 4.5/

Tabel 4.5. Pencapaian Rata-rata Nilai UN SMP Kabupaten Gunung Kidul

No.	Mata Pelajaran	Nilai
1	Bahasa Indonesia	70,66
2	Bahasa Inggris	42,56
3	Matematika	45,9
4	IPA	50,97

Selama ini penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia memperoleh nilai tertinggi pada nilai rata-rata UN SMP di Kabupaten Gunung Kidul 70,66, sedangkan nilai UN 3 mata pelajaran lainnya di bawah rata-rata, yaitu mata pelajaran Bahasa Inggris sebesar 42,56, Matematika sebesar 45,90, dan IPA sebesar 50,97.

d. Implementasi SNP dan Pengertian Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali

SMP yang menjadi sampel di Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 9 sekolah dan seluruhnya memiliki status akreditasi A. Dari seluruh sekolah sampel, hanya SMPN 1 Wonosari yang memperoleh rata-rata nilai UN tinggi, yaitu 85,97. Sementara 8 sekolah lainnya hanya mencapai rata-rata nilai UN di bawah 60, bahkan ada sekolah yang hanya mencapai rata-rata nilai UN 46,09, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Tepus.

Tabel 4.6 Profil Sekolah Sasaran Di Kabupaten Gunung Kidul

No.	Nama Sekolah	Data			Rasio Pendidikan			Status	Nilai UN
		Siswa	Guru	Rombel	R-S/G	R-S/Rombel	R-Rombel/RK	Akreditasi	
1	SMP NEGERI 1 WONOSARI	577	41	24	14,07	24,04	1,00	A	85,84
2	SMP NEGERI 1 KARANGMOJO	499	31	20	16,10	24,95	0,95	A	58,18
3	SMP NEGERI 3 GEDANGSARI	365	22	12	16,59	30,42	0,92	A	57,09
4	SMP MUHAMMADIYAH SAPTOSARI	72	5	3	14,40	24,00	1,00	A	56,18
5	SMP NEGERI 1 GEDANGSARI	317	19	12	16,68	26,42	1,00	A	55,15
6	SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI	353	21	12	16,81	29,42	1,33	A	53,66
7	SMP NEGERI 5 PANGGANG	63	11	3	5,73	21,00	1,00	A	51,77
8	SMP MARGALUHUR KARANGMOJO	54	5	3	10,80	18,00	0,60	A	51,36
9	SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUK	85	10	3	8,50	28,33	0,60	A	46,09

e. Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi

Berbagai upaya yang dilakukan sekolah dalam rangka mengimplementasikan SNP antara lain:

1. meningkatkan semua standar dengan melibatkan semua warga sekolah seperti yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Wonosari.
2. mempertahankan sarana dan prasarana yang ada dengan melakukan pemeliharaan secara rutin seperti yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Wonosari.
3. berusaha memenuhi 8 standar secara maksimal meskipun hasilnya masih minimal terutama pada standar kompetensi lulusan. Hal ini dilakukan karena kondisi siswa yang minim dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Upaya ini dilakukan

oleh SMPN 1 Gedangsari.

4. pemanfaatan LCD, dan pemberian les sore oleh guru untuk 4 mata pelajaran yang di-UN-kan, melaksanakan *try out* pada jam pelajaran ke nol (06.30-07.00), dan melaksanakan konsultasi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini dilakukan oleh SMPN 5 Panggang.
5. memenuhi dan meningkatkan pelaksanaan 8 SNP juga dilakukan oleh SMPN 1 Karangmojo.
6. meningkatkan pelaksanaan pembelajaran, berupaya memenuhi baik kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki, serta berupaya meningkatkan kompetensi guru. Hal ini dilakukan oleh SMP Muhammadiyah Saptosari.
7. mencermati standar-standar yang dianggap masih lemah pemenuhannya dan menganalisis serta menindaklanjutinya dengan berbagai upaya yang memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Tepus.
8. Meningkatkan berbagai kegiatan di masing-masing standar, dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan karyawan. Upaya ini dilakukan oleh SMP Margaluhur Karangmojo.
9. semua perangkat kepentingan di sekolah menjalankan tugas sesuai tupoksinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan oleh SMPN 1 Wonosari.

a. Standar Isi

Pelaksanaan standar isi dapat dilihat dari dokumen

kurikulum yang dimiliki sekolah dan bagaimana penggunaan kurikulum oleh guru yang dituangkan dalam silabus RPP. Selain dokumen kurikulum, perlu diketahui apakah buku yang disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan isi kurikulum yang digunakan tersebut. Selanjutnya, perlu dievaluasi apakah kurikulum dan buku yang digunakan tersebut cukup berkontribusi dalam pencapaian nilai UN.

Dalam hal dokumen kurikulum, semua sekolah sampel telah memilikinya. Khusus untuk SMPN 3 Gedangsari secara rinci memiliki kurikulum tahun 2006 untuk kelas 8 dan 9, sedangkan untuk kelas 7 sudah menggunakan Kurikulum 2013.

Adapun cara guru menggunakan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut;

1. Semua guru memiliki silabus dan RPP (SMP Muhammadiyah Wonosari),
2. Silabus, RPP dilaksanakan dengan baik (SMPN 3 Gedangsari),
3. Melaksanakan silabus, RPP dengan baik (SMPN 1 Gedangsari),
4. Membuat silabus dan dilaksanakan (SMPN 5 Panggang),
5. Guru mengembangkan silabus dan membuat RPP disesuaikan dengan muatan lokal (SMPN 1 Karangmojo),
6. Konsisten melaksanakan silabus dan RPP (SMP Muhammadiyah Saptosari),
7. Sebanyak 70% guru lengkap memiliki silabus dan RPP

(SMP Muhammadiyah 1 Tepus),

8. Semua guru membuat administrasi (SMP Margaluhur Karangmojo),
9. Guru menggunakan silabus dan RPP sesuai ketentuan (SMPN 1 Wonosari).

Sementara itu, untuk kesesuaian buku yang disediakan Pemerintah dengan kurikulum pada sebagian besar sekolah sampel mengatakan sesuai, sedangkan untuk SMPN 1 Gedangsari hanya kelas 7 dan 8 yang menggunakan K13, dan kelas 9 masih menggunakan KTSP tahun 2006. Selain itu, SMPN 5 Panggang telah 100 persen menyampaikan materi pembelajaran dari K13 namun hasil belum maksimal karena terkendala waktu yang kurang dan adanya siswa-siswa dengan kondisi lambat belajar.

Terkait tentang kontribusi kurikulum terhadap pencapaian UN, sebagian besar sekolah sampel mengatakan sangat berkontribusi. Namun, untuk SMPN 5 Panggang dan SMP Muhammadiyah 1 Tepus merasa masih belum dapat memperoleh hasil yang maksimal karena kurangnya waktu pembelajaran yang disebabkan banyak siswa dengan kondisi lambat belajar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum yang dihadapi sekolah sampel adalah:

1. Keterbatasan sarpras yang dimiliki sekolah (SMP Muhammadiyah Wonosari).
2. RPP yang standar belum ada dan sering berubah (SMPN 1 Gedangsari).
3. Sarpras pendukung PBM masih kurang terutama buku pendukung (SMPN 1 Karangmojo).

4. Kuantitas buku kurang karena rusak, belum memiliki LCD proyektor, dan komputer (SMP Muhammadiyah Saptosari).
5. Kurangnya disiplin guru (SMP Muhammadiyah 1 Tepus).
6. Ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (SMP Margaluhur Karangmojo),
7. Kalender Pendidikan sebagai acuan pelaksanaan kurikulum belum ada sebelum awal tahun pelajaran (SMPN 1 Wonosari).

b. Standar Proses

Berhasil tidaknya proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut. Hal tersebut meliputi ruangan, alat peraga, dan pemanfaatan buku yang disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, perlu dilihat bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru baik pelaksanaan tatap muka, pemberian dan pemeriksaan PR, serta kegiatan remedial, maupun pelaksanaan *Project Based Learning* (PBL).

Dalam hal penggunaan sarana berupa ruangan dan alat peraga, sebagian besar sekolah sampel telah memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki. Namun, karena tidak semua sekolah sampel memiliki sarana ruangan dan alat peraga yang cukup maka pelaksanaan standar proses tidak dapat maksimal. Sebagai contoh, untuk SMP Muhammadiyah Wonosari masih kekurangan ruangan, sedangkan untuk SMP Muhammadiyah 1 Tepus

masih kekurangan alat peraga IPA.

Dalam hal pemanfaatan buku yang disediakan oleh Pemerintah, semua sekolah mengatakan bahwa buku-buku tersebut sudah sesuai dengan K-13.

Sementara itu, dalam hal pemberian dan pemeriksaan PR serta remedial, guru sudah melaksanakan dengan baik dan memadai, yaitu guru sudah melaksanakan kegiatan remedial dan penugasan PR secara rutin dengan terstruktur dan tidak terstruktur serta mengoreksinya.

Dalam hal pelaksanaan PBL sebagian besar sekolah sampel belum melaksanakannya. Sementara itu, untuk sekolah yang sudah melaksanakan kondisinya bervariasi, yaitu (1) SMPN 1 Karangmojo, guru mengimplementasikan PBL dengan cara siswa diberi tugas menyelesaikan permasalahan dan mempersentasikannya; (2) SMP Margaluhur Karangmojo, belum semua mata pelajaran melaksanakannya; (3) SMPN 1 Wonosari melaksanakan pemberian tugas dan remisi; dan (4) SMP Muhammadiyah Wonosari sebagian besar guru belum melaksanakan PBL.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan, hal-hal yang dilakukan sekolah adalah:

1. memfasilitasi siswa dengan berbagai ekstrakurikuler; memfasilitasi siswa untuk berkompetisi dengan sekolah lain; memfasilitasi siswa mengamalkan ibadah dengan baik (SMP Muhammadiyah Wonosari).
2. SKL adalah target capaian dan menjadi arahan maka perlu ada arahan yang jelas (SMPN 3 Gedangsari).
3. Implementasi berupa peningkatan nilai UN dengan

berbagai cara, memberi motivasi, mengadakan tambahan/les, mengupayakan tes diagnostik kerja sama dengan lembaga swasta, membentuk kelas homogen berdasarkan nilai PPU (SMPN 1 Gedangsari).

4. Ada kegiatan yang tidak dapat dilakukan karena biaya transpor tidak mencukupi, seperti dalam hal lomba pertandingan (SMPN 5 Panggang).
5. Berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi siswa baik melalui tenaga pendidik dan siswa sendiri (SMPN 1 Karangmojo).
6. Mengoptimalkan ekstra unggulan olahraga dan seni; pengayaan materi; melakukan *try out*; dan penambahan jam pada mapel UN guna mengoptimalkan potensi anak/peserta didik (SMP Muhammadiyah Saptosari).
7. Selalu berusaha melayani siswa melalui 8 standar pendidikan (SMP Muhammadiyah 1 Tepus).
8. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni budaya, *try out*, pendalaman materi, dan melatih menulis karya ilmiah (SMP Margaluhur Karangmojo).
9. Sekolah telah melaksanakan SKL sesuai (SMPN 1 Wonosari).

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Implementasi standar PTK meliputi kemampuan guru dalam mentransfer ilmu, membuat siswa aktif belajar, kreatif dan berkarakter di sekolah sampel, adalah

1. Sebagian besar guru sudah kompeten dalam pembelajaran dengan memiliki komitmen tinggi; membiasakan warga sekolah dengan 5S dalam

- kehidupan sehari-hari (SMP Muhammadiyah Wonosari).
2. Kalangan cukup sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal (SMPN 3 Gedangsari).
 3. Semua guru sudah bersertifikat, menerima tunjangan sertifikasi, sehingga secara kualitas sudah memadai, namun perlu dilihat bagaimana karakter guru secara personal maupun sosial. Nilai maksimal pada guru/pendidik bila bekerja/mendidik anak dengan hati (SMPN 1 Gedangsari).
 4. Guru mendesain pembelajaran aktif belajar (SMPN 5 Panggang).
 5. Guru melaksanakan PBM baik di kelas maupun di luar kelas, siswa diberi tugas untuk mengamati lingkungan sekitar, berdiskusi, praktik di laboratorium, membuat persentasi dan mempersentasikan hasilnya di depan kelas (SMPN 1 Karangmojo).
 6. Masih perlu peningkatan dari berbagai *workshop*, pemberian contoh dan pendampingan (SMP Muhammadiyah Saptosari).
 7. Standar pendidik masih perlu ditingkatkan (SMP Muhammadiyah 1 Tepus).
 8. Masih perlu peningkatan kemampuan guru mengolah kelas, melatih siswa menjadi kreatif dan menjadikan anak-anak berbudi pekerti baik (SMP Margaluhur Karangmojo).
 9. Sebagian besar guru telah menunjukkan kemampuan mereka dalam mentransfer ilmu, membuat siswa aktif belajar, kreatif dan berkarakter (SMPN 1 Wonosari).

e. Standar Sarana Prasarana

Implementasi standar sarana dan prasarana meliputi berbagai jenis dan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran.

1. Tenaga pendidik memanfaatkan sarpras dengan baik, namun sarpras yang dimiliki sangat terbatas hanya mengandalkan dana dan bantuan dari sekolah (SMP Muhammadiyah Wonosari).
2. Standar sarpras sangat penting karena PBM tidak akan berjalan dengan baik apabila sarpras tidak lengkap (SMPN 3 Gedangsari).
3. Standar sarpras belum memadai karena kurang lapangan olahraga dan alat olahraga, misalnya bola volley, basket, dan futsal kurang sarana fasilitas kamar mandi/toilet karena jumlah kamar kecil tidak sebanding dengan jumlah siswa (SMPN 1 Gedangsari).
4. Ruang kelas hanya ada 3 sudah dimanfaatkan, laboratorium belum dimaksimalkan, belum ada laboratorium informasi dan teknologi, perpustakaan, ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, dan ruang komputer ada di satu ruang berukuran 10x12m persegi digabung hanya dibatasi dengan triplek, tenaga pendidik memanfaatkan sarpras dengan maksimal, siswa memanfaatkan sarpras dengan baik, tetapi buku-buku pendukung PBM masih sangat terbatas (SMPN 5 Panggang).
5. Tenaga pendidik memanfaatkan sarpras dengan maksimal, siswa memanfaatkan sarpras dengan baik,

tetapi buku-buku pendukung PBM masih sangat terbatas (SMPN 1 Karangmojo).

6. Pemanfaatan sarpras yang dimiliki secara optimal, berusaha untuk meningkatkan kualitas dengan pemeliharaan serta peningkatan kuantitas dengan mengusulkan bantuan dari pemerintah/pihak lain (SMP Muhammadiyah Saptosari).
7. Standar sarpras yang perlu ditingkatkan adalah alat-alat praktik IPA, server dan tower (SMP Muhammadiyah 1 Tepus).
8. Mengoptimalkan penggunaan peralatan penunjang KBM, merencanakan rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan evaluasi kerja setiap tahun (SMP Margaluhur Karangmojo).
9. RKB terlah terpenuhi, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang laboratorium telah memenuhi syarat (SMPN 1 Wonosari).

f. Standar Pengelolaan

Trend baru dalam pengelolaan sekolah adalah bahwa orang tua umumnya berani membayar mahal jika sekolah melakukan pengelolaan manajemen dengan baik. Pada dasarnya biaya sekolah mahal di sekolah unggulan tidak menjadi masalah bagi orang tua yang memahami pendidikan. Mereka berani membayar mahal, asalkan sekolah memberikan layanan dan proses pendidikan yang berkualitas. Hal ini terjadi di SMPN 3 Gedangsari yang berusaha meningkatkan pengelolaan sekolahnya dengan baik.

1. sekolah berusaha untuk mengelola semua standar namun ada beberapa kendala utamanya pada standar

- sarpras, standar PTK, standar pembiayaan, dan standar penilaian (SMP Muhammadiyah Wonosari).
2. standar pengelolaan sangat penting karena untuk mengelola sebuah sekolah dari standar-standar yang lain (SMPN 3 Gedangsari).
 3. standar pengelolaan menjadi penting karena hanya dengan manajemen yang benar semua unsur dalam lingkungan dapat berjalan kondusif (SMPN 1 Gedangsari).
 4. pengelolaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan (SMPN 5 Panggang).
 5. standar pengelolaan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan standar yang lain (SMPN 1 Karangmojo).
 6. mengoptimalkan supervisi akademik dan supervisi ketenagaan dari 13 tenaga terdiri 1 PNS, ditambah dengan 11 GTT dan PTT (84,26%) pendayagunaan PTK yang dimiliki, melakukan monitoring evaluasi dari program dan pelaksanaan program (SMP Muhammadiyah Saptosari).
 7. implementasi standar pengelolaan memang harus masih diperbaiki terutama bagian pengolahan tindak (SMP Muhammadiyah 1 Tepus).
 8. membuat rencana kerja yang baik; rencana dilaksanakan yang sebaik-baiknya; pemanfaatan dan supervisi dari pelaksanaan kerja; melakukan evaluasi hasil kerja (SMP Margaluhur Karangmojo).
 9. pengelolaan dari masing-masing standar sudah dapat dilaksanakan dengan baik; terkadang ada tumpang

tindih pelaksanaan dalam standar pengelolaan (SMPN 1 Wonosari).

g. Standar Pembiayaan

Dalam melaksanakan standar pengelolaan, upaya yang dilakukan sekolah sampel adalah sebagai berikut;

1. mengelola dana yang ada (BOS), sekolah kesulitan menggali dana dari sumber lain seperti dari orang tua karena sumber ekonomi orang tua siswa yang terbatas (SMP Muhammadiyah Wonosari),
2. semua kegiatan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya biaya maka sekolah menjadi pasif (SMPN 3 Gedangsari),
3. standar pembiayaan sangat berpengaruh karena ada hubungan dengan kelancaran pembayaran/ pembiayaan yang benar maka segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah dapat berjalan dengan lancar (SMPN 1 Gedangsari),
4. pembiayaan hanya dari bos tahun 2016, banyak kegiatan yang tidak dapat di biyai dari bos, honor PTT hanya Rp.33.300/bulan, dana dari APBD pada tahun 2017 tidak ada belanja modal (pengadaan aset inventaris) padahal sangat membutuhkan komputer (SMPN 5 Panggang),
5. dana dikelola dengan baik tetapi sumber dana masih kurang untuk mencukupi kebutuhan kegiatan sekolah karena untuk pembiayaan sarpras, permasalahannya instrumen penilaian terlalu banyak (SMPN 1 Karangmojo),

6. mengoptimalkan dana dari pemerintah (BOS), berusaha menggali dana dari masyarakat, dan banyak teralokasi untuk membayar honor PTT dan GTY sebesar 50% sehingga dana untuk peningkatan mutu kurang (SMP Muhammadiyah Saptosari),
7. standar pengolahan pembiayaan yang dari BOS dapat digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan tambahan dengan kerja sama pihak komite (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
8. mengoptimalkan dana BOS untuk kegiatan sekolah; menggali dana dari luar (wali murid) donatur dsb; dana Bos sebagian untuk honor guru sehingga dana untuk oprasional kurang (SMP Margaluhur Karangmojo),
9. sumber dana dari dana BOS, dana APBD dan sumbangan orang tua/wali murid serta *blockgrant*; sumber dana yang ada belum dapat mencukupi untuk kegiatan di sekolahnya (SMPN 1 Wonosari).

h. Standar Penilaian

Dalam melaksanakan standar penilaian, upaya yang dilakukan sekolah sampel adalah sebagai berikut;

1. setiap guru sudah melakukan penilaian dengan baik, sekolah melaksanakan penilaian melalui ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian kenaikan kelas (UKK) dan ujian; namun belum semua guru melakukan analisis penilaian dengan baik (SMP Muhammadiyah Wonosari),
2. penilaian adalah sebagai ukuran ketercapaian program (SMPN 3 Gedangsari),

3. implementasi standar penilaian memotret cara dan teknik guru dalam mengelola penilaian pada siswa harus sesuai aturan ketika aturan itu benar benar dilakukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah/kelas maka hal itu akan berdampak pada cara penilaian, proses hingga hasilnya akan baik pula (SMPN 1 Gedangsari),
4. standar penilaian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Kendala di tahun 2017 aplikasi penilaian belum dapat membuat sendiri K-2013 (SMPN 5 Panggang),
5. pelaksanaan penilaian harian dilaksanakan oleh guru dan juga penilaian tengah semester serta penilaian akhir semester (SMPN 1 Karangmojo),
6. efektifkan semua jenis penilaian baik ulangan harian, UTS, PAS, PAT; Meningkatkan kemampuan guru untuk membuat/menyusun soal dengan mengikuti MGMP (SMP Muhammadiyah Saptosari),
7. standar penilaian yang perlu ditingkatkan adalah penyusunan kisi-kisi dan analisis hasil ulangan (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
8. peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan kisi-kisi, pembuatan soal yang baik, dan pedoman penilaian yang benar (SMP Margaluhur Karangmojo),
9. standar penilaian sudah dilaksanakan sesuai prosedur; ada beberapa proses penilaian yang belum dilaksanakan dengan baik, misalnya penilaian sikap. (SMPN 1 Wonosari),

- f. Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/ Mempertahankan Status Akreditasi

Pihak yang membantu sekolah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain. Berdasarkan informasi dari sekolah sampel, berbagai bantuan yang telah diberikan adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Pusat
 - a. Bantuan dana operasional pendidikan ke sekolah diberikan dalam bentuk BOS (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, SMPN 3 Gedangsari, SMPN 1 Karang Mojo),
 - b. Rehabilitasi ruang kelas, bantuan alat laboratorium (SMP Muhammadiyah Saptosari),
 - c. Sekolah Rujukan (SMPN 1 Wonosari).
2. Dinas Pendidikan
 - a. DAK dalam bentuk pembangunan sarpras (SMPN 3 Gedangsari, SMP Muhammadiyah Saptosari, SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
 - b. Pendampingan siap akreditasi (SMPN 5 Panggang),
 - c. DPA, dalam bentuk dana (SMPN 1 Karang Mojo),
 - d. Pembangunan sarana prasarana/RKB (SMPN 1 Wonosari).
3. Lainnya
 - a. Bantuan lain yang diperoleh sekolah adalah dalam bentuk dana (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari), pembangunan sarana prasarana (SMPN 3 Wonosari), pengadaan toilet (SMPN 5 Panggang), pengadaan 15 unit komputer (SMP

Muhamadiyah 1 Tepus), pengadaan barang (SMPN 1 Karangmojo), pembangunan gedung, pengadaan alat laboratorium, dana untuk les, dan *try out* (SMP Margaluhur Karangmojo),

- b. Bantuan yang masih diperlukan,
- c. Dari semua kebutuhan sekolah, bantuan yang masih diperlukan pada umumnya adalah bantuan sarana prasarana, seperti bantuan gedung (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari), bantuan komputer untuk UNBK (SMPN 3 Gedangsari), bantuan penambahan bantuan guru, sarpras fisik terutama lapangan olahraga juga buku perpustakaan (SMPN 1 Gedangsari), perpustakaan, laboratorium teknologi informasi (SMPN 5 Panggang), dan pembangunan RKB(SMPN 1 Wonosari).

g. Kendala yang Dihadapi dan Usaha Sekolah dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi

Dalam upaya memperoleh nilai UN tinggi yang dilakukan sekolah, tidak sedikit kendala yang dihadapi sekolah sehingga sekolah harus bekerja lebih keras untuk mencapai nilai UN tinggi.

Adapun kendala yang dihadapi sekolah dalam usaha memperoleh nilai UN tinggi baik dari sisi siswa, guru, maupun sarana prasarana, adalah sebagai berikut;

- 1. Dari sisi siswa
 - a. Input siswa rendah/motivasi kurang (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari),
 - b. Input siswa mudah dukungan orang tua kurang,

- lingkungan kurang kompetitif (SMPN 3 Gedangsari),
 - c. Input nilai dari siswa baru yang rendah, motivasi belajar rendah, dukungan orang tua kurang (SMPN 1 Gedangsari),
 - d. Minat belajar rendah, input rendah (SMPN 5 Panggang),
 - e. Input siswa masih banyak yang rendah (SMPN 1 Karang Mojo),
 - f. Motivasi belajar siswa rendah (SMP Muhammadiyah Saptosari),
 - g. Siswa dari tamatan SD yang masih punya NEM Rendah (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
 - h. Input siswa yang sangat rendah (SMP Margaluhur Karangmojo),
 - i. Sebagian kecil siswa tidak serius mengikuti les UN (SMPN 1 Wonosari).
2. Dari sisi Guru
- a. Metode/strategi pembelajaran belum tepat (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari)
 - b. Kurang disiplin (SMPN 3 Gedangsari),
 - c. Banyak guru yang jarak rumahnya dengan sekolah cukup jauh (SMPN 1 Gedangsari),
 - d. Penyampaian metode dan strategi pembelajaran masih kurang (SMPN 1 Karang Mojo),
 - e. Kompetensi guru belum optimal dan dedikasi guru belum maksimal (SMP Muhammadiyah Saptosari),

- f. Disiplin guru yang masih rendah mengajar di sekolah (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
 - g. Sebanyak 50% kondisi guru di sekolah adalah honorer (SMP Margaluhur Karangmojo), sebagian kecil guru tidak memberikan les sesuai jadwal (SMPN 1 Wonosari).
3. Dari sisi Sarana Prasarana
- a. Sebagian besar belum terpenuhi utamanya dari segi fisik (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari),
 - b. Laboratorium bahasa belum ada peralatannya, jumlah komputer masih kurang (SMPN 3 Gedangsari),
 - c. Tidak ada lapangan olahraga, kurang prasarana kamar kecil (toilet) (SMPN 1 Gedangsari),
 - d. Tidak adanya perpustakaan, laboratorium infomasi teknologi (SMPN 5 Panggang),
 - e. Keterbatasan sarpras (SMPN 1 Karang Mojo),
 - f. Sarpras masih kurang baik kualitas dan kuantitasnya (SMP Muhammadiyah Saptosari),
 - g. Minimnya alat laboratorium IPA (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
 - h. Sarpras di sekolah kurang memadai (SMP Margaluhur Karangmojo),
 - i. Sebagian ruang kelas 9 kondisi udaranya panas (SMPN 1 Wonosari),
 - h. Usaha Sekolah dalam Memperoleh Nilai UN yang Tinggi.

Berbagai kendala tersebut mempengaruhi upaya yang dilakukan sekolah dalam memperoleh nilai UN yang tinggi. Upaya yang dilakukan sekolah dalam mencapai UN tinggi tersebut adalah sebagai berikut;

1. mengefektifkan proses belajar mengajar, dan pendampingan siswa (SMP Muhammadiyah 1 Wonosari),
2. penambahan jam (les), ikut *try out*, memiliki buku-buku soal, bimbingan motivasi siswa dan orang tua, bimbingan tutor (SMPN 3 Gedangsari),
3. memberi motivasi pada siswa, pemberian pelajaran tambahan, bedah SKL untuk guru (SMPN 1 Gedangsari),
4. les sore, pemberian motivasi setiap Kamis, Minggu terakhir Jum'at (SMPN 5 Panggang),
5. melakukan les mata pelajaran UN, tutor sebaya, kegiatan cemeti diri, *home visit* (SMPN 1 Karang Mojo),
6. menambah jam mata pelajaran UN; pengayaan materi/les; melakukan *try out* (SMP Muhammadiyah Saptosari),
7. pemetaan siswa, penambahan jam pelajaran (SMP Muhammadiyah 1 Tepus),
8. meningkatkan kualitas guru, les, dan latihan mengerjakan soal-soal (SMP Margaluhur Karangmojo),
9. mengadakan kegiatan pengayaan untuk kelas 7, 8, dan 9 mengadakan kegiatan tutor sebaya, *try out* (SMPN 1 Wonosari).

2. Kabupaten Buleleng

a. Profil Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada Tabel 4.7, jumlah SMP negeri sebesar 54, lebih besar daripada sekolah swasta sebesar 21 sehingga jumlah SMP menjadi 75 sekolah. Dari 75 SMP tersebut, siswa SMP negeri sebesar 30.921 dengan rasio siswa per sekolah sebesar 573 sangat besar jika dibandingkan dengan siswa swasta yang berjumlah 2.688 dengan rasio siswa per sekolah sebesar 128, sehingga jumlah siswa SMP seluruhnya sebesar 33.609 anak dengan rasio siswa per sekolah sebesar 448. Sesuai dengan besarnya sekolah negeri maka jumlah siswa baru di sekolah negeri sebesar 10.227 sangat besar jika dibandingkan dengan di sekolah swasta sebesar 806 sehingga jumlah siswa baru SMP seluruhnya sebesar 11.033. Berdasarkan banyaknya siswa maka jumlah kepala sekolah dan guru SMP Negeri sebesar 1.693 dengan rasio siswa per guru sebesar 18 lebih besar atau lebih padat daripada kepala sekolah dan guru sekolah swasta sebesar 165 dengan rasio siswa per guru sebesar 16 sehingga jumlah negeri dan swasta sebesar 1,858 orang. Jumlah rombongan belajar sekolah negeri sebesar 985 sangat besar jika dibandingkan dengan sekolah swasta sebesar 105 sehingga jumlah rombongan belajar SMP seluruhnya sebesar 1.090.

Tabel 4.7 Profil Pendidikan dan Rasio SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Sekolah	54	21	75
2	Siswa	30.921	2.688	33.609
3	Siswa Baru	10.227	806	11.033
4	KS/Guru	1.693	165	1.858
5	Rombel	985	105	1.090
	Rasio Pendidikan			
6	R-S/Sek	573	128	448
7	R-S/Rombel	31	26	31
8	R-S/G	18	16	18
9	R-Rombel/R.Kelas	1,21	0,88	1,17

Tabel 4.8 Kebutuhan Prasarana Sekolah Kabupaten Buleleng Tahun 2017/2018

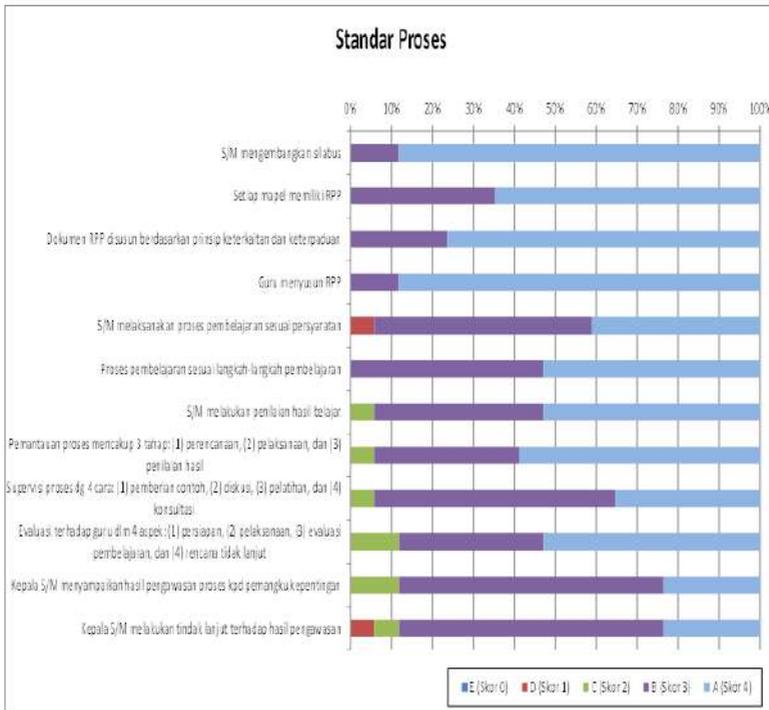
No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Ruang Kelas	814	119	933
2	Laboratorium IPA	49	0	49
3	Perpustakaan	49	15	64
4	Ruang UKS	20	6	26
	Kekurangan atau Kelebihan			
1	Ruang Kelas	-171	14	-157
2	Laboratorium IPA	-5	-21	-26
3	Perpustakaan	-5	-6	-11
4	Ruang UKS	-34	-15	-49

Bila dilihat kebutuhan prasarana yang terdapat pada Tabel 4.8 maka ruang kelas SMP seharusnya sama dengan rombongan belajar yang ada sehingga terjadi kekurangan sebesar 157 ruang kelas dengan rincian SMP Negeri kekurangan 171 ruang kelas dan SMP Swasta kelebihan 14 ruang kelas. Laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS seharusnya sama dengan jumlah sekolah. Artinya, setiap SMP harus memiliki laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS. Berdasarkan persyaratan tersebut maka masih terjadi kekurangan 26 laboratorium dengan rincian SMP Negeri kekurangan sebesar 5 dan SMP Swasta sebesar 21. Demikian juga terjadi kekurangan 11 perpustakaan dengan rincian SMP Negeri kekurangan 5 perpustakaan dan SMP Swasta kekurangan 6 perpustakaan. Hal yang sama terjadi kekurangan 49 ruang UKS dengan rincian SMP Negeri kekurangan 34 ruang UKS dan SMP Swasta kekurangan 15 ruang UKS.

Bila dikaitkan dengan akreditasi yang sebagian besar sekolah mencapai A seharusnya tidak ada kekurangan pada empat jenis prasarana sekolah tersebut. Namun, pada kenyataannya semua prasarana seperti ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan dan ruang UKS masih terjadi kekurangan dengan jumlah yang bervariasi.

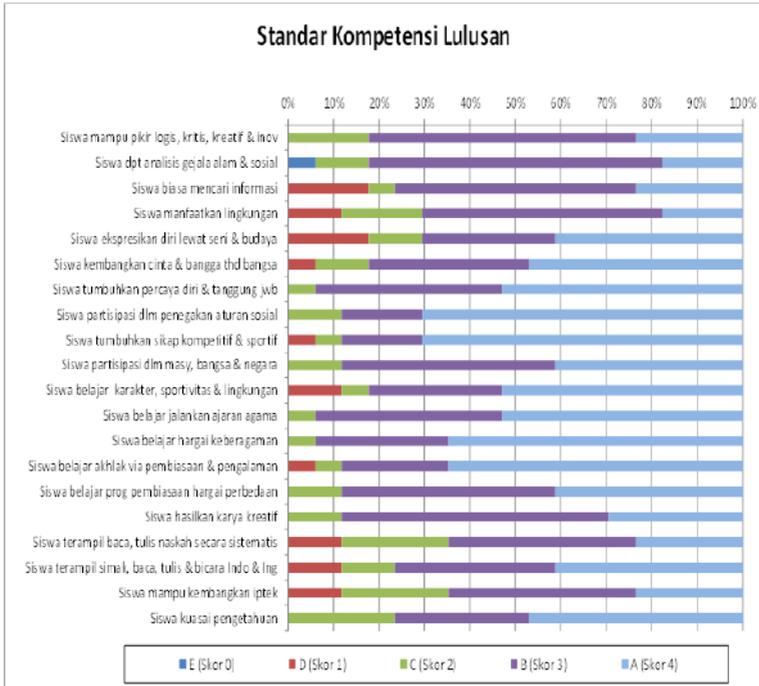
b. Gambaran Pemenuhan SNP dan Pencapaian Nilai UN SMP

Gambaran pemenuhan SNP hanya diambil empat standar yang paling rendah, yaitu standar proses sebesar 86,67, standar kompetensi lulusan sebesar 79,56, standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 77,33, dan standar sarana dan prasarana sebesar 79,64.



Grafik 4.11 Pencapaian Standar Proses Kabupaten Buleleng

Berdasarkan pada Grafik 4.11, standar proses memiliki 12 butir pertanyaan maka ada dua butir pertanyaan yang mendapat skor rendah atau skor 1, yaitu kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses kepada pemangku kepentingan dan sekolah/madrasah melaksanakan proses pembelajaran sesuai persyaratan masing-masing sebesar 5,9% sekolah.

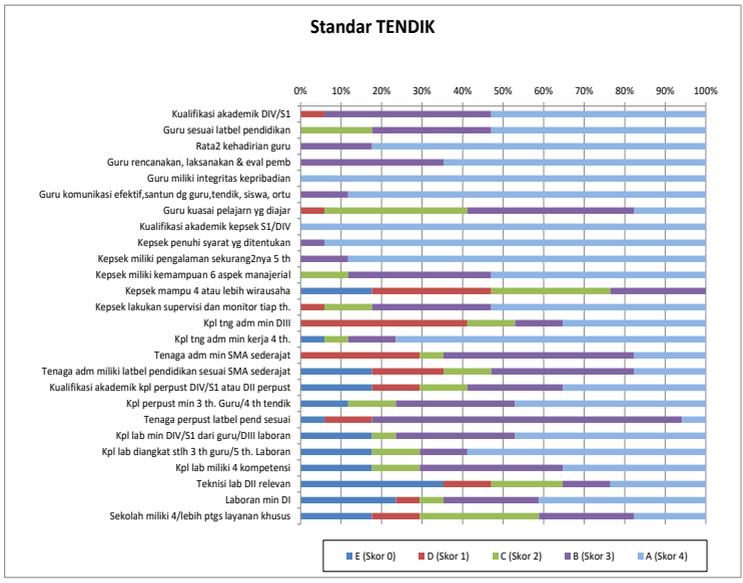


Grafik 4.12 Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan pada Grafik 4.12, standar kompetensi lulusan yang memiliki 20 butir pertanyaan maka ada satu pertanyaan yang mendapat skor terendah atau 0, yaitu siswa dapat analisis gejala alam dan sosial dari satu sekolah (5,5%). Terdapat 10 butir pertanyaan yang mendapat skor rendah atau 1.

Terdapat dua pertanyaan tentang siswa ekspresikan diri lewat seni dan budaya dan siswa biasa mencari informasi diperoleh skor rendah dari 3 sekolah (17,6%). Terdapat 5 butir pertanyaan

tentang 1) siswa mampu kembangkan iptek, 2) siswa terampil simak, baca, tulis, dan bicara Indonesia dan Inggris, 3) siswa terampil baca, tulis naskah secara sistematis, 4) siswa belajar karakter, sportivitas, dan lingkungan, serta 5) siswa memanfaatkan lingkungan dari 2 sekolah (11,8%). Terdapat 3 butir pertanyaan tentang siswa belajar ahlak via pembiasaan dan pengalaman, siswa tumbuhkan sikap kompetitif dan sportif, dan siswa kembangkan cinta dan bangga terhadap bangsa dari 1 sekolah (5,5%).



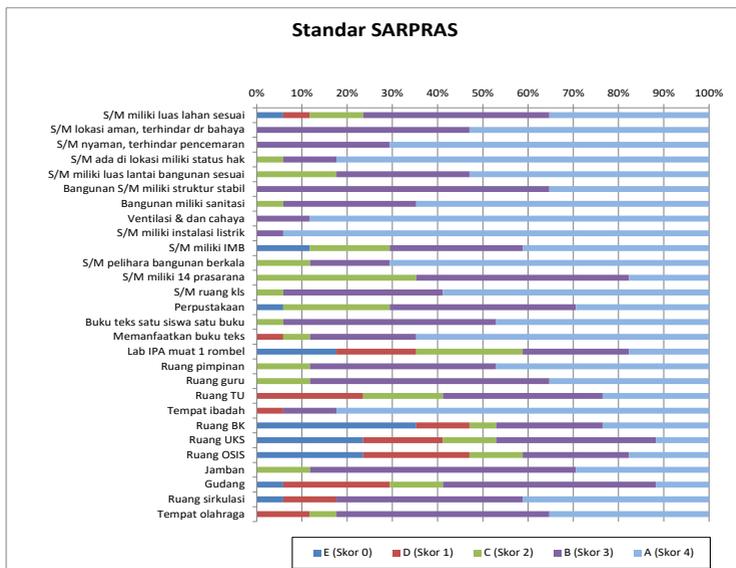
Grafik 4.13. Pencapaian Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan pada Grafik 4.13, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 26 butir pertanyaan maka ada

12 pertanyaan yang mendapat skor terendah atau 0. Terdapat 1 butir pertanyaan tentang teknisi laboratorium diploma 2 yang relevan dari 6 sekolah (35,3%).

Terdapat 1 butir pertanyaan tentang laboratorium minimal diploma 1 dari 4 sekolah (23,5%). Terdapat 7 butir pertanyaan, yaitu 1) sekolah memiliki 4 dan lebih petugas layanan khusus, 2) kepala laboran memiliki 4 kompetensi, 3) kepala laboran diangkat setelah 3 tahun dari guru/5 tahun laboran, 4) kepala laboran minimal diploma 4/S1 dari guru atau diploma 3 laboran, 5) kualifikasi akademik kepala perpustakaan diploma 4/S1 atau diploma 2 perpustakaan, 6) tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai SMA sederajat, dan 7) kepala sekolah mampu empat atau lebih wirausaha dari 3 sekolah (17,6%). Terdapat 1 butir pertanyaan tentang kepala perpustakaan minimal 3 tahun dari guru atau 4 tahun dari tenaga kependidikan dari 2 sekolah (11,8%). Terdapat dua butir pertanyaan, yaitu tenaga perpustakaan mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan kepala tenaga administrasi minimal kerja 4 tahun dari 1 sekolah (5,9%).

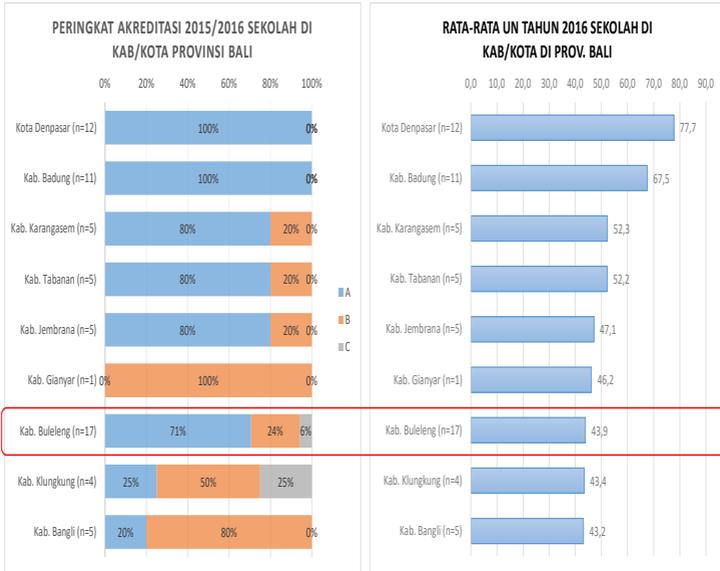
Berdasarkan pada Grafik 4.14, standar sarana dan prasarana yang memiliki 28 butir pertanyaan maka ada 9 pertanyaan yang mendapat skor terendah atau 0. Terdapat 1 butir pertanyaan tentang ruang BK dari 6 sekolah (35,3%).



Grafik 4.14 Pencapaian Standar Kompetensi Sarana dan Prasarana Di Kabupaten Buleleng

Terdapat 2 butir pertanyaan tentang ruang OSIS dan ruang UKS dari 4 sekolah (23,5%). Terdapat 1 butir pertanyaan tentang laboratorium IPA muat untuk satu rombel dari 3 sekolah (17,6%). Terdapat 1 butir pertanyaan tentang sekolah/madrasah memiliki IMB dari 2 sekolah (11,8%). Terdapat 4 butir pertanyaan, yaitu ruang sirkulasi, gudang, perpustakaan, dan luas lahan sesuai dari 1 sekolah (5,8%) .

Kabupaten Buleleng



Grafik 4.15 Peringkat Akreditasi 2015/2016 dan Rata-rata UN 2016

Berdasarkan Grafik 4.15, maka peringkat akreditasi di Kabupaten Buleleng dengan jumlah sekolah 17 adalah 71% akreditasi A, 24% akreditasi B, dan 6% akreditasi C. Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali maka Kabupaten Buleleng termasuk peringkat keenam. Namun, dilihat dari rata-rata UN maka nilai UN Kabupaten Buleleng sebesar 43,9 termasuk peringkat ketujuh dari 9 kabupaten/kota yang ada.

c. Implementasi SNP dan Pengertian Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali

Nama sekolah, nilai UN dan hasil akreditasi (kabupaten/kota) sekolah yang menjadi sampel dalam kajian ini ada sembilan, yaitu SMPN 1 Singaraja dengan nilai UN tinggi sebesar 76,18 dan akreditasi A; SMP Laboratorium Undiksa dengan nilai UN agak rendah sebesar 58,98 dan akreditasi A; SMPN Satu Atap 1 Gerokgak dengan nilai UN rendah sebesar 39,86 dan akreditasi A; SMPN 3 Sukasada dengan nilai UN rendah sebesar 50,89 dan akreditasi A; SMPN 5 Singaraja dengan nilai UN rendah sebesar 50,35 dan akreditasi A; SMPN 1 Tejakula dengan nilai UN rendah sebesar 51,48 dan akreditasi A; SMP Saraswasti Singaraja dengan nilai UN rendah sebesar 46,59 dan akreditasi A; SMP Katolik Santo Paulus Singaraja dengan nilai UN rendah sebesar 54,58 dan akreditasi A; SMP PGRI Seririt dengan nilai UN rendah sebesar 36,71 dan akreditasi A.

Tabel 4.9. Profil Sekolah Sasaran Kabupaten Buleleng

No.	Nama Sekolah	Data			Rasio Pendidikan			Status Akreditasi	Nilai UN
		Siswa	Guru	Rombel	R-S/G	R-S/Rombel	R-Rombel/RK		
1	SMPN 1 SINGARAJA	815	53	27	15,38	30,19	1,00	A	76,18
2	SMP LABORATORIUM	390	26	13	15,00	30,00	1,00	A	58,98
3	SMP KATOLIK SANTO PAULUS SINGARAJA	111	10	5	11,10	22,20	0,83	A	54,58
4	SMPN 1 TEJAKULA	690	27	21	25,56	32,86	0,95	A	51,48
5	SMPN 3 SUKASADA	373	22	12	16,95	31,08	1,20	A	50,89
6	SMPN 5 SINGARAJA	1.057	58	35	18,22	30,20	0,97	A	50,35
7	SMP SARASWATI	108	9	8	12,00	13,50	1,00	A	46,59
8	SMP NEGERI SATU	112	12	4	9,33	28,00	0,44	A	39,86
9	SMP PGRI SERIRIT	82	3	3	27,33	27,33	0,43	A	36,71

d. Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi

1. Standar Isi

- a. Dari 9 SMP di Kabupaten Buleleng maka hanya satu sekolah, yaitu SMP Katolik St. Paulus Singaraja menggunakan kurikulum 2006, lainnya menggunakan kurikulum 2013,
- b. Kurikulum dilaksanakan oleh guru dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, sudah sesuai dengan silabus dan RPP, membuat perangkat mengajar sesuai dengan silabus dan RPP, semua guru menggunakan dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan kurikulum 2013,
- c. Buku yang disediakan pemerintah sesuai dengan kurikulum dijawab oleh tujuh sekolah, satu sekolah menyatakan sesuai tetapi mencarinya susah dan satu sekolah tidak menjawab,
- d. Kontribusi terhadap pencapaian UN dijawab oleh lima sekolah cukup memadai, dua sekolah telah tercapai, satu sekolah terlaksana dengan baik, dan satu sekolah menyatakan soal UN diambil dari KTSP.

2. Standar Proses

- a. Penggunaan prasarana dijawab oleh delapan sekolah yang berbeda, yaitu ruangan kurang sehingga sekolah *double shift*, penggunaan belum

maksimal, sesuai dengan fungsi masing-masing, guru menggunakan alat peraga, prasarana terpakai dengan baik, sudah memadai, disesuaikan dengan keperluan dan petunjuk teknis, kurang/belum memiliki multimedia dan satu sekolah tidak menjawab.

- b. Buku yang disediakan pemerintah dijawab oleh tujuh sekolah, yaitu buku telah sesuai sebanyak lima sekolah, sesuai KTSP sebanyak dua sekolah dan dua sekolah tidak menjawab.
- c. Pemberian dan pemeriksaan pekerjaan rumah (PR) dan remedial dijawab oleh delapan sekolah, yaitu sudah dilaksanakan oleh tujuh sekolah, belum dilaksanakan oleh satu sekolah, dan satu sekolah tidak menjawab.
- d. Pelaksanaan *Project Based Learning* dijawab oleh tujuh sekolah, yaitu sudah dilaksanakan dijawab oleh dua sekolah, sebagian guru telah melaksanakan dijawab oleh empat sekolah, belum melaksanakan di satu sekolah, dan dua sekolah tidak menjawab.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban bervariasi, yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan; tambahan les dan yang belum memenuhi syarat kelulusan, bimbingan belajar dan pendampingan bagi yang lemah, analisis yang akan dan sesuai dengan kisi-kisi UN, siswa mampu berkompetisi di jenjang lebih tinggi dan masyarakat,

pembelajaran tambahan, kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan karakteristik melalui pembiasaan, kegiatan lomba-lomba, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, mengikuti lomba-lomba akademik maupun nonakademik; dan sebagian siswa diterima di sekolah favorit.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban bervariasi, yaitu sebagian guru mampu mentransfer ilmu dengan beberapa strategi/metode pembelajaran, guru diharapkan mampu memberi pembelajaran sesuai RPP dan menguasai materi yang akan diterapkan, guru sudah cukup tetapi siswa kurang konsentrasi dan komitmen untuk lebih bertanggung jawab dalam proses KBM dan bimbingan belajar diwajibkan sejak kelas 8 untuk 6 bidang studi (matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKn), sebagian guru melaksanakan pembelajaran inovatif, guru diharapkan selalu berinovasi dalam menumbuhkan kreativitas siswa untuk belajar, guru mampu mentransfer ilmu dengan baik, diadakan pelatihan workshop bagi guru untuk meningkatkan kapasitasnya melalui Yayasan sekolah, Dinas Pendidikan, maupun MGMP, guru berusaha tampil kreatif dan berkarakter sehingga pembelajaran bermanfaat dan menyenangkan, dan guru yang S2 mampu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan berkarakter.

5. Standar Sarana Prasarana

dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu menjaga dan merawat prasarana yang ada, melengkapi yang belum ada dari anggaran BOS, penggunaan prasarana belum maksimal karena minimnya prasarana pada praktik penggunaan komputer, sarana dan prasarana cukup lengkap tetapi gedung sekolah perlu rehabilitasi, standar sarana prasarana menuju SNP, baik gedung/RKB, laboratorium, perpustakaan, WC guru/siswa, alat belajar dan buku, namun perpustakaan belum finishing, komputer siswa dan pagar sekolah belum ada, sarana pembelajaran cukup namun siswa belum memanfaatkan dengan maksimal, mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari dana BOS dan pemanfaatannya, sarana dan prasarana cukup memadai dan sesuai standar nasional pendidikan, prasarana seperti gedung/ruang belajar belum sesuai dengan rombongan belajar, sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat yang belum laboratorium dan multimedia untuk persiapan UN mandiri.

6. Standar Pengelolaan

dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu pelaksanaan diawali dengan menyusun perencanaan dari visi, misi, dan tujuan rencana kerja, sekolah dikelola oleh yayasan dan selalu melaksanakan kerja sama dengan yayasan, pengelolaan bersinergi antara yayasan dengan pendidik dan tenaga kependidikan, namun kemampuan guru tinggi tetapi komitmen kurang, pengelolaan kurikulum,

supervisi akademik, sarana prasarana, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan, meningkatkan kinerja guru dengan menyelesaikan tugas administrasi yang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, dibentuk tim yang kompeten dalam melakukan perencanaan sekolah, pelaksanaan program, dan evaluasi program; mengelola sekolah dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, namun belum mengoptimalkan peran orang tua hanya sebatas pendanaan, pengelolaan kurikulum, satuan pendidikan, pembiayaan, dan supervisi masih perlu ditingkatkan, dan sudah terlaksana dengan baik.

7. Standar Pembiayaan

dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu pelaksanaan standar pembiayaan dalam RKAS dan beberapa program tidak terlaksana, sumber dana pembiayaan dari BOS yang digunakan belum mencukupi karena untuk honor nonguru dan KBM, pengelolaan keuangan berdasarkan partisipasi masyarakat sesuai kemampuan, bantuan dari pemerintah, permasalahannya latar belakang siswa mayoritas dari panti asuhan, pembiayaan hanya dari BOS, jumlah siswa sedikit ketat penggunaannya, kontribusi lain belum ada dan RKAS menyesuaikan dengan 8 standar, dana BOS diupayakan optimal pemanfaatannya, menyusun rencana anggaran dengan mempertimbangkan penerimaan dan pengeluaran sesuai skala prioritas, pembiayaan digunakan secara baik karena sumber pembiayaan terbatas, sumber pembiayaan dari BOS sehingga perlu menyesuaikan

keperluan sekolah, pembiayaan dari BOS tidak mencukupi karena lomba diikuti tidak hanya tingkat regional melainkan juga nasional dan internasional.

8. Standar Penilaian

dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu dilakukan berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan kenaikan kelas, masalahnya KKM yang sudah ditentukan maka penilaian akhir harus menggunakan nilai standar KKM, belum mencapai nilai maksimal karena motivasi belajar siswa rendah dampak dari ketidakharmonisan keluarga, pendidik berusaha mendampingi siswa dengan memberi nilai sesuai dengan hasil karena kemampuan siswa di bawah rata-rata, penilaian dilakukan dengan tes dan nontes, tes adalah ulangan, ujian, belum mencantumkan kisi-kisi, nontes adalah observasi dan wawancara, penilaian dilakukan berdasarkan kurikulum yang ada terhadap guru dan siswa, penilaian secara afektif, kognitif, dan psikomotor, masalah pada rapor untuk K13, standar penilaian sudah baik, masalah di UNBK guru masih perlu pelatihan menggunakan standar yang tepat.

e. Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/ Mempertahankan Status Akreditasi

Untuk meningkatkan/mempertahankan status akreditasi dijawab oleh tujuh sekolah yang terbesar adalah dari pemerintah pusat seperti BOS sebanyak empat sekolah, DAK sebanyak tiga sekolah, BSM sebanyak dua sekolah,

dan KIP sebanyak satu sekolah; bantuan dari Dinas Pendidikan dijawab oleh tiga sekolah berupa pengawas, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga pendidik.

f. Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi;

1. Siswa, berdasarkan jawaban dari 9 sekolah maka kurangnya motivasi menjadi alasan yang paling tinggi yang dijawab oleh empat sekolah, IQ rendah, nilai belum mencapai, input diseleksi, peran orang tua, masalah Bahasa Indonesia.
2. Guru, berdasarkan jawaban dari 9 sekolah maka kurangnya prasarana dan waktu menjadi alasan paling tinggi dijawab oleh dua sekolah, pedagogik dan profesional rendah, kurangnya buku dan prasarana, mengajar dengan baik dan kreatif, kurang kreatif, waktu kurang dan perlu pelatihan, kurang menumbuhkan motivasi, dan lemah memberikan *try out online*.
3. Sarana Prasarana, berdasarkan jawaban dari 9 sekolah maka kurangnya sarana yang memadai menjadi alasan paling tinggi dijawab oleh lima sekolah, kurang buku penunjang dijawab oleh dua sekolah, perlu renovasi gedung, dan sudah memadai.

g. Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah;

1. Dari aspek Siswa, ternyata jawaban dari 9 sekolah sangat bervariasi, yaitu maju di bidang fisik, mental dan spiritual, mampu menyerap semua materi, lemah intelektual mampu menyerap KBM, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap baik, kemampuan akademis, disiplin, sopan, rajin,

jujur, tekun, kreatif, dan aktif, lulusan yang cerdas berintegritas dan adaptif, mampu berprestasi bidang akademis dan nonakademis, dan disiplin, mau belajar dan hormat terhadap guru, teman-teman dan lainnya.

2. Dari aspek Guru ternyata jawaban dari 9 sekolah sangat bervariasi, yaitu kemampuan pedagogik, profesionalisme dan komitmen, mengefektifkan proses KBM, kreatif dan efektif proses KBM, kompetensi dan komitmen tinggi, guru inovatif, disiplin, ramah, kreatif, komitmen, inovatif, memahami kurikulum dengan baik, kreatif, inovatif, kompetensi bagus, tugas baik dan profesional, disiplin, meningkatkan kualitas dan jujur,
3. Dari aspek Sarana Prasarana jawaban dari 8 sekolah sangat bervariasi, yaitu prasarana yang nyaman dari dua sekolah, sarana dan prasarana menunjang KBM, pengembangan akademik siswa, mebel lengkap dan sarana pembelajaran memadai, sesuai SNP, dan lengkap memenuhi syarat.
4. Dari aspek Prestasi jawaban dari sekolah sangat bervariasi, yaitu prestasi akademik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional dijawab oleh dua sekolah; kemampuan intelektual dan akademik memenuhi syarat; prestasi dan nonakademis, guru dan siswa berprestasi; siswa mencapai KBM, berperilaku dan berakhlak mulia dan berorientasi sukses, berprestasi akademik dan nonakademik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional
5. Dari aspek karakter warga sekolah dari sekolah sangat bervariasi, hanya tujuh sekolah yang menjawab, yaitu disiplin dan tanggung jawab yang tinggi; sikap senyum,

salam, dan sapa; bervariasi, disiplin, kekeluargaan, gembira, dan tanggung jawab; komitmen bagus, peran aktif dalam pengembangan sekolah, mematuhi aturan dan tata tertib, warga sekolah yang berintegritas dan adaptif, mau kerja sama dan keinginan maju

h. Usaha Sekolah dalam Memperoleh Nilai UN yang Tinggi

Prestasi akademik, nonakademik, dan persentase jumlah siswa yang diterima di sekolah favorit. Hanya lima sekolah yang menjawab tentang prestasi akademik, yaitu pada olimpiade fisika VIII, XXIII, OSN Matematika 201, olimpiade IPS, olimpiade fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, OSN IPS, OSN Fisika, IPS, dan Matematika. Hanya tujuh sekolah yang menjawab tentang prestasi nonakademik, yaitu taekwondo, lompat jauh putri, lompat tinggi putri, lomba gerak jalan, silat; paduan suara, badminton, basket; FLSN Qory putri dan putra; desain poster FL2SN, desain batik, tarung derajad; FLS2N puisi, perpustakaan, gitar solo; lomba seni lukis; ketangkasan geografi. Hanya lima sekolah yang menjawab siswa yang diterima di sekolah favorit di tahun 2016, yaitu 5 orang, 19 orang, 2 orang, 18 orang, dan 21 orang.

i. Standar nasional pendidikan yang paling mempengaruhi terhadap pencapaian UN

menurut 9 sekolah adalah standar proses di 2 sekolah, SKL di 2 sekolah, standar isi-standar proses-SKL-standar pendidik; standar PTK di 2 sekolah, SI, standar sarpras di 2 sekolah, standar pembiayaan, dan standar penilaian di 2 sekolah.

3. Kota Surabaya

a. Profil Pendidikan Kota Surabaya

Profil pendidikan SMP yang menjadi fokus kajian berkaitan dengan jumlah sekolah, siswa, guru dan prasarana. Secara keseluruhan profil pendidikan SMP di Kota Surabaya seperti dirangkumkan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Profil Pendidikan SMP Kota Surabaya Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Sekolah	61	270	331
2	Siswa	55.864	58.806	114.670
3	Siswa Baru	19.023	18.270	37.293
4	KS/Guru	2.245	3.852	6.097
5	Rombel	1.504	2.097	3.601
	Rasio Pendidikan			
6	R-S/Sek	916	218	346
7	R-S/Rombel	37	28	32
8	R-S/G	25	15	19
9	R-Rombel/R.Kelas	0,99	0,88	0,92

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa baik di SMP negeri maupun swasta, jumlah ruang kelas secara keseluruhan telah mencukupi karena melebihi jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas di SMP swasta

berlebih karena jumlah siswa di sekolah yang kurang favorit menurun, sedangkan jumlah siswa di sekolah negeri menjadi bertambah. Hal ini terlihat terdapat 61 SMP negeri dengan jumlah siswa 55.864, artinya satu SMP negeri menampung 916 siswa, sedangkan SMP swasta terdapat 270 sekolah dengan jumlah siswa 58.806, artinya satu SMP swasta menampung 218 siswa.

Untuk memenuhi SNP masih nampak beberapa kebutuhan sarana seperti dirangkumkan dalam Tabel 4.9. Analisis terhadap prasarana yang tersedia di sekolah yang ada maka terdapat beberapa prasarana yang dianggap kurang, yakni laboratorium IPA, perpustakaan dan ruang UKS karena jumlah sekolah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sarana yang tersedia. Jumlah SMP Negeri yang belum memiliki laboratorium IPA berjumlah 3 di antara 61 sekolah atau 4,92%, sedangkan di sekolah swasta terdapat 80 sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA dari 270 sekolah atau 29,63%. Ruang perpustakaan belum dimiliki oleh 8 SMPN atau 13,11% sekolah dan belum dimiliki oleh 11 SMP swasta atau 4,07%. Ruang UKS belum dimiliki 11,48% sekolah negeri dan 20,0% sekolah swasta. Ruang kelas SMP tidak ada yang kekurangan bahkan mengalami kelebihan 11 ruang. Di SMP swasta kelebihan ruang kelas mencapai 284. Hal ini salah satunya disebabkan berkurangnya jumlah siswa karena daya tampung SMPN juga meningkat.

Bila dikaitkan dengan akreditasi yang sebagian besar sekolah mencapai A seharusnya tidak ada kekurangan pada empat jenis prasarana sekolah tersebut.

Tabel 4.9 Jumlah Kebutuhan Prasarana di Kota Surabaya Tahun 2017/2018

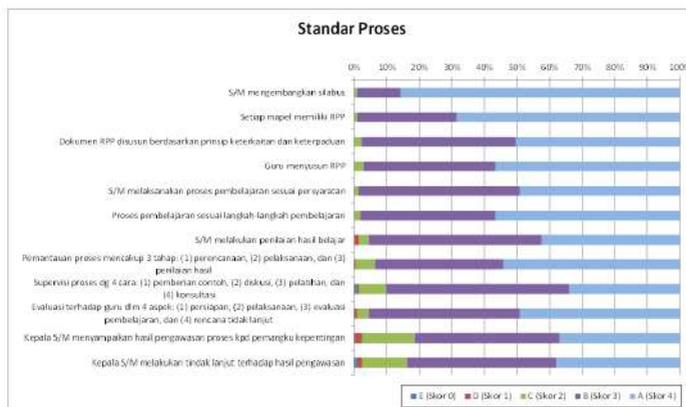
No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Ruang Kelas	1.515	2.381	3.896
2	Lab. IPA	58	190	248
3	Perpus	53	259	312
4	UKS	54	216	270
	Kekurangan atau Kelebihan			
1	Ruang Kelas	11	284	295
2	Lab. IPA	-3	-80	-83
3	Perpus	-8	-11	-19
4	UKS	-7	-54	-61

b. Gambaran pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP Kota Surabaya

Pemenuhan SNP dilihat dari hasil akreditasi SMP untuk Kota Surabaya cukup baik dengan nilai > 84 . Di antara 8 SNP, terdapat 4 standar yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan standar lainnya, yakni standar PTK sebesar 84,21, SKL sebesar 84,97, standar sarpras sebesar 85,03 dan standar proses sebesar 85,52.

Hasil pemenuhan SNP yang diperoleh dari hasil akreditasi dapat ditelusuri nilai jawaban per butir pertanyaan akreditasi yang dijawab oleh sekolah. Untuk standar yang memiliki nilai rendah di antara standar lainnya dapat dilihat butir mana saja yang dijawab D dan E yang memiliki skor 1 dan 0 dengan hasil terendah. Seluruh pertanyaan dalam borang akreditasi untuk SMP tahun 2016, ada 169 pertanyaan. Jumlah pertanyaan standar proses ada 12 dari

nomor 19 sampai dengan 29.



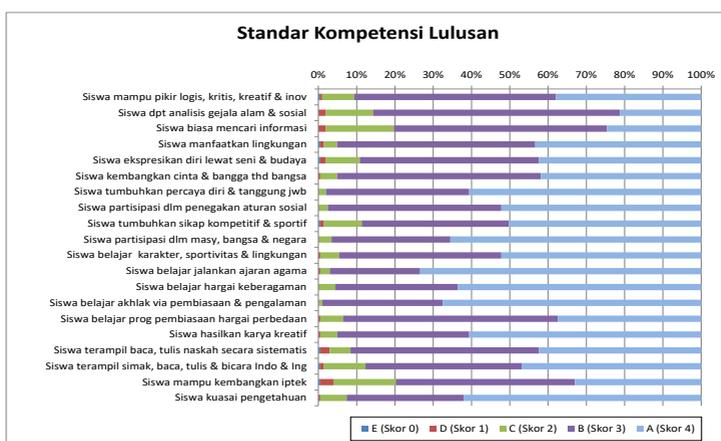
Grafik 4.16 Pemenuhan Standar Proses Berdasarkan Jawaban Butir Pertanyaan

Butir pertanyaan yang banyak di jawab D dan E dalam standar proses adalah butir 28, Kepala S/M menyampaikan hasil pengawasan proses kepada pemangku kepentingan dijawab D oleh sebanyak 2,46% dari N= 203 sekolah. Butir 29, Kepala S/M melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dijawab D oleh 1,48% sekolah dan butir 24 S/M melakukan penilaian hasil belajar dijawab D oleh 1,48% sekolah.

Hasil pengawasan kepala sekolah tidak ditindaklanjuti oleh 1,48% sekolah dan sebanyak 2,46% tidak disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan Grafik 4.17, untuk SKL terdapat 5 butir pertanyaan yang banyak dijawab D dan E oleh sekolah. Butir pertanyaan nomor 31 siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat

menganalisis gejala alam dan sosial dijawab D oleh 1,97% sekolah. Butir pertanyaan nomor 32 dijawab D oleh 1,97% siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar selama satu tahun pelajaran terakhir, butir pertanyaan 34 siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dijawab D oleh 1,48% sekolah.

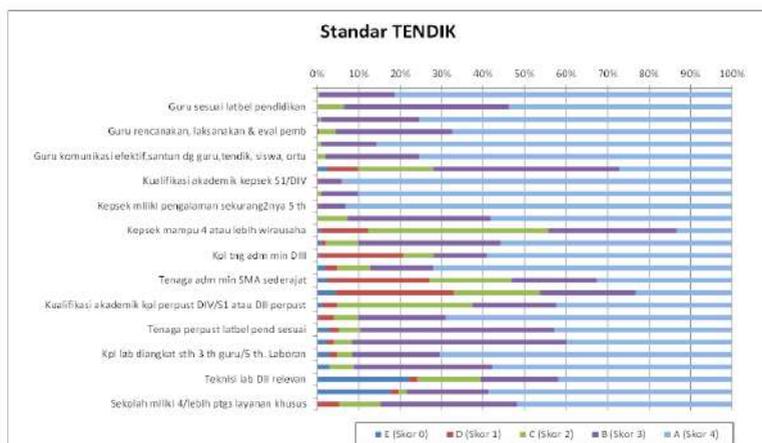


Grafik 4.17 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Berdasarkan Jawaban Butir Pertanyaan

Butir pertanyaan nomor 46 Siswa memperoleh pengalaman keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis dijawab D oleh 2,46 % sekolah, butir nomor 48 siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya dijawab D 3,45% sekolah. Sekolah di Kota Surabaya yang rendah dalam hal mengajak siswa mengembangkan iptek dan membiasakan mencari informasi sebagai sumber belajar dapat lebih mengajak guru

untuk menggerakkan siswa dalam proses belajar mengajar. Motivasi dari guru penting agar siswa bersemangat melakukan kegiatan untuk membuat mereka menjadi lebih kreatif mencari informasi dan mengajak siswa berkreasi dalam pengembangan iptek.

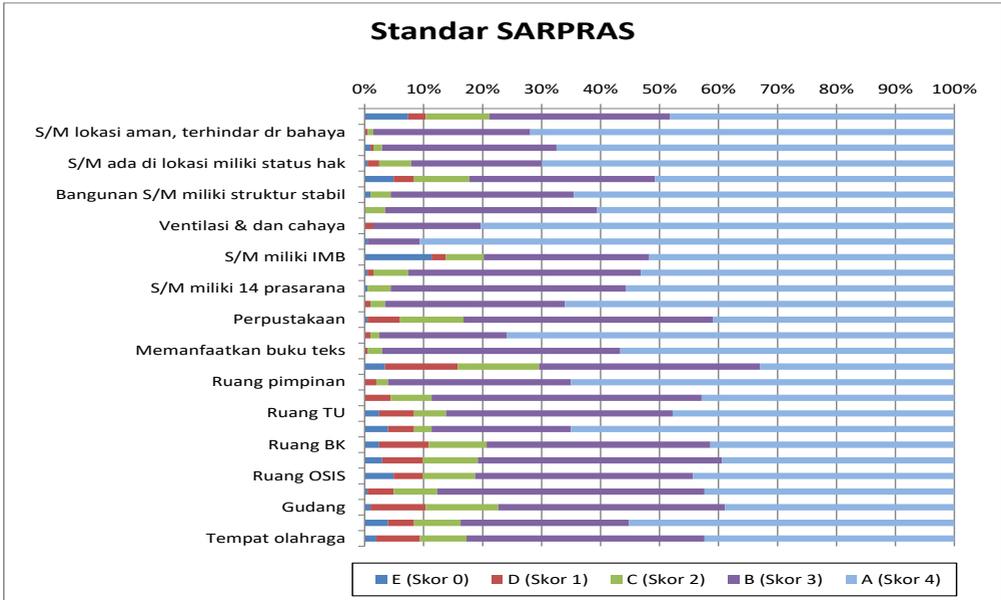
Butir yang banyak dijawab D dan E dalam Standar PTK seperti yang terlihat pada Grafik 4.18 adalah butir 74 laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I dijawab E oleh 17,73% sekolah, butir 73 teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium dijawab E oleh 22,17% sekolah, butir 66 tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya dijawab E oleh 4,43% sekolah. Jika sekolah menjawab E, artinya kualifikasi tenaga kependidikan yang dipersyaratkan dalam akreditasi tidak dapat dipenuhi oleh beberapa persen sekolah tersebut.



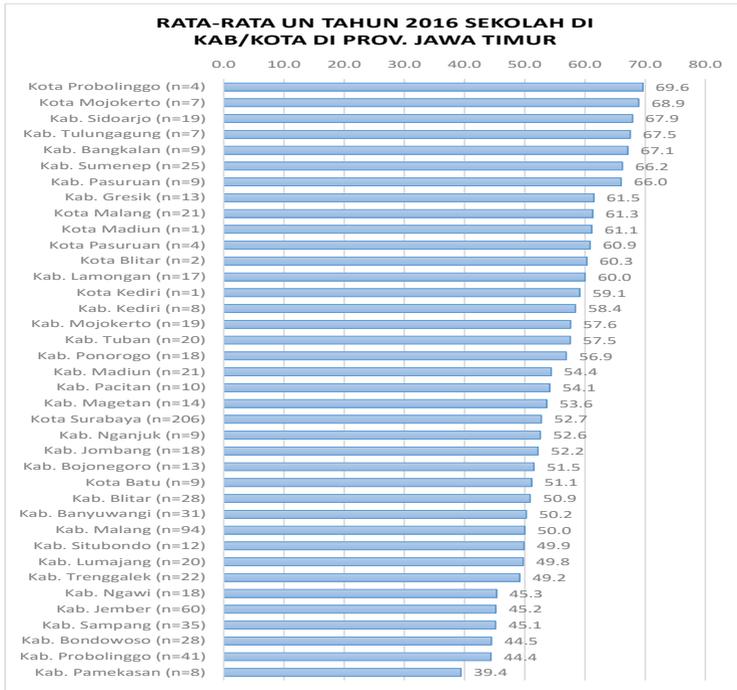
Grafik 4.18 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jawaban Butir Pertanyaan

Hal ini disebabkan sumber daya yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan sulit ditemui. Selain itu, pemerintah lebih fokus pada pengangkatan guru daripada pengangkatan tenaga kependidikan seperti halnya laboran. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 2,46% guru yang belum menguasai materi pelajaran yang diajarkan serta mengembangkannya secara ilmiah. Pemerintah seharusnya mengidentifikasi guru yang ada pada sekolah yang memiliki guru belum menguasai materi untuk diberi pelatihan.

Pertanyaan yang banyak dijawab D dan E pada Standar sarpras ada pada butir pertanyaan 99 sekolah/madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan dijawab E oleh 4,93%, butir 85 sekolah/madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya dijawab E oleh 11,33% sekolah, butir 80 sekolah/madrasah memiliki lantai bangunan dengan luas sesuai ketentuan minimal dijawab E oleh 4,93% sekolah dan butir 76 sekolah/madrasah memiliki luas lahan sesuai ketentuan dijawab E oleh 7,39% sekolah. Persentase paling besar yang belum dimiliki oleh sekolah adalah surat IMB dan izin penggunaan bangunan. Sekolah yang didirikan sebaiknya dirancang dengan matang baik izinnya maupun luas lahan dan bangunannya.



Grafik 4.19 Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Berdasarkan Jawaban Butir Pertanyaan



Grafik 4.20 Rata-rata UN 2016 Tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur

Kota Surabaya menduduki peringkat 22 di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penurunan peringkat tersebut disadari oleh pemerintah daerah. Usaha yang dilakukan dinas pendidikan adalah memanggil guru-guru mata pelajaran yang dijadikan UN di sekolah-sekolah yang nilai UN nya rendah untuk dilatih pendalaman materi pelajaran yang diajarkan dan telaah terhadap SKL.

a. Profil Sekolah Sasaran

Sasaran penelitian di Kota Surabaya adalah 7 sekolah berakreditasi A dengan nilai UN rendah dan satu sekolah berakreditasi A dengan nilai UN tinggi serta satu sekolah berakreditasi C dengan rata-rata nilai UN sedang.

SMP swasta favorit dan SMP negeri memiliki siswa antara 800 sampai 1000, sedangkan sekolah swasta dengan prestasi sedang ke bawah memiliki jumlah siswa di bawah 300.

Sebagian besar SMP sasaran yang berakreditasi A dan memiliki nilai UN rendah memiliki ruang laboratorium dan perpustakaan. Masalahnya, alat laboratoriumnya belum memadai. Seperti halnya di SMPN 43 memiliki laboratorium IPA tapi kecil tidak dapat menampung jumlah siswa sebanyak 877 walaupun secara bergantian, sedangkan di SMP Al Ikhlas laboratorium IPA-nya minim alat-alatnya. SMP Dr. Soetomo mengakui sarana dan prasarana perlu ditingkatkan karena kurang memadai, ruangan panas dan kurangnya media pembelajaran. Artinya, walaupun ruang laboratorium ada, alat yang ada di dalamnya belum memadai.

Tabel 4.12 Profil Sekolah Sasaran, Rasio Pendidikan, dan Nilai UN Kota Surabaya

No.	Nama Sekolah	Data			Rasio Pendidikan			Status	Nilai
		Siswa	Guru	Rombel	R-S/G	R-S/Rombel	R-Rombel/RK	Akreditasi	UN
1	SMP KRISTEN PETRA 3 SURABAYA	1.008	50	27	20,16	37,33	0,96	A	81,66
2	SMP BILINGUAL AL-AZHAR LAMONGAN	31	11	3	2,82	10,33	1,00	C	68,85
3	SMPN 43 SURABAYA	877	39	24	22,49	36,54	0,92	A	59,89
4	SMP KATOLIK SANTO MIKAEL	124	8	5	15,50	24,80	1,00	A	59,58
5	SMP UNESA 1 SURABAYA	509	22	13	23,14	39,15	1,86	A	58,91
6	SMPN 40 SURABAYA	926	41	25	22,59	37,04	0,93	A	56,95
7	SMP MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA	297	19	11	15,63	27,00	1,00	A	55,49
8	SMP AL-IKHKAS SURABAYA	149	11	6	13,55	24,83	0,67	A	45,19
9	SMP DR. SOETOMO SURABAYA	820	41	23	20,00	35,65	0,88	A	41,56

Nilai UN di SMP berakreditasi A dengan nilai UN tinggi memiliki sarana prasarana yang memadai, guru yang profesional dan pengelolaan yang baik, sehingga tercipta proses belajar mengajar yang kondusif. Setiap guru tahu masalah setiap anak karena setiap bulan ada evaluasi. Guru BP harus memberi konseling kepada semua siswa dengan membagi tiga kategori, hijau tak ada masalah, kuning untuk kasus ringan, dan merah untuk kasus berat. Guru BP segera mengetahui masalah siswa dan memberi solusi. Untuk meningkatkan hasil UN ada pelajaran tambahan seperti Matematika 6 jam ditambah 1 jam pelajaran untuk bimbingan dengan guru berbeda, yang 6 jam dengan guru Matematika reguler dan 1 jam dengan guru bimbingan. Di MGMP ada kupas SKL untuk membuat laporan. Guru membuat video tentang pelajaran supaya siswa yang tidak masuk sekolah bisa belajar di rumah. Ada beberapa

guru membuat 1 topik bahasan, digunakan untuk anak-anak belajar di rumah.

Berbeda dengan sekolah berakreditasi A dengan nilai UN rendah, memiliki beberapa kendala seperti ruang kelas kurang, jumlah komputer dan laboratorium komputer terbatas, ruang laboratoium kecil dan alat peraga masih kurang. Guru yang sudah berumur lebih lambat menyesuaikan dengan kurikulum 2013, selain kemampuan teknologi informasinya kurang. Selain itu, input siswa di sekolah dengan nilai UN rendah sebagian besar berkemampuan kurang dan berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kemampuan guru untuk mendidik siswa dengan input kurang seharusnya lebih baik dan memiliki pengelolaan sekolah yang dapat memotivasi siswa untuk mau belajar.

Sekolah berakreditasi C tetapi nilai UN baik, kelebihanannya karena jumlah siswanya lebih sedikit sehingga guru lebih mudah mengawasi, memotivasi dan mengajar siswa walaupun sarana dan prasarananya terbatas. Setiap hari siswa ditambah 1 jam pelajaran untuk mata pelajaran UN setelah pulang sekolah. Daya tangkap anak bagus karena hanya kecil kelompoknya. Guru memisahkan siswa yang kurang untuk diberi pekerjaan rumah. Semua anak sekolah di asrama, setiap 1 anak ada yang membimbing 1 guru dan 1 pengasuh. Pembimbingnya adalah teman satu kamar yang diambil dari mahasiswa yang kuliah di Sekolah Tinggi Yayasan yang sama.

Dilihat dari jumlah siswa dan jumlah ruang kelas maka SMP UNESA I Surabaya masih kekurangan 6 kelas karena jumlah rombel yang ada 13 sedangkan jumlah ruang kelas yang dimiliki hanya 7. Terlebih lagi bila Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 2016 tentang Standar Sarana Prasarana (Republik Indonesia, 2016) harus diikuti maka jumlah siswa

satu rombongan belajar seharusnya 32 per ruang kelas, sedangkan di SMP tersebut jumlah siswa satu rombongan belajar 40, maka jumlah ruang kelas akan lebih banyak lagi dibutuhkan. Hanya sekolah swasta yang kekurangan siswa, yang ruang kelasnya berlebih. Untuk itu jumlah siswa per rombongan belajar harus disesuaikan dengan keadaan kepadatan daerah dan luas wilayah suatu daerah.

Tabel 4.13. Sarana Prasarana Sekolah Sasaran Kota Surabaya

No.	Nama Sekolah	Data			Kekurangan/Kelebihan		
		R. Kelas	Lab. IPA	Perpus	R. Kelas	Lab. IPA	Perpus
1	SMP Kristen Petra 3 Surabaya	28	3	1	1	2	0
2	SMP Bilingual Al-Azhar	3	0	0	0	-1	-1
3	SMPN 43 Surabaya	26	2	1	2	1	0
4	SMP Katolik Santo Mikael, Surabaya	5	1	1	0	0	0
5	SMP UNESA I, Surabaya	7	1	1	-6	0	0
6	SMPN 40 Surabaya	27	1	1	2	0	0
7	SMP Muhammadiyah 4 Surabaya	11	1	1	0	0	0
8	SMP Al-Ikhlash, Surabaya	9	1	1	3	0	0
9	SMP Dr. Soetomo, Surabaya	26	2	1	3	1	0

b. Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi

1. Standar Isi

Semua sekolah sampel memiliki dokumen kurikulum. Setiap guru wajib membuat perangkat mengajar dicek pada awal tahun ajaran dan guru mengajar sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat. Buku pelajaran yang disediakan pemerintah di sebagian besar sekolah mengatakan sesuai dengan kurikulum, hanya datangnya terlambat. Satu sekolah mengatakan buku

pelajaran perlu direvisi dan dilakukan penyesuaian.

Standar isi memiliki kontribusi sangat tinggi dianggap oleh satu sekolah karena berhubungan dengan materi untuk siswa. Sekolah lainnya mengatakan standar isi yang di dalamnya terdapat kurikulum sangat membantu karena semua kegiatan pengajaran lebih terprogram dengan porsi yang pas.

2. Standar Proses

Dalam proses pembelajaran di SMPN 40, remedial dilakukan guru mata pelajaran bila siswa kurang dari nilai KKM. Remedialnya dilakukan dengan memberikan soal yang sama dengan soal ujian dan diberi pengayaan. Jika ada 20% atau 25% anak yang nilainya tidak mencapai KKM maka anak ditanya materi apa yang tidak bisa, materi tersebut diulang kembali oleh guru.

Remedial di SMP Muhammadiyah 4, seperti yang dilaksanakan oleh SMP 40, soal yang mana yang tidak dipahami dan tidak dapat diselesaikan oleh siswa. Guru menyampaikan pembahasan materi tersebut kemudian anak diberi soal. Selama ini, remedial di setiap mata pelajaran tidak sama, rata-rata dalam 1 pelajaran ada 6 sampai 10 siswa, biasanya mata pelajaran MIPA.

Remedial hampir tiap pertemuan di SMP Santo Mikael, 50% siswa lebih perlu remedial dan tak bisa sekaligus selesai tetapi harus berulang-ulang. Tiap orang bisa diremedial untuk 1 materi bisa berulang-ulang. Waktu pada jam pelajaran atau di luar pelajaran, dengan harapan materi yang mereka kuasai bisa meningkat.

Bagi siswa yang memiliki kelemahan fisik remedi dilakukan sampai dia bisa.

Penggunaan laboratorium di tiga sekolah belum maksimal karena alat-alat kurang memadai. Pelaksanaan PBL sudah dijalankan oleh sebagian besar sekolah. Satu sekolah baru dilaksanakan oleh 60% guru. Satu sekolah berakreditasi C mengakui belum melaksanakan dengan baik. Buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar terutama yang disediakan oleh Pemerintah sebagian besar sekolah mengatakan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada, namun ada satu sekolah yang mengatakan belum sesuai.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Empat sekolah swasta memiliki input siswa dari kalangan menengah ke bawah sehingga perlu ekstra perhatian dan usaha untuk mendisiplinkan siswa karena tingkat pendidikan orang tua tergolong rendah. Di SMP Dr. Soetomo, diutamakan kedisiplinan, siswa yang telah sampai tiga kali terlambat diminta membawa kembang, batu bata, dan lainnya. Bila masih ada siswa yang bandel maka orang tuanya dipanggil. Dari sisi prestasi, yang paling menonjol adalah olahraga atletik dan paskibra. Untuk prestasi akademik, guru perlu kesabaran ekstra dalam mengajar.

Sebagian besar sekolah mengadakan program bimbingan belajar, mengikuti rumah matematika, melaksanakan *try out* dan program remedial.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berkaitan dengan guru di tiga SMP Negeri di Kota

Surabaya ada kendala, pertama guru yang sudah menjelang pensiun dan cukup lama mengajar tidak dapat dengan cepat mengikuti perkembangan kurikulum yang selalu berubah, proses pembelajaran belum bisa aktif dan kreatif sehingga masih menggunakan gaya lama, sedangkan guru yang masih muda lebih menguasai perkembangan teknologi dan kreatif serta membuat siswa aktif.

Di SMPN 43, jumlah guru 35 PNS dan 2 honor ditambah guru pembimbing. Untuk mengatasi guru honor, ada program bintang, diambil 8 anak yang pandai setiap mata pelajaran untuk menjadi pemimpin seperti tutor sebaya. Bila guru tidak masuk maka dia yang mengganti walaupun guru piket juga ada. Anak-anak yang menjadi bintang diberikan pelajaran lebih. Sekolah melaksanakan bimbingan belajar.

Bagi sekolah yang memiliki nilai UN rendah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan memanggil guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika setiap minggu. Bentuk pelatihannya pendalaman materi sesuai dengan SKL dan indikator termasuk bentuk soal yang diberikan.

Di salah satu SMP swasta penilaian terhadap guru juga dilakukan oleh siswa, selain itu supervisi kepala sekolah dilakukan secara tidak formil. Berkenaan dengan absen, bila ada guru yang keluar kelas lebih dari 10 menit maka dihapus 1 jam. Bila guru tidak masuk dan tidak izin maka dianggap alpha dan dilaporkan ke yayasan. Untuk memberi motivasi kepada guru maka guru diberi insentif pada setiap akhir tahun.

Guru yang sering dipanggil oleh Dinas Pendidikan,

tidak bisa mengajar sehingga harus digantikan oleh guru piket.

5. Standar Sarana Prasarana

Sarana prasarana di SMP Muhammadiyah 4 sebesar 50% sudah dipenuhi dengan baik, hambatan yang dihadapi antara lain masih sangat membutuhkan laptop, LCD dan alat peraga lain. Di SMP swasta berakreditasi A namun jumlah siswanya sedikit kekurangan sarpras terutama TIK. Selain itu kondisi laboratorium IPA juga minim. SMP Dr. Soetomo keadaan sarpras perlu ditingkatkan karena yang dipakai sekarang kurang memadai, ruangan panas dan kurangnya media pembelajaran yang ada. SMPN 40 keadaan sarpras sudah sesuai program, permasalahannya jumlah ruang yang belum memenuhi kurang untuk kegiatan penunjang (ruang UKS, ruang BK dan OSIS).

Untuk SMPN 43 sarpras hampir semua ada tetapi belum bisa mencukupi untuk semua siswa, misalnya laboratorium IPA yang ada tetapi kecil dan lahan untuk parkir siswa yang belum ada sehingga sepeda siswa diletakkan di depan sekolah. Sekolah swasta yang memiliki jumlah siswa di atas 500 kekurangan ruang kelas.

6. Standar Pengelolaan

Pengelolaan pendidikan diusahakan sebaik mungkin namun ada saja satu dua guru yang kurang kooperatif dan lambat dalam melaksanakan tugasnya. Setelah diberi pengarahan baru berjalan dengan baik.

Di SMPN 40 dilakukan supervisi dan penilaian SKP

oleh kepala sekolah dan guru senior 2 orang. Agar urusan naik pangkat guru lancar maka dibuat tim untuk mengurus kenaikan pangkat guru sehingga dapat cepat naik pangkat dan mengajar dengan tenang. Dulu sebelum dibentuk tim yang mengurus kepangkatan, guru sampai tak mengajar karena urusan berkas untuk naik pangkat.

Sekolah sasaran yang berakreditasi C, pelaksanaan standar pengelolaan masih belum tertata dengan rapi karena masih minimnya pengetahuan baik dari pengelola maupun dari staf-staf yang lain.

7. Standar Pembiayaan

RKAS dan RKJ, rencana anggaran dan program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang telah disusun dengan baik dan dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah pencairan dana BOSNAS/BOPDA tidak di awal triwulan, kadang ada kegiatan yang tidak bisa masuk dalam dana BOSNAS/BOPDA sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Untuk standar pembiayaan sekolah swasta berharap pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah swasta untuk bisa cair dalam waktu yang dekat sesuai dengan waktunya. Bagi sekolah swasta yang tidak memungut bayaran terutama di sekolah yang memiliki siswa anak yatim, fakir miskin dan mitra warga, masih banyak siswa yang nunggak dalam pembiayaan sekolah.

Sebagian besar sekolah terutama sekolah negeri dan sekolah yang siswanya tidak mampu maka pembiayaannya tergantung dari BOSNAS dan BOPDA sehingga jika sumber-sumber dana tersebut terlambat

cair maka operasional sekolah juga tersendat seperti biaya kegiatan dan gaji guru. Salah satu sekolah swasta mengutarakan bahwa standar pembiayaan sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi biaya-biaya untuk menjadikan lembaga lebih bermutu.

8. Standar Penilaian

Sekolah sudah berusaha untuk mengadakan penilaian sesuai standar yang digunakan untuk siswa melalui PR, UAS dan penilaian karakter. Penilaian dilaksanakan sesuai standar Dinas Pendidikan Kota, tiap penilaian dilakukan analisis hasilnya dan ditindaklanjuti berupa remedi dan pengayaan.

Implementasinya sudah cukup bagus namun permasalahannya kemampuan anak-anak banyak yang di bawah standar sehingga untuk nilai banyak yang harus diangkat lewat remedi/sikap dan kurang maksimal dalam pelaksanaan remedial dan penilaian.

Di sekolah sasaran yang berakreditasi C, untuk standar penilaian kurang dapat terlaksana, kendala yang utama adalah pengelolanya.

c. Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan /Mempertahankan Status Akreditasi

Bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat berupa BOS dan dari Pemerintah Daerah BOPDA. Pihak dinas pendidikan juga memberi bantuan berupa sarpras, sarana belajar seperti meja, kursi, LCD, CCTV, dan lemari. Selain itu, juga ada bimbingan dari pengawas yang memantau pelaksanaan pembelajaran serta pendampingan dan

pengarahan. SMP terutama SMP negeri sangat bergantung pada bantuan BOS dan BOPDA dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan dana BOS dan BOPDA tidak dapat dipenuhi melalui dana lain.

- d. Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam Memperoleh Nilai UN Tinggi
 1. Dari Aspek Siswa
 - a. ada siswa yang minat belajarnya rendah
 - b. motivasi siswa untuk belajar masih kurang
 - c. SDM yang rendah
 - d. tidak semua siswa memiliki kompetensi yang sama
 - e. kelengkapan sarana
 - f. Latar belakang siswa tidak mampu, motivasi belajar kurang dan keluarga tidak mendukung
 - g. Kemampuan akademik siswa lemah
 - h. Siswa masih sulit untuk serius belajar
 2. Dari Aspek Guru
 - a. Jumlah siswa yang banyak dalam 1 kelas dan SDM guru
 - b. Guru banyak kegiatan sehingga waktu berkurang
 - c. Ada beberapa guru yang kurang menguasai IT
 - d. Kurang adanya pembekalan secara rutin terutama guru nasional
 - e. Terkadang lambat beradaptasi/memahami kurikulum baru

- f. Guru masih kurang dalam melakukan pembimbingan
 - g. Metode yang digunakan
3. Dari Aspek Sarana Prasarana
- a. perlu ruang kelas yang memadai
 - b. LCD dan komputer
 - c. pembelajaran dengan CBT sangat kurang karena hanya memiliki 1/4 komputer dari jumlah siswa 1 kelas.
 - d. kurang adanya buku-buku perpustakaan berkaitan dengan materi UN
 - e. Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah
 - 1. Dari aspek Guru
 - a. Kualitas guru, ijazah, dan penghargaan
 - b. Menjadikan guru yang kreatif dan inovatif
 - c. Guru yang inspiratif dan berprestasi secara holistic
 - d. Guru melakukan tranfer ilmu yang baik
 - e. Menguasai mapel yang diampu, menjadi contoh yang baik, berkarakter
 - f. Penguasaan materi dan metode pengajaran dan profesional
 - 2. Dari aspek Siswa
 - a. Life skill, UN, santun, dan penghargaan
 - b. Meluluskan siswa yang berkarakter dan prestasi yang tinggi
 - c. SDM siswa bagus

- d. Siswa yang inspiratif dan berprestasi secara holistik
 - e. Banyak siswa berprestasi baik akademik dan nonakademik
 - f. Siswa menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi
 - g. Siswa berdisiplin, berakhlak mulia nilai akademis tinggi
 - h. Kemampuan akademik baik, minat pada pengetahuan dasar (Sumber FGD: Sekolah yang bermutu bila siswa punya pengetahuan dasar, tambahan, dan bisa adaptasi dengan lingkungannya)
 - i. Siswa yang memiliki nilai UN tinggi
3. Dari aspek sarpras
 - a. Memiliki sarpras yang menunjang KBM
 - b. Sarpras lengkap, siswa mudah mengakses, kondisi sekolah tampak bersih, rapi, dan bagus.
 4. Dari aspek prestasi
 - a. UN output tinggi sering mendapat penghargaan
 - b. Meluluskan siswa yang berprestasi baik akademik maupun nonakademik
 - c. Memiliki prestasi akademik dan nonakademik
 - d. Berprestasi di dalam ajang lomba di semua tingkat dan menjadikan siswa mempunyai skill yang tinggi
 5. Dari aspek karakter warga sekolah
 - a. yang disiplin dan penuh dedikasi
 - b. warga sadar akan pentingnya pendidikan

- c. *Smart in words, attitude and thought*
 - d. Disiplin dan jujur
 - e. Saling tolong menolong membantu dan kerja sama dan mendukung
 - f. Berakhlak karimah mampu menjadi teladan siswa
 - g. sopan, mandiri, disiplin, berani, santun
 - h. warga yang mendukung semua kegiatan sekolah terutama dalam hal memasukkan siswa ke lembaga.
- f. Prestasi Akademik, Nonakademik, dan Persentase Jumlah Siswa yang Diterima di Sekolah Favorit

Prestasi akademik tidak banyak diperoleh oleh SMP sasaran dengan akreditasi A nilai UN rendah. Untuk SMP berakreditasi A nilai UN tinggi prestasi akademiknya banyak seperti juara 2 olimpiade IPA ITS tingkat Nasional, Juara 3 Bahasa Inggris S2LC tingkat provinsi Jawa Timur, *gold medals* TIMC Thailand Matematika tingkat internasional dan *gold medals International Junior Science Olympiade* (IJSO) di Bali tingkat internasional. SMP berakreditasi A dengan nilai UN tinggi yang menjadi sasaran penelitian juga memiliki banyak prestasi di bidang nonakademik.

SMP berakreditasi A nilai UN rendah memiliki banyak prestasi di bidang nonakademik. Di SMPN 40 prestasi juara 1 latar vokal tunggal, juara 1 karate antarclub Kota Surabaya, juara paduan suara Kota Surabaya, juara tiga ecopreneur. Di SMPN 43 juara 1, 2 dan 3 sepak takraw tingkat Kota Surabaya, juara 1 dan 2 wushu tingkat provinsi. Untuk SMP Al Ikhlas memiliki prestasi juara 1 pencak silat perguruan

tingkat Kota, juara 3 pencak silat KONI Surabaya. Seperti halnya juga di SMP Muhammadiyah 4, banyak memiliki prestasi nonakademik seperti juara 1 lomba robot se Jatim, juara 1 lomba robot nasional, juara harapan lomba robot se Asia dan juara 1 pencak silat nasional.

- g. Standar Nasional Pendidikan yang Paling Mempengaruhi terhadap Pencapaian UN

Hampir semua sekolah sasaran di Kota Surabaya mengemukakan bahwa standar proses paling mempengaruhi pencapaian hasil UN. Satu sekolah berakreditasi A dengan nilai UN tinggi berpendapat SNP yang paling mempengaruhi pencapaian UN adalah standar isi, standar proses, SKL serta standar PTK. Satu sekolah berpendapat standar proses dan standar penilaian, satu sekolah berpendapat SKL dan standar sarpras. SNP yang disebut sekolah berpengaruh terhadap pencapaian hasil UN adalah standar proses, standar isi, SKL, Standar PTK, standar penilaian dan standar sarpras.

4. Kota Bandung

- a. Profil SMP Kota Bandung

Jika melihat visi Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang cerdas, sehat, produktif, berakhlak mulia dan cinta lingkungan hidup guna mendukung Bandung Bermartabat, sedangkan misinya adalah meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan menuju SNP, mengembangkan pendidikan karakter (*character building*) menuju akhlak mulia, pengembangan sekolah sehat dan

sekolah berwawasan lingkungan, pengembangan kepemudaan, olahraga, dan seni budaya, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan melakukan pengembangan *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berdasarkan data pokok pendidikan kota Bandung pada jenjang SMP diperoleh gambaran untuk jenjang SMP terdapat 244 sekolah meliputi 57 SMP negeri dan 187 SMP swasta. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMP di kota Bandung, maka rasio siswa per sekolah (R-S/ Sek) di sekolah negeri lebih jauh lebih besar dari sekolah swasta, yaitu 988 di negeri berbanding 276 di swasta (Tabel 4.14).

Jika perbandingan R-S/Sek di SMP negeri dan swasta cukup jauh, rata-rata dalam 1 sekolah terdapat 988 siswa di SMP negeri dan 276 di SMP swasta, hal ini berpengaruh karena jumlah SMP negeri cenderung lebih sedikit dari SMP swasta yaitu 57 sekolah negeri berbanding 187 sekolah swasta. Perbandingan jumlah siswa SMP dengan jumlah rombel yang ada maka rata-rata rasio siswa per rombel (R-S/Rombel) adalah 32 dengan rincian R-S/Rombel di SMP negeri sedikit lebih banyak yaitu 35 dari SMP swasta yaitu 29. Sama halnya, kondisi rasio siswa per guru (R-S/G) yaitu 23 di SMP negeri dan 18 di SMP swasta.

Tabel 4.14 Profil Pendidikan dan Rasio SMP Kota Bandung Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Sekolah	57	187	244
2	Siswa	56.322	51.611	107.933
3	Siswa Baru	16.252	18.419	34.671
4	KS/Guru	2.483	2.814	5.297
5	Rombel	1.629	1.763	3.392
	Rasio Pendidikan			
6	R-S/Sek	988	276	442
7	R-S/Rombel	35	29	32
8	R-S/G	23	18	20
9	R-Rombel/R.Kelas	1,08	1,04	1,06

Standar sarpras adalah kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Hampir semua variabel berupa ketersediaan ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan dan ruang UKS pada SMP di Kota Bandung masih kurang.

Tabel 4.15 Kebutuhan Prasarana Sekolah Kota Bandung Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Negeri	Swasta	Jumlah
	Data			
1	Ruang Kelas	1.511	1.695	3.206
2	Lab. IPA	52	83	135
3	Perpus	47	154	201
4	UKS	45	85	130
	Kekurangan atau Kelebihan			
1	Ruang Kelas	-118	-68	-186
2	Lab. IPA	-5	-104	-109
3	Perpus	-10	-33	-43
4	UKS	-12	-102	-114

Dengan asumsi bahwa ruang kelas harus sama dengan jumlah kelas maka SMP di Kota Bandung kekurangan sebanyak 186 ruang kelas yang sebagian besar terdapat di SMP negeri sebanyak 118 ruang kelas dan 68 ruang kelas pada SMP Swasta. Demikian pula untuk laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS harus sama dengan jumlah sekolah artinya satu sekolah harus memiliki prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, dan ruang UKS. Sebagian besar untuk sarpras berupa laboratorium IPA, perpustakaan dan ruang UKS terjadi kekurangan di SMP swasta.

Berdasarkan sekolah sasaran penelitian di Kota Bandung maka dapat dilihat bahwa dari 9 sekolah terdapat 1 sekolah memiliki akreditasi B, yaitu SMPN 3 Cililin. Namun, ternyata walaupun akreditasinya B nilai rata-rata UN sekolah tersebut melampaui nilai rata-rata UN SMP yang terakreditasi A. Dari 8 sekolah dengan akreditasi A dengan nilai rata-rata UN yang sesuai, yaitu SMPN 5 Bandung, SMPK 1 BPK Penabur, sekolah lain di bawah standar nilai minimal.

Bila melihat rasio pada masing-masing sekolah dengan memperhatikan status sekolah, akreditasi, jumlah siswa dan dengan jumlah guru maka sekolah yang paling banyak siswanya adalah SMPN 5 Bandung sebanyak 1.023 siswa, SMPK 1 BPK Penabur 843 siswa, dan SMPN 32 Bandung 765 siswa. Jika melihat R-S/G, SMPK BPPK memiliki R-S/G lebih baik, yaitu 10 artinya dengan jumlah 100 siswa maka satu guru melayani sekitar 10 siswa, SMPK 1 BPK Penabur memiliki rasio 1:13, dan SMPN 3 Cililin memiliki rasio 1:18. Bila dilihat R-S/Rombel maka rombel terpadat juga terjadi di SMPN 5 Bandung sebesar 34 dan pada SMPK BPPK sebesar 25.

Tabel 4.16 Profil Sekolah Sasaran Kota Bandung

No.	Nama Sekolah	Data			Rasio Pendidikan			Status Akreditasi	Nilai UN
		Siswa	Guru	Rombel	R-S/G	R-S/Rombel	R-Rombel/RK		
1	SMPK 1 BPK PENABUR BANDUNG	843	61	29	13,82	29,07	0,97	A	86,99
2	SMPN 5 BANDUNG	1.023	50	30	20,46	34,10	0,88	A	82,41
3	SMPN 3 CILILIN	301	16	9	18,81	33,44	1,29	A	60,25
4	SMP ADVENT CIMINDI	126	3	5	42,00	25,20	0,63	A	59,38
5	SMP KRISTEN BPPK BANDUNG	100	10	4	10,00	25,00	1,00	A	59,33
6	SMPN 32 BANDUNG	765	37	24	20,68	31,88	1,14	A	57,38
7	SMP PASUNDAN 5 BANDUNG	365	19	13	19,21	28,08	1,00	A	46,45
8	SMP MUHAMMADIYAH 1 BANDUNG	221	10	8	22,10	27,63	1,33	A	46,41
9	SMP AL-ISLAM BANDUNG	297	14	11	21,21	27,00	2,75	B	42,94

Pada R-S/Rombel, hampir semua sekolah memenuhi batas ideal, yaitu di bawah 35 siswa per rombel. Rasio siswa per rombel terpadat di SMPN 5 Bandung sebesar 34 dan yang jarang di SMPK BPPK sebanyak 25 siswa per rombel. Terdapat separuh dari R-Rombel/RK yang ideal bahkan di SMPN 5 Bandung dan SMP Advent Cimindi terdapat kelebihan ruang kelas masing-masing sebanyak 4 dan 3 ruang kelas. Selebihnya atau 4 sekolah kekurangan ruang kelas. Kekurangan ruang kelas terbanyak atau tidak sebanding dengan jumlah rombel adalah di SMP

Al-Islam yang kekurangan sebanyak 7 ruang kelas, SMPN 32 Bandung kekurangan 3 ruang kelas, dan di SMPN 3 Cililin dan SMP Muhammadiyah 1 masing-masing kekurangan 2 ruang kelas.

Prasarana lainnya, lebih dari separuh atau 5 sekolah belum memiliki laboratorium IPA, yaitu di SMPK BPPK Bandung, SMP Muhammadiyah 1 Bandung, SMP Pasundan 5, SMP Advent Bandung, dan SMP Al-Islam. Sama halnya dengan sarana perpustakaan yang merupakan bagian dari standar sarpras yang harus dipenuhi keberadaannya oleh sekolah. Perpustakaan sekolah berperan untuk membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sebagai salah satu sumber belajar dan harus menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dan guru. pada kenyataannya, terdapat 5 sekolah dengan akreditasi A namun belum memiliki sarana perpustakaan.

Tabel 4.17 Kondisi Sarpras Sekolah Sasaran Kota Bandung Tahun 2017/2018

No.	Nama Sekolah	Data			Kekurangan/Kelebihan		
		R. Kelas	Lab. IPA	Perpus	R. Kelas	Lab. IPA	Perpus
1	SMPK BPK PENABUR 1 BANDUNG	28	2	1	0	1	0
2	SMPN 32 BANDUNG	21	1	1	-3	0	0
3	SMP AL ISLAM	4	0	0	-7	-1	-1
4	SMPAS ADVENT CIMINDI	8	0	0	3	-1	-1
5	SMPAS PASUNDAN 5	13	0	0	0	-1	-1
6	SMP MUHAMMADIYAH 1 BANDUNG	6	0	0	-2	-1	-1
7	SMPK BPPK BANDUNG	4	0	1	0	-1	0
8	SMPN 5 BANDUNG	34	3	1	4	2	0
9	SMPN 3 CILILIN	7	1	0	-2	0	-1

b. Gambaran Pemenuhan SNP dan Pencapaian nilai UN SMP

Asumsi dalam studi ini adalah pencapaian nilai UN SMP sangat dipengaruhi bagaimana sekolah memenuhi 8 standar SNP. Pencapaian SNP dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan informasi dari pengisian terhadap borang pengukuran standar tersebut. Gambaran pemenuhan SNP dan pencapaian nilai UN SMP mengulas proses pengkajian substansi SNP untuk memperoleh data dan informasi tentang rencana menjadi acuan bagi satuan pendidikan untuk melakukan tindak lanjut dalam memenuhi SNP, yaitu dengan mengidentifikasi kondisi riil dan membandingkannya dengan kondisi ideal.

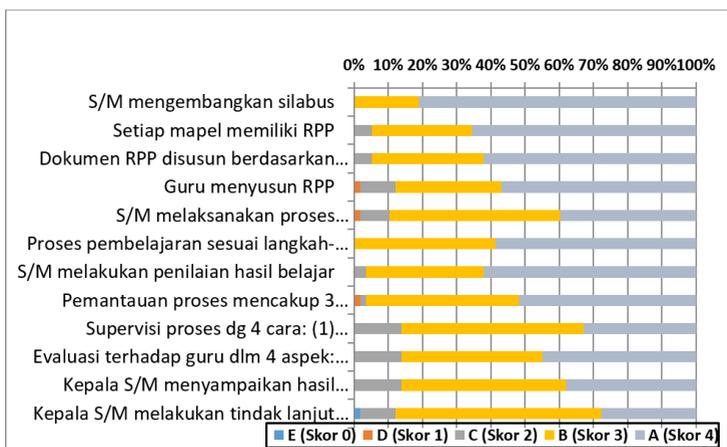
Kondisi ideal adalah minimal setiap komponen/subkomponen yang sesuai SNP dipenuhi oleh sekolah. Kondisi riil adalah kondisi nyata setiap komponen SNP yang ada di sekolah. Kondisi riil berupa kenyataan tentang pemenuhan masing-masing komponen di sekolah. Tidak terpenuhinya SNP merupakan sumber kelemahan untuk mencapai mutu layanan pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Kekuatan satuan pendidikan diindikasikan oleh kondisi pemenuhan komponen-komponen sumber daya satuan pendidikan sesuai dengan kondisi ideal. Kelemahan satuan pendidikan dinyatakan oleh kondisi komponen-komponen sumber daya satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan SNP. Kesenjangan adalah perbedaan yang terdapat antara kondisi ideal setiap komponen dengan kondisi riil.

Pemenuhan ke-8 SNP yang diukur melalui proses akreditasi pada sasaran sampel SMP di Kota Bandung ditemukan 4 standar yang nilainya rendah di antara 8 standar SNP

lainnya. Ke-4 standar itu adalah Standar Proses dengan skor 86,67; SKL dengan skor 79,56; standar PTK dengan skor 77,33; dan standar sarpras dengan skor 79,64.

Masing-masing standar memiliki pencapaian atau pemenuhan yang berbeda berdasarkan item pertanyaan akreditasi. Seperti digambarkan dalam Grafik 4.21, penilaian standar proses melalui 12 butir pertanyaan, yaitu nomor 18 sampai dengan nomor 29. Standar proses merupakan SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL.

Standar Proses



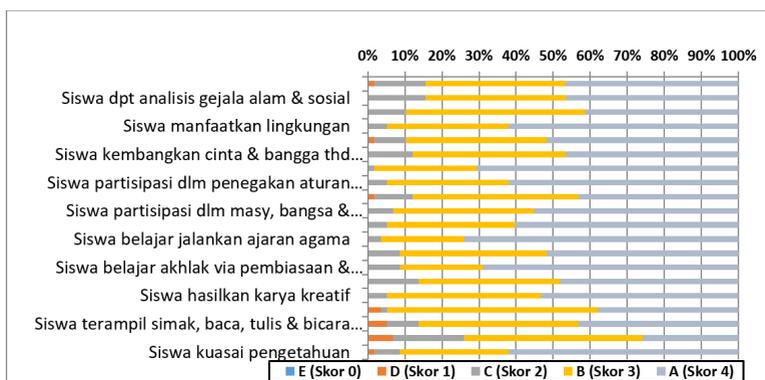
Grafik 4.21. Pencapaian Standar Proses Di Kota Bandung

Terdapat 1 sekolah (1,72 persen) yang menjawab dengan pemenuhan standar skor 0 (E) pada butir 29, yaitu kurangnya kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Butir dengan skor rendah 1 ada pada 2 sekolah, yaitu butir 21 guru menyusun RPP, butir 22

sekolah/madrasah melaksanakan proses pembelajaran sesuai persyaratan, dan butir 25 melakukan pemantauan proses mencakup 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil masing-masing sebesar 1,72 persen. Sebanyak 47 sekolah atau 81,01 persen menjawab dengan skor 4 (A) bahwa sekolah/madrasah mengembangkan silabus.

Berdasarkan pada Grafik 4.22, SKL yang memiliki 20 butir pertanyaan yang terdapat pada nomor 30 sampai dengan nomor 49. Terdapat 13 sekolah dengan jawaban pertanyaan yang mendapat skor rendah atau 1 (D), dengan persentase paling banyak menjawab pertanyaan butir 48 sebanyak 4 sekolah, yaitu siswa mampu kembangkan iptek sebesar 6,90 persen. Jawaban terbanyak kedua dengan persentase terbesar (5,17 persen) dengan nilai rendah (1) adalah pada butir 47 siswa terampil simak, baca, tulis dan bicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan 3 sekolah, sebanyak 2 sekolah jawaban pada butir 46 siswa terampil baca (3,45 persen), butir pertanyaan 30 siswa mampu berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, butir 34 siswa ekspresikan diri lewat seni dan budaya, butir 38 siswa tumbuhkan sikap kompetitif dan sportif, dan butir 49 siswa kuasai pengetahuan dengan masing-masing sebesar 1,72 persen.

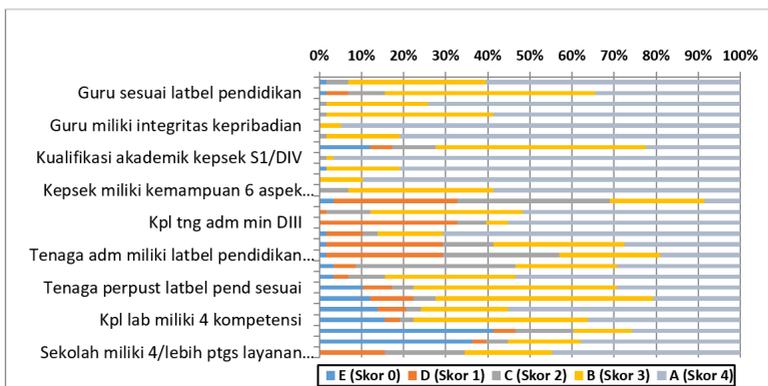
Standar Kompetensi Lulusan



Grafik 4.22 Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di Kota Bandung

Berdasarkan pada Grafik 4.23, standar PTK memiliki 26 butir pertanyaan nomor 50 sampai dengan nomor 75. Terdapat 94 sekolah yang menjawab di 16 butir pertanyaan yang mendapat skor terendah dengan skor 0/E. Sebagian besar, sekolah bermasalah pada standar PTK adalah terkait dengan ketersediaan teknisi dan tenaga laboran, yaitu pada butir pertanyaan nomor 69 hingga nomor 74. Semakin besarnya persentase jawaban pada tiap butir menggambarkan kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan SMP di Kota Bandung mencerminkan rendahnya ketersediaan guru dengan keahlian di laboratorium. Persentase dengan nilai rendah tertinggi di butir 73 yaitu teknisi laboratorium DII relevan sebesar 41,38 persen. Berikutnya butir 74 laboran minimal DI sebesar 36,21 persen, Selanjutnya secara berurutan adalah butir 72 kepala laboratorium memiliki 4 kompetensi, butir 71 kepala laboratorium laboratorium diangkat setelah 3 tahun/5 tahun laporan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan



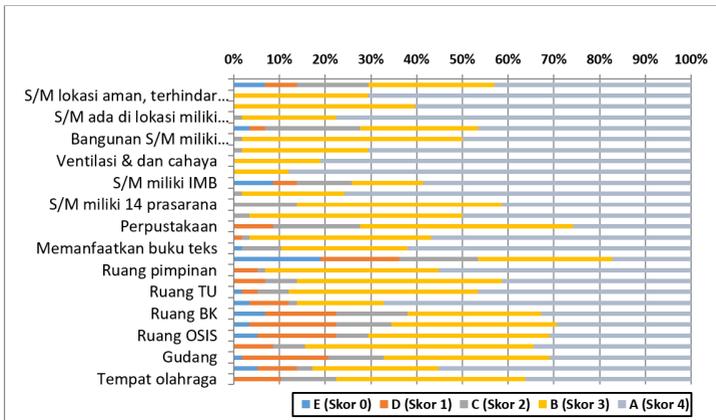
Grafik 4.23 Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Bandung

Persentase dengan nilai rendah tertinggi berikutnya pada butir 56 guru kuasai pelajaran yang diajar dan butir 70 kepala laboratorium minimal D-IV/S-1 dari guru/D-III laboran masing-masing 12,07 persen dan 12,07 persen. Butir 69 tenaga perpustakaan dengan latar belakang pendidikan sesuai sebesar 10,34 persen. Butir 61 kepala sekolah mampu atau 4 tahun lebih wirausaha, butir 67 kualifikasi akademik kepala perpustakaan DIV/S1 atau D2 Perpustakaan, dan butir 68 kepala perpustakaan min 3 tahun guru/4 tahun tenaga pendidik masing-masing 3,45 persen. Selanjutnya, di butir 50 kualifikasi akademik D-IV/S-1, butir 51 guru sesuai latihan belajar pendidikan, butir 58 kepala sekolahenuhi syarat yang ditentukan, butir 64 kepala tenaga admistrasi minimal kerja 4 tahun, butir 65 tenaga administrasi minimal SMA sederajat, butir 66 tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai SMA sederajat masing-

masing sebesar 1,72 persen.

Standar sarpras terdapat pada butir 76 sampai dengan nomor 103. Dari 28 item pertanyaan terkait standar sarpras, terdapat 39 sekolah yang menjawab pada 12 pertanyaan yang mendapat skor terendah atau 0/E. Dari jawaban kekurangan sarpras, lebih didominasi kendalanya adalah berkaitan dengan kepemilikan laboratorium sarana ibadah, gudang, dan ruang UKS.

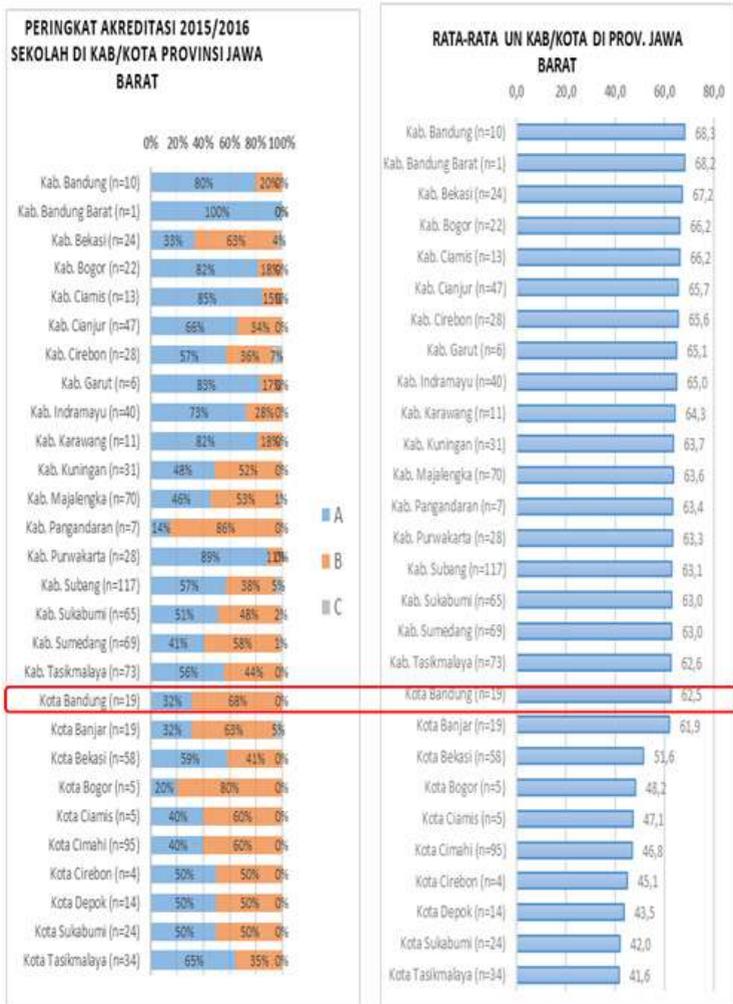
Standar Sarana dan Prasarana



Grafik 4.24 Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Kota Bandung

Pertanyaan butir 92 tentang ketersediaan laboratorium IPA memiliki jawaban dengan persentase tertinggi sebesar 18,97 persen, selanjutnya butir 85 sekolah/madrasah kepemilikan IMB 8,62 persen, butir 97 kepemilikan ruang BK sebesar 6,90 persen, serta butir 99 dan butir 102 tentang ketersediaan ruang OSIS dan ruang sirkulasi masing-masing sebesar 5,17 persen.

Jika tahun 2016 dilakukan akreditasi pada 19 SMP di Kota Bandung maka peringkat akreditasi SMP di Kota Bandung, hanya 32% memperoleh akreditasi A, sebagian besar atau 68% terakreditasi B, dan tidak ada sekolah yang memperoleh akreditasi C. Hal ini menjadikan dari 28 kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat, Kota Bandung termasuk peringkat ke-25. Namun, dilihat dari rata-rata hasil UN, maka tingkat ketercapaian nilai UN SMP di Kota Bandung sebesar 62,5 berada di rentang tengah atau urutan ke-19 dari 28 kabupaten/kota yang ada, jauh di bawah nilai rata-rata UN SMP di Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat.



Grafik 4.25 Peringkat Akreditasi SMP dan Rata-rata Hasil UN SMP Tiap Kab/Kota, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015/2016

- c. Implementasi SNP dan Mutu Sekolah pada Sekolah dalam Posisi Anomali

Nama sekolah, nilai UN dan hasil akreditasi (kabupaten/kota)

Tabel 4.18 menggambarkan sembilan sekolah yang menjadi sampel kajian, terdapat 8 sekolah akreditasi A dan 1 sekolah dengan akreditasi B. Berdasarkan mutu sekolah dengan pencapaian hasil UN, terdapat 3 sekolah memperoleh UN tinggi, sisanya 6 sekolah memperoleh UN rendah.

Tabel 4.18 Daftar Sekolah Sampel dengan Peringkat kreditasi dan Hasil Rata-Rata UN

No.	Nama Sekolah	PERINGKAT AKREDITASI	RATA-RATA UN
1	SMPK 1 BPK PENABUR BANDUNG	A	86.99
2	SMPN 5 BANDUNG	A	82.41
3	SMPN 3 CILILIN BANDUNG	B	60.25
4	SMP ADVENT CIMINDI	A	59.38
5	SMP KRISTEN BPPK BANDUNG	A	59.33
6	SMPN 32 BANDUNG	A	57.38
7	SMP PASUNDAN 5 BANDUNG	A	46.45
8	SMP MUHAMMADIYAH 1 BANDUNG	A	46.41
9	SMP AL-ISLAM BANDUNG	A	42.98

- d. Implementasi SNP dan Upaya Sekolah untuk Mempertahankan Status Akreditasi

1. Standar Isi

- a. Dari sembilan SMP di kota Bandung, sebagian besar memiliki dokumen kurikulum berupa

kurikulum 2013 (K-13) sudah diberlakukan di kelas 7 dan kelas 8, sedangkan kelas 9 masih menggunakan KTSP 2006, namun di SMPN 3 Cililin masih menggunakan Kurikulum KTSP 2006 baik di kelas 7, 8 dan kelas 9.

- b. Kurikulum dilaksanakan oleh guru dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, sudah sesuai dengan silabus dan RPP, membuat perangkat mengajar sesuai dengan silabus dan RPP, semua guru menggunakan dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan kurikulum 2013. Meski terdapat permasalahan yang dihadapi pelaksanaan kurikulum, seperti di SMPN 3 Cililin masih menggunakan Kurikulum KTSP 2006, tetapi mengintegrasikan dengan K-13.
- c. Buku yang disediakan pemerintah sesuai dengan kurikulum dijawab oleh semua sekolah sampel, dan SMP AL-Islam menyatakan jumlahnya masih kurang.
- d. Hanya ada empat sekolah, yaitu SMPN 5 Bandung, SMPK BPK 1 Penabur, SMPM 3 Cililin, dan SMPN 32 Bandung, selebihnya yaitu SMP Al-Islam, SMP Advent Cimindi, SMPK BPPK Bandung menilai kontribusi cukup mendukung dengan catatan guru membuat pemantapan dan pra-UN. SMP Pasundan 5 Bandung menilai kontribusi belum maksimal, dan SMP Muhammadiyah 1 Bandung tidak memberi komentar.

2. Standar Proses

- a. Penggunaan prasarana dijawab oleh sembilan sekolah berbeda, yaitu empat sekolah yaitu SMP Pasundan 5, SMP Al-Islam, SMPK BPPK Bandung, dan SMP Advent Cimindi menilai ruangan masih terbatas dan kurang, sehingga sekolah *double shift*. Di SMPN 5 Bandung, SMPK 1 BPK Penabur Bandung, dan SMPN 32 Bandung menilai sudah terpenuhi, sedangkan di SMP Muhammadiyah 1 Bandung dan SMPN 3 Cililin menilai cukup sesuai dalam rangka dinas dan penggunaan sarana masih menggunakan sarana yang ada dan penggunaan peraga masih menggunakan alat yang ada.
- b. Sebanyak 7 SMP menilai bahwa buku yang disediakan pemerintah telah mencukupi kebutuhan sekolah, namun di SMP Al-Islam buku-buku dirasa masih kurang, dan SMPN 32 tidak memberikan penjelasan.
- c. Pemberian dan pemeriksaan PR dan remedial dijawab oleh tujuh sekolah, yaitu sudah dilaksanakan dengan tambahan antara lain guru memberi PR penguatan dalam penguasaan konsep dan diperiksa pada pertemuan berikutnya, ada remedial untuk siswa yang belum mencapai KKM, serta remedial semua mata pelajaran. Dua SMP yaitu SMPN 5 Bandung dan SMP Muhammadiyah 1 tidak menjawab.
- d. Pelaksanaan PBL berjalan tidak lancar, hal ini yang dialami di SMP Pasundan 5 Bandung, sebaliknya pelaksanaan PBL di lima SMP berjalan lancar, yaitu di SMP Al-Islam, SMPN 32 Bandung,

SMP Advent Cimindi, SMPK BPPK Bandung, dan SMPN 3 Cililin, sedangkan tiga sekolah tidak memberi jawaban.

3. Standar Kompetensi Lulusan

SKL dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban bervariasi, yaitu beberapa sekolah yang memperoleh rata-rata hasil UN rendah menilai bahwa nilai UN lulusan masih rendah disebabkan ekstrakurikuler kurang (SMP Al-Islam) dan nilai UN belum memenuhi standar kelulusan (SMPK BPPK Bandung), sedangkan di SMP Advent Cimindi melakukan pengayaan setelah pulang sekolah. Pada SMP dengan UN tinggi menyikapi pentingnya standar SKL karena merupakan kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang Dikdasmen, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (SMPK BPK 1 Penabur), dan SMPN 3 Cililin menjawab setelah tercapainya target kurikulum diharapkan siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi; dan diharapkan pula dibarengi nilai yang tinggi sesuai kemampuan masuk ke jenjang sekolah negeri pula.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selain SMPN 5 dan SMP Al-Islam yang tidak menjawab standar PTK, berkaitan kemampuan guru dalam mentransfer ilmu, membuat siswa aktif belajar, kreatif dan berkarakter dijawab bervariasi oleh ketujuh SMP lain di kota Bandung. Kepala SMP Pasundan 5 menyatakan standar PTK belum maksimal, karena kualitas guru masih kurang. Sebaliknya kondisi di

SMPN 32, SMP Advent, SMP Muhammadiyah 1, SMPK BPPK menilai sebagian besar guru sudah cukup profesional. Kepala SMPK BPK 1 Penabur secara detil menjawab bahwa seharusnya PTK dituntut menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode; adanya perencanaan yang matang, membuat analisis hasil pembelajaran, guru harus kompeten dan kreatif, dengan menanamkan sikap katakter melalui pembiasaan. Hal serupa disampaikan Kepala SMPN 3 Cililin yang menjawab kemampuan guru dalam mentransfer ilmu, membuat siswa aktif belajar, kreatif dan berkarakter khususnya Mata Pelajaran lokal bisa mengkondisikan keadaan geografis, mata pencaharian warga masyarakat, yaitu berkebun yang berkaitan dengan PLH, anyaman, dan sebagainya. Sekolah menilai jika sumber alamnya pun tersedia, siswa mampu mahir membuatnya sehingga bisa mempunyai nilai jual barang keluar/tempat penampungan di sini pula ada kontribusi pemasukan *income* baik pada siswa maupun sekolah.

5. Standar Sarana Prasarana

Memiliki kendala yang hampir sama dirasakan oleh sekolah di Kota Bandung. Jawaban sekolah bervariasi, yaitu SMP Pasundan 5, menilai sarpras masih kurang hal ini diakibatkan kekurangan dana dan terbatasnya lahan; SMP Al-Islam, SMP Muhammadiyah 1, dan SMPK BPPK kekurangan ruang kelas, laboratorium IPA, IPS, komputer tidak ada serta sarana perpustakaan masih bersatu dengan ruang guru; SMPN 32 melakukan *moving class* karena terbatasnya ruang kelas, SMP Advent Cimindi karena yayasan penggunaan perpustakaan secara terpadu, lapangan olahraga

tidak ada, ruang laboratorium musik tergabung, dan jumlah komputer masih sangat kurang. Kondisi pada SMP dengan rata-rata nilai UN tinggi seperti di SMPN 5 Bandung dan SMPN 3 Cililin, menilai kondisi sarpras belum terpenuhi sesuai SPM, dan sekolah tidak mempunyai keleluasaan dalam menggaling dukungan dari *stakeholder* (SMPN 5); dan SMPN 3 Cililin memaksimalkan sarpras yang ada dengan baik tetapi masih belum maksimal, ketersediaan sarpras seperti halnya dengan standarisasi sarpras pendidikan atau SPM. Sebaliknya, terdapat sekolah yang memanfaatkan sarana yang sudah ada seperti di SMPK BPK 1 Penabur menjawab secara umum sarpras sudah tersedia, hanya ada prasarana digunakan bersama dengan sekolah lain di kompleks BPK Penabur.

6. Standar Pengelolaan

Dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu pelaksanaan standar pengelolaan belum maksimal apalagi berdasarkan IT, terlalu banyak regulasi yang mengatur, masih kekurangan tenaga guru yang berstatus definitif (PNS) sehingga penerapan pembiayaan tidak seimbang antara keperluan mebelier dan pembelanjaan pegawai, standar pengelolaan sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan instrumen yang tersedia, kurikulum yang berubah-ubah sebelum dipraktikkan ternyata gurunya harus membuat administrasi lagi, serta semaksimal mungkin penggunaan anggaran yang ada.

7. Standar Pembiayaan

Dijawab oleh semua sekolah dengan jawaban yang bervariasi, yaitu jawaban dari Kepala SMP Pasundan

5 bahwa pemasukan kurang sehingga banyak kegiatan yang belum tercapai, pembangunan sekolah yang kurang ideal, pembiayaan tidak bagus; serupa dengan kondisi di SMP Pasundan 5, di SMP Al-Islam tidak ada sumbangan dari orang tua/wali peserta didik, sumber pembiayaan hanya dari APBN, yaitu hanya dana BOS; masih banyak siswa yang kurang mampu dan tidak memiliki SKTM (SMP Advent Cimindi); pembiayaan masih mengandalkan dana BOS atau dana pemerintah (SMP Muhammadiyah 1); sumber dana yang dimiliki sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi biaya operasional yang harus dikeluarkan sekolah (SMPK BPPK); pembiayaan dipenuhi dari yayasan, semua kegiatan terencana 1 tahun sebelumnya (SMPK BPK 1 Penabur); pembiayaan dan pengembangan sekolah sulit dilaksanakan karena karena sumber keuangan hanya dari BOS APBN (SMPN 5 Bandung); serta dari SMPN 3 Cililin diperoleh jawaban masih kekurangan tenaga guru yang berstatus definitif (PNS) sehingga penerapan pembiayaan tidak seimbang antara keperluan mebeiler dan pembelanjaan pegawai.

8. Standar Penilaian

Guru memegang peran dalam standar penilaian, hal ini diperoleh hasil jawaban kepala sekolah dari beberapa SMP sampel di Kota Bandung, seperti 1) jawaban Kepala SMP Al-Islam bahwa sebagian guru belum menguasai penilaian sesuai dengan standar, guru belum banyak yang melakukan pemanfaatan hasil belajar untuk perbaikan PBM; 2) SMP Advent Cimindi belum semuanya guru paham dengan standar penilaian; 3) SMPK BPPK Bandung menilai *remedial teaching* dan pengayaan belum berjalan dengan

baik sehingga prestasi UN masih di bawah rata-rata nasional. Kepala SMP Pasundan 5 menilai bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai KKM. Terkait implementasi standar penilaian dan permasalahannya, di SMP dengan nilai tinggi memberi jawaban bahwa standar ini terlalu banyak aspek yang dinilai dengan standar yang tidak jelas, lebih baik menggunakan narasi kualitatif (SMPN 5 Bandung); Implementasi standar penilaian sudah terlaksana sesuai dengan instrumen, nilai sudah komputerisasi (SMPK BPK 1 Penabur); serta di SMPN 3 Cililin diperoleh jawaban bahwa standar penilaian masih belum maksimal diterapkan dikarenakan faktor lingkungan dan daya, dan dukungan masyarakat yang kurang.

- e. Pihak yang Membantu Sekolah Memenuhi SNP untuk Meningkatkan/ Mempertahankan Status Akreditasi

Pihak yang membantu sekolah memenuhi SNP untuk meningkatkan dan mempertahankan status akreditasi memperoleh jawaban bervariasi seperti pengadaan BOS buku, pengadaan alat laboratorium IPA, pengadaan alat matematika, pengadaan alat olahraga. Bantuan yang bersumber dari dinas berupa BOP, DAK, berupa pembinaan, serta pengadaan BOS Buku, pengadaan alat laboratorium IPA, pengadaan alat Matematika, dan pengadaan alat olahraga. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa BOS, rehabilitasi kelas, pendampingan, serta pengadaan alat olahraga dan pengadaan buku panduan guru dan siswa. Bantuan dari sumber lainnya berupa mitra kerja, *upgrade* guru, dan P2M.

- f. Kendala yang Dihadapi Sekolah dan Usaha dalam

Memperoleh Nilai UN Tinggi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam memperoleh UN tinggi adalah

1. Dari sisi Siswa; kurangnya motivasi, banyak siswa yang jarang sekolah/malas belajar/semangat/minat belajar rendah, input masuk ditingkatkan, kurangnya ikut tambahan belajar di luar sekolah, daya juang yang menurun tiap siswa, serta kurangnya dorongan/dukungan dari pihak orang tua karena faktor ekonomi dan lingkungan; tidak tersedia tempat pembelajaran di luar seperti les atau bimbingan belajar (bimbel), tidak tersedianya transportasi umum.
 2. Dari sisi Guru; *skill*/kemampuan guru, masih ada guru yang belum maksimal menguasai materi, dan jarang masuk, harus mengikutkan MGMP dan pelatihan, banyak guru yang masih merangkap mengajar di tempat lain, guru harus kreatif dalam pembelajaran yang *fun*, serta SDM guru yang masih kurang karena pemenuhan guru honor, kesejahteraan guru, dan TU yang masih kurang.
 3. Dari sisi Sarpras; dua sekolah, yaitu di SMPN 5 Bandung dan SMPN 3 Cililin menilai dari sisi sarpras berupa laboratorium dan alat bantu media pembelajaran untuk proses belajar mengajar, laboratorium Bahasa dan buku panduan masih kurang. Terdapat beberapa SMP yang kekurangan komputer, ruang kelas, serta sumber buku, dan metode pembelajaran yang kurang.
- g. Indikator Sekolah yang Bermutu Menurut Sekolah
1. Dari aspek Siswa, kepala sekolah lebih banyak menjawab bahwa indikator sekolah yang bermutu dari

aspek siswa adalah siswa harus memiliki motivasi yang baik, rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Memiliki karakter yang baik nilainya bagus, semangat dan minat belajar yang tinggi.

2. Dari aspek Guru, guru dituntut memiliki kemampuan pedagogik yang baik dan memiliki dedikasi, bertanggung jawab integritas dan semangat kerja yang tinggi, dan kompeten. Selain itu, guru harus memiliki wawasan yang luas dan menjadi teladan yang baik. Kepala SMP Al-Islam dituntut sungguh-sungguh mengajar dan tidak sering absen. Kepala SMPN 5 Bandung menilai bahwa guru harus memiliki kreativitas menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan.
3. Dari aspek Sarpras, menurut hasil jawaban dari sekolah, kelengkapan fasilitas pendidikan merupakan indikator utama dan harus dipenuhi dalam penilaian suatu sekolah yang bermutu, antara lain ruang kelas terpenuhi sesuai rombel yang layak, kelengkapan laboratorium dan perpustakaan, harus dilengkapi dan dipenuhi, serta sarana penunjang lain seperti olahraga dan kesenian agar bisa dijadikan media pembelajaran.
4. Dari aspek Prestasi, terdapat satu sekolah yang menilai aspek prestasi tidak berpengaruh terhadap mutu sekolah. Sekolah lain menilai bahwa prestasi yang dicapai dengan sehat melalui pembinaan yang terencana dan terukur; dengan prestasi bagus sangat membantu mutu sekolah; dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan mutu; selain dengan nilai UN bagus dan siswa dapat berprestasi di bidang lain.
5. Dari aspek karakter warga sekolah, adanya komunikasi

yang baik antara sekolah dengan warga sekolah; peran warga sekolah ikut memonitoring siswa di luar sekolah, saling disiplin; takut akan Allah, orang tua, rasa sayang teman akan menjadikan siswa yang berakhlakulharimah; terciptanya kondisivitas dan kebersamaan yang baik; adanya hubungan antara sekolah dengan warga masyarakat sangat mendukung adanya sarana pendidikan yang mendukung sebagai mendukung indikator mutu sekolah.

h. Prestasi Akademik, Nonakademik, dan Persentase Siswa yang Diterima di Sekolah Favorit

Gambaran prestasi akademik sekolah sampel sangat terlihat pada perbedaan antara capaian prestasi sekolah dengan nilai rata-rata UN tinggi dan sekolah dengan nilai rata-rata UN rendah. Seperti SMP BPK 1 Penabur selain penghargaan di bidang lomba Science ICAS, Matematika (Math ICAS, Math Sasmo, Mathematics Kangaroo), *Science Overseas Innovative Challenge*, *Story telling OLSN*, serta OSN, juga memperlihatkan prestasi sebagai SMP dengan torehan predikat SMP dengan capaian hasil rata-rata UN SMP tertinggi se-Jawa Barat tahun 2016.

Pada prestasi akademik dengan capaian indikator jumlah siswa jumlah siswa yang diterima di sekolah favorit, dalam dua angkatan lulusan tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017, terlihat bahwa sekolah dengan akreditasi A dengan UN tinggi seperti SMPN 5 Bandung dan SMPK BPK 1 Penabur lebih banyak diterima di SMA/SMK favorit. Tahun 2015/2016 lulusan SMPK BPK 1 Penabur sebanyak 305 siswa dan tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 256 siswa diterima di SMA favorit. Sebanyak 210 lulusan SMPN

5 Bandung tahun 2015/2016 meningkat di tahun ajaran berikutnya sebanyak 214 lulusan diterima di SMA favorit. Pada kelompok sekolah lain, sebanyak 20 siswa lulusan di SMPN 23 Bandung diterima di SMA favorit (2015/2016) dan di tahun berikutnya tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 30 lulusannya diterima di SMA favorit. Berikutnya, lulusan SMPN 3 Cililin hanya sebagian kecil masing-masing sebanyak 5 siswa dan 9 siswa lulusannya diterima di SMA favorit. Lima SMP lainnya meski dengan akreditasi A dan rata-rata nilai UN rendah tidak ada yang diterima di SMA favorit.

Pada prestasi nonakademik, hanya beberapa sekolah yang ikut bersaing dengan berbagai prestasi yang bervariasi, SMPN 32, juara atletik dan tenis meja OSN, tahun berikutnya juara 1 lomba baris berbaris (LBB), juara 3 silat OSN. Sementara itu, SMPK BPK 1 Penabur bersaing di kompetisi T-Rabel Basketball, tenis meja, lomba cipta cerpen, lomba desain poster, lomba musik tradisional BPK Penabur pusat, lomba fotografi, ICAS *Digital Technology* dan *Robotic*. SMPN 5 Bandung berkompetisi melalui prestasi sepatu roda internasional, piano internasional, robotik internasional, dan jura *cheer leader* tingkat nasional. SMPN 3 Cililin sebagai juara 2 karate putera/puteri tahun 2017, juara 3 pencak silat putera 2017, dan juara 3 atletik putera tahun 2017.

C. Standar Nasional Pendidikan yang Paling Mempengaruhi terhadap Pencapaian UN

Berdasarkan jawaban dari kepala dan wakil kepala sekolah SMP sampel kajian bahwa beberapa SNP yang paling mempengaruhi terhadap pencapaian UN yang paling banyak adalah Standar

Isi. Hal ini dapat dipahami standar isi merupakan jawaban bagaimana sekolah mampu melakukan PBM dengan ruang lingkup materi yang dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, serta penguasaan kompetensi yang berjenjang. Standar berikutnya jawaban sekolah terkait standar yang paling mempengaruhi terhadap pencapaian UN adalah Standar Proses, Standar Penilaian dan SKL, Standar sarpras, dan Standar PTK.

Rekapitulasi SNP yang paling mempengaruhi terhadap pencapaian UN dari 4 kabupaten/kota atau 36 sekolah adalah standar proses sebanyak 20 (55,56 persen), SKL dan standar isi masing-masing sebanyak 14 (38,89 persen), standar sarpras sebanyak 13 (36,11 persen), standar penilaian sebanyak 10 (27,78 persen), standar PTK sebanyak 9 (25,00 persen), standar pembiayaan sebanyak 4 (11,11 persen), dan standar pengelolaan sebanyak 2 (5,56 persen). Dengan demikian, standar proses yang sangat mempengaruhi pencapaian UN karena lebih dari 50 persen menjawab standar tersebut. Sebaliknya, standar pembiayaan yang paling tidak mempengaruhi karena hanya 11 persen yang menjawab.

Rekapitulasi perlunya pengurangan SNP dari yang berlaku saat ini adalah penyederhanaan standar nasional dijawab oleh empat sekolah (11,11 persen) dari 36 sekolah, terdapat satu sekolah mengusulkan kultur belajar dan keunggulan sekolah, dan satu sekolah mengusulkan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.

Berdasarkan implementasi SNP di Kota Surabaya, Kota

Bandung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Gunung Kidul dapat dianalisis bahwa SNP yang dilaksanakan di sekolah tidak semudah yang dituliskan. Pelaksanaan SNP tersebut sangat tergantung pada dana yang dimiliki sekolah dan para pengelola yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Sekolah-sekolah yang secara tertulis sudah berakreditasi A juga mengalami kendala dalam mengimplementasikan SNP.

Sekolah dengan akreditasi A masih ditemukan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai antara mata pelajaran yang diajarkan di daerah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gunung Kidul dan salah satu sekolah sampel di Kota Bandung. Mata pelajaran yang masih ditemui tidak sesuai adalah Seni Budaya dan TIK. Masih ada guru yang kompetensinya kurang memadai diakui oleh sekolah di empat kabupaten/kota sampel.

Laboratorium bergantian dengan kelas atau kurang memadai masih ditemui di sekolah berakreditasi A di Kota Surabaya, Kota Bandung, dan Kabupaten Buleleng. Jumlah ruang kelas kurang, buku penunjang belum mencukupi ditemui di Kota Bandung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gunung Kidul. Ruang perpustakaan tidak cukup ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Bandung. Kinerja guru tidak optimal karena mengajar 24 jam mengajar diakui oleh sekolah sampel yang berada di Kota Surabaya, Kabupaten Buleleng, dan Kota Bandung.

Masing-masing kabupaten/kota diambil sampel 8 sekolah berakreditasi A dan masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasi SNP. Ketidaksesuaian antara nilai akreditasi dengan kenyataan di sekolah merupakan suatu evaluasi untuk memperbaiki cara penilaian akreditasi yang berbasis proses. Akreditasi seharusnya bertanya tentang apa yang menjadi kekurangan sekolah agar sekolah tersebut dapat

diperbaiki agar paradigma ini dapat mengubah cara akreditasi yang cenderung menilai, sehingga sekolah cenderung berusaha mencukupi sekolahnya untuk sementara dalam masa penilaian. Cukupnya sekolah tersebut hanya untuk sementara saja, setelah itu kembali ke keadaan yang sebenarnya.

D. Indikator yang Dianggap Tepat dalam Mengukur Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, serta Standar yang Dianggap Penting

Untuk mengetahui indikator mana yang dianggap sesuai mengukur pemenuhan SNP maka dilakukan Exploratory Factor Analysis butir jawaban pertanyaan akreditasi dengan borang terbaru tahun 2017 yang terdiri dari 124 item pertanyaan. Jumlah sekolah yang dianalisis 8.201 dengan kriteria untuk menentukan faktor yang bermakna adalah eigen value > 1 dan loading factor > 0,5. Butir instrumen meliputi delapan komponen dalam SNP.

1. komponen standar isi nomor 1—9;
2. komponen standar proses nomor 10—30;
3. komponen standar kompetensi lulusan nomor 31—37;
4. komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 38—56;
5. komponen standar sarana dan prasarana nomor 57—80;
6. komponen standar pengelolaan nomor 81—95;
7. komponen standar pembiayaan nomor 96—111; dan
8. komponen standar penilaian nomor 112—124.

Berikut ini adalah hasil analisis faktor terhadap 124 butir pertanyaan akreditasi tahun 2017;

Nomor Butir	Faktor
<i>butir14, butir34, butir36, butir37, butir45, butir56, butir62, butir64, butir70, butir71, butir72, butir73, butir74, butir76, butir77, butir78, butir79, butir80, butir86, butir91</i>	1
<i>butir24, butir25, butir26, butir27, butir28, butir29, butir30, butir33, butir50, butir92</i>	2
<i>butir15, butir16, butir17, butir18, butir19, butir20, butir21, butir22, butir23, butir35</i>	3
<i>butir99, butir100, butir102, butir103, butir104, butir105, butir106, butir107, butir108</i>	4
<i>butir114, butir115, butir116, butir117, butir118, butir119</i>	5
<i>butir48, butir49, butir88, butir89, butir90, butir93, butir94, butir95</i>	6
<i>butir5, butir6, butir7, butir8, butir9, butir10, butir11, butir12, butir113</i>	7
butir1, butir2, butir3, butir4	8
<i>butir51, butir52, butir53, butir54, butir55</i>	9
<i>butir65, butir66, butir67, butir68, butir69</i>	10
butir38, butir39, butir40, butir47	11
butir81, butir82, butir83, butir84, butir85, butir87	12
butir58, butir60, butir61, butir63, butir75	13
butir41, butir42, butir43, butir44	14
<i>butir120, butir122, butir123</i>	15
butir96, butir97, butir98	16
butir57, butir59	17
butir109, butir110, butir111	18
butir31, butir32	19

Nomor Butir	Faktor
butir101, butir121, butir124	20
butir13, butir46	21
<i>butir112</i>	22

Keterangan:

Font yang cetak *miring* merupakan butir yang mengelompok pada faktor tsb, namun memiliki faktor loading rendah ($< 0,5$)

Berdasarkan pengujian EFA ($n = 8.201$), dari 124 item instrumen akreditasi SMP/MTs, terbentuk 22 faktor/atribut (eigen value >1). Ke-22 faktor tersebut merupakan indikator dari 8 SNP. Terdapat beberapa item di setiap faktor yang kurang mewakili/bermakna dalam mengukur faktor tersebut (faktor loading rendah atau kurang dari 0,5).

Terdapat beberapa standar yang tidak diwakili oleh faktor yang mengelompok menjadi 22 faktor. Butir pertanyaan yang bermakna mengelompok pada faktor atau indikator tertentu. Faktor atau indikator tersebut dapat digolongkan ke dalam 8 SNP. Standar yang butir pertanyaannya banyak memiliki loading faktor tinggi (di atas 0,5) adalah sarpras, PTK, dan pengelolaan. Standar proses yang memiliki butir pertanyaan paling banyak dan dianggap penting namun hampir separuhnya memiliki loading faktor rendah, perlu ditinjau kembali dengan membuat instrumen lebih operasional untuk mengukur proses pembelajaran di kelas. Butir pertanyaan dalam standar proses yang memiliki loading faktor tinggi lebih mengukur pengawasan pembelajaran oleh kepala sekolah, sedangkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang terukur. Standar penilaian terdapat tumpang tindih dengan standar proses. Untuk standar pembiayaan yang terdiri

dari butir 96 sampai dengan 112 yakni 14 butir terdapat 8 butir yang bermakna untuk mengukur standar pembiayaan. Dari 8 butir tersebut, 7 butir mengelompok pada faktor pengelolaan keuangan dan satu butir mengelompok pada faktor gaji dan honor. Jika 8 butir yang mengelompok pada pengelolaan keuangan dan dapat masuk dalam standar pengelolaan maka satu butir saja yang masuk dalam faktor gaji dan honor yang masuk dalam Standar Pembiayaan. Artinya, standar pembiayaan hanya diukur oleh faktor gaji dan honor.

Sebenarnya standar pembiayaan masing-masing sekolah berbeda-beda sesuai dengan kemampuan sekolah. Standar pembiayaan seharusnya diperlukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan pemenuhan SNP agar memiliki patokan. Pembiayaan di sekolah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Indikator Masing-masing Standar

Standar	Indikator
Isi	KTSP dan silabus (1)
	perangkat pembelajaran sikap dan pengetahuan (2)
Kompetensi Lulusan	menentukan kelulusan siswa (3)
	sikap spiritual dan sikap sosial (4)
Pendidik & Tendik	Kompetensi pendidik (5)
	Tendik (6)
	Kompetensi guru (7)
	jumlah siswa dan rasio guru (8)
	kualifikasi guru (9)

Standar	Indikator
Sarpras	Sarpras (10)
	ruang guru dan pimpinan (11)
Proses	persyaratan keselamatan & kesehatan sekolah (12)
	luas lahan dan bangunan sekolah (13)
	Pengawasan pembelajaran oleh kepek (14)
Pengelolaan	pengelolaan keuangan (15)
	Prinsip kepemimpinan kepek (16)
	visi misi sekolah (17)
	Rencana anggaran sekolah (18)
	laporan keuangan (19)
Pembiayaan	Gaji dan honor (20)
Penilaian/Proses	pelaksanaan penilaian oleh guru (21)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data sekunder Ujian Nasional dan Akreditasi ditemukan bahwa cukup banyak sekolah berakreditasi A yang memiliki nilai Ujian Nasional di bawah 60.
2. Pemenuhan SNP secara nasional maupun berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi sampel dari tahun ke tahun selalu sama kecenderungannya. SNP yang pemenuhannya paling rendah dari tahun ke tahun adalah standar PTK, SKL, standar sarpras, dan standar proses.
3. Hasil Ujian Nasional dari tahun ke tahun terus menurun
4. Sekolah Akreditasi A Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Implementasi SNPnya, masih terdapat sekolah sampel dengan akreditasi A namun kekurangan ruang kelas.
5. Hasil Penilaian Proses Belajar Di Akhir Jenjang Berupa UN Belum Tercermin Pada Sekolah Hasil Akreditasi A.
6. Berdasarkan implementasi pada masing-masing standar di daerah sasaran yaitu:
 - a. Standar isi yang terkait kurikulum bahwa sebagian besar sekolah (91,7%) sudah memiliki dokumen kurikulum dan melaksanakan K-13, hanya 1 sekolah (8,3%) menggunakan KTSP 2006.

Penerapannya adalah semua guru menggunakan silabus dan RPP sesuai ketentuan, buku yang disediakan pemerintah sesuai dengan kurikulum, dan sebagian besar sekolah menilai kontribusi kurikulum terhadap UN cukup baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum adalah motivasi siswa, kemampuan guru kurang, inovasi dan kreativitas guru kurang, perlu disiplin guru, kurikulum sering berubah/ kurikulum KTSP 2006, anggaran kurang, dan sarpras kurang.

- b. Standar Proses, sebagian besar sekolah (72,2%) penggunaan ruangan dan peraga sudah memadai, sebesar 66,7% sekolah menggunakan buku telah sesuai dengan yang disediakan pemerintah. Sebagian besar sekolah (77,8%) sudah melaksanakan PR dan remedial, dan sebagian sekolah (63,9%) menjalankan PBL. Sebagian lainnya belum berjalan dengan lancar.
- c. Standar SKL dilaksanakan oleh semua sekolah melalui ekstrakurikuler, pengayaan, program bimbingan belajar melalui pendidik dan siswa.
- d. Standar PTK dilaksanakan belum maksimal karena ada guru menjelang pensiun sehingga sulit mengikuti perkembangan kurikulum, kualitas guru rendah. Guru masih perlu ditingkatkan kemampuan mengolah kelas, melatih siswa kreatif dan berkarakter.
- e. Standar Sarpras sebagian besar sekolah memiliki prasarana belum lengkap karena ruang kelas kurang, laboratorium IPA, IPS, komputer, perpustakaan, olahraga, komputer, ruang UKS.

- f. Standar Pengelolaan, sebagian besar sekolah sudah melaksanakan standar pengelolaan namun belum maksimal karena masih ada kendala dalam penerapannya seperti kekurangan guru PNS.
 - g. Standar Pembiayaan, sebagian besar sekolah telah melaksanakan pembiayaan yang sebagian besar dari BOS dan sebagian dari BOS/Bopda yang sering pencairannya lambat.
 - h. Standar Penilaian, sebagian sekolah menyatakan guru belum menguasai penilaian sesuai standar.
8. Akreditasi masih berfokus pada kelengkapan baik dokumen maupun sarpras, belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses pembelajaran (contoh bagaimana sarpras dimanfaatkan)
- 1. Berdasarkan analisis faktor terhadap data sekunder hasil akreditasi tahun 2017 menunjukkan bahwa butir pertanyaan akreditasi yang bermakna mengelompok pada 22 faktor atau indikator.
 - a. Standar Proses yang dianggap penting dengan jumlah pertanyaan dalam akreditasi paling banyak, yakni 20 pertanyaan, 7 butir pertanyaan yang bermakna dan 13 butir pertanyaan tidak bermakna dengan nilai loading faktornya di bawah 0,5. Butir pertanyaan dalam standar proses yang bermakna mengelompok pada indikator/faktor pengawasan proses pembelajaran oleh kepala sekolah, sedangkan proses pembelajaran di kelas oleh guru, butir yang mengukurnya tidak bermakna sehingga perlu ditinjau kembali.
 - b. Standar pembiayaan terwakili oleh 15 butir pertanyaan akreditasi, berdasarkan analisis faktor terdapat 7 butir pertanyaan dengan loading faktor $> 0,5$ mengelompok

pada indikator/ faktor pengelolaan keuangan dan 1 butir pertanyaan yang loading faktor > 0,5 berada pada indikator gaji dan honor yang masuk dalam standar pembiayaan .

- c. Dalam Standar Penilaian terdapat 3 butir yang loading faktor 0,5 dari 12 butir pertanyaan. Butir pertanyaan yang bermakna dengan loading faktor 0,5 mengelompok pada faktor pelaksanaan penilaian oleh guru, sedangkan pelaksanaan penilaian oleh guru tumpang tindih dengan standar proses. Perlu ditinjau kembali penilaian oleh guru dalam standar penilaian dan dalam standar proses.

B. Saran

1. Perlu adanya evaluasi akreditasi bertitik tolak dari hasil UN. karena nilai UN merupakan cerminan hasil akhir proses belajar
2. Evaluasi akreditasi dilakukan 3 tahun sekali karena lama belajar di SMP dan SMA 3 tahun
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan Atribut Turun Naiknya Status Akreditasi
4. Akreditasi perlu melihat proses pembelajaran tidak hanya berfokus aada kelengkapan dokumen administrasi akreditasi
5. Klasifikasi mutu sekolah utk acuan status akreditasi berdasarkan UN:

Klasifikasi Baik -> Nilai Un 80>

Klasifikasi Sedang -> Nilai Un 69 – 70

Klasifikasi Rendah -> Nilai Un < 59

6. Berdasarkan simpulan analisis faktor maka:
 - a. Standar Proses yang dianggap penting dengan jumlah pertanyaan dalam akreditasi paling banyak yakni 20 pertanyaan, 7 butir pertanyaan yang bermakna dan 13 butir pertanyaan tidak bermakna dengan nilai loading faktornya di bawah 0,5 sehingga perlu ditinjau kembali butir yang mengukur standar proses tersebut.
 - b. Standar pembiayaan terwakili oleh 15 butir pertanyaan akreditasi, berdasarkan analisis faktor terdapat 7 butir pertanyaan dengan loading faktor > 0,5 mengelompok pada indikator/ faktor pengelolaan keuangan dan 1 butir pertanyaan yang loading faktor > 0,5 berada pada indikator gaji dan honor yang masuk dalam standar pembiayaan. Berdasarkan analisis di atas maka standar pembiayaan sebenarnya diperlukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan dalam pemenuhan SNP agar pemerintah memiliki patokan namun pembiayaan di sekolah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial sekolah.
 - c. Standar penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian oleh guru perlu ditinjau kembali karena penilaian oleh guru juga dilakukan di standar proses.

C. OPSI KEBIJAKAN

1. Perlu dilakukan review hasil akreditasi secara periodik setiap 3 tahun sekali berdasarkan hasil Ujian Nasional

karena lama belajar di SMP 3 tahun untuk meninjau kembali klasifikasi status akreditasi SMP

2. Hasil pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dari tahun ke tahun, yang terendah adalah standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan standar proses. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut penyebab lebih rendahnya empat standar tersebut dari tahun ke tahun.
3. Agar hasil UN dapat meningkat seiring dengan hasil akreditasi, maka perlu dilakukan pemetaan sekolah berdasarkan hasil UN.
4. Semua kriteria penilaian dalam akreditasi pada saat verifikasi kondisi sekolah harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di sekolah. Sekolah yang sudah diakreditasi dievaluasi kembali dengan melihat hasil UN, 3 tahun berturut-turut, jika terjadi penurunan maka akreditasi sekolah tersebut perlu ditinjau kembali.
5. Asesor dalam menilai sekolah seharusnya lebih berorientasi pada proses pembelajaran, tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi. Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap penetapan standar pembiayaan, standar Proses dan standar penilaian karena berdasarkan analisis faktor hasil akreditasi tahun 2017 memperlihatkan hasil yang tidak signifikan.
6. Berdasarkan analisis faktor terhadap data akreditasi tahun 2017, standar proses yang dianggap penting dalam mutu pendidikan memiliki nilai butir yang loading faktornya rendah perlu diperbaiki instrumen akreditasi yang menilai standar proses agar lebih

operasional dan merefleksikan proses pembelajaran yang sebenarnya. Sedangkan untuk standar pembiayaan perlu ditinjau kembali tingkat kepentingan penetapan standar tersebut untuk pemerintah atau untuk sekolah. Bagi standar penilaian, perlu ditinjau kembali penilaian oleh guru dalam standar proses dan penilaian oleh guru dalam standar penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Meni, dkk. 2016. *Kajian Akreditasi dan Standar Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.
- Juran, J.M.. *Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services*. The Free Press. New York, 1992.
- Kumano, Y. 2001. *Authentic Assesment and Portfolio Assessment Its Teory and Practice*. Japan: Shizuoka University.
- Mukhopadhyay, Marmar. 2005. *Total Quality Management in Education: Second Edition*, New Delhi: SAGE Publication pp. 35.
- National Accreditation for Education Board for Education and Training (NABET)*. 2008. *Accreditation Standar for Quality School Governance (Second Edition, September 2008)*. NABET India.
- Philip B. Crosby, *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain*, A Mento Book, 1980.
- Yudha, Yusuf Hadi dkk. 2016. *Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Mutu Sekolah*. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.
- Sanjaya, W. 2006. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Tayibnapis. F.Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Urbina, Anastasi. 2016. *Psychological Test*. 7 Ed. India: Pearson.
- Deeming, W. Edwards. 2000. *Out of Crisis*, MIT Press Edition., Cambridge, Massachussets, USA.
- Zainul & Nasution. 2001. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta:Dirjen Dikti.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- <https://nasional.tempo.co/read/1079399/soal-hots-yang-bikin-gaduh-peserta-un-sma>.

AKREDITASI

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

Kajian Akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini merupakan hasil kajian tentang adanya 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang mutunya dapat dilihat dari peringkat akreditasi sekolah dan hasil ujian nasional (UN) yang dianggap mampu menggambarkan mutu sekolah khususnya mutu SMP.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran pemenuhan SNP dan mutu sekolah menurut peringkat akreditasi dan hasil UN, mengidentifikasi implementasi SNP pada sekolah dan pengertian mutu sekolah terutama yang berada pada posisi anomali, dan mengidentifikasi indikator mana yang dianggap tepat dalam mengukur pemenuhan SNP, serta standar-standar mana yang dianggap penting atau sesuai dengan kebutuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi dan survei di lapangan. Studi dokumentasi menggunakan data sekunder dari BAN S/M dan survei di lapangan untuk memperoleh data primer menggunakan sampel secara purposif sehingga diperoleh 4 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Buleleng, Kota Bandung, dan Kota Surabaya.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

